

Pada tahun ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor 85/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2020, tanggal 1 April 2020, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (JPKP) telah ditetapkan sebagai Jurnal Terakreditasi Peringkat 5. Capaian tersebut menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas JPKP pada terbitan-terbitan selanjutnya melalui peningkatan mutu artikel dan penampilan jurnal dari segi desain dan tata letak.

JPKP Volume 12 nomor 1 tahun 2020 memuat enam artikel dengan topik-topik yang bervariasi mulai dari pendidikan karakter, evaluasi pembelajaran, beban kerja guru, perilaku hidup sehat siswa, dan pemberian dana BOP PAUD. **Asyraf Suryadin** membahas tentang pola pendidikan karakter yang dapat diketahui melalui bentuk kasus kenakalan remaja serta perilaku negatif dikalangan remaja. Sedangkan, **Ikhyia Ulumudin** menyoroti tentang penerapan kurikulum yang sudah memuat kompetensi abad 21 di Indonesia yang tidak sejalan dengan hasil *Program for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018 yang mengalami penurunan, hal tersebut ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang pada kegiatan pendahuluan sudah sangat baik namun pada kegiatan inti dan penutup masih tergolong cukup terutama pada pelaksanaan pembelajaran saintifik dan dorongan guru dalam pengembangan metakognisi. Adapun **Simon Sili Sabon** menemukan bahwa masih banyak guru yang terkendala dalam pemenuhan beban kerja minimal sehingga mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Selanjutnya, **Acep Saepul Rahmat** dan kawan-kawan, menyajikan bagaimana model pembelajaran berbasis *inquiry* dengan bantuan media *games book* dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar. Sementara itu, **Teguh Suriyadi** menyatakan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah yang berlokasi di sekitar pasar belum memuaskan karena masih banyak siswa SD yang belum menerapkan perilaku hidup sehat. Terakhir, **Sudiyono dan Yunita Murdianingrum** menyampaikan bahwa pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa, namun penerimaan dana belum tepat waktu dan pemanfaatan dana juga belum sesuai dengan petunjuk teknis.

Keenam artikel tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, dan daya kritis para pembaca terhadap kebijakan pendidikan. Akhir kata, Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan mengucapkan selamat membaca dan semoga mendapatkan manfaat dari artikel-artikel yang disajikan.

ISSN : 02162792 E-ISSN : 2654427X

# JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 13 Nomor 1/2020

## Daftar isi

---

1. Pola Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Bangka Barat  
Asyraf Suryadin .....1
2. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran yang Dilakukan oleh Guru Berdasarkan Hasil Pisa 2018  
Ikhya Ulumudin .....15
3. Kebijakan Lima Hari Sekolah di Tengah Problematik Pemenuhan Beban Kerja untuk Mendapat Tunjangan Profesi Guru  
Simon Sili Sabon .....27
4. Pengaruh Model Inquiry Dengan Bantuan Media Games Book Terhadap Pemahaman Konsep IPA Siswa Sekolah Dasar  
Acep Saepul Rahmat, Siti Badriyah, Rini Susilowat .....45
5. Perilaku Hidup Sehat Siswa SD di Sekolah Sekitar Pasar  
Teguh Supriyadi .....55
6. Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2019  
Sudiyono, Yunita Murdiyningrum .....63

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the form of juvenile delinquency cases and negative behavior among teens, to figure out the pattern of character education needed for dealing with juvenile delinquency in West Bangka Regency. This study was conducted in 2019 using the descriptive quantitative methods through survey. The number of research samples was determined based on the theory of Isaac and Michael with a Significance Level of 5%. Total respondents were 666 students coming from all secondary level. The data was analyzed using descriptive analysis method of the questionnaire. The highest percentage of juvenile delinquency that received negative ratings are promiscuity (17%), bullying (13%), night out (11%), and dating (10%). Smoking (9%), skipping school (7%), drugs (5%), violence (5%), drinking (4%), pornography (3%), rebelling against teachers (3%), and stealing (2%) are categorized in low and medium rate. As many 89% respondents agreed that the character education can develop the potential of students to be kind, think well, and act well. Thus, it underlines the reason why the collaborative intervention of adults around juvenile and the formation of habits in four environments namely family, peer, school, and community are needed.*

**Keywords:** *juvenile delinquency, high school, character education, psychosocial environment*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kasus kenakalan remaja serta perilaku negatif di kalangan remaja sehingga diketahui gambaran pola pendidikan karakter dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui survei. Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan teori *Isaac and Michael* dengan *Significance Level* 5%. Responden penelitian berjumlah 666 siswa yang berasal dari seluruh sekolah menengah. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif terhadap instrumen penelitian yang berupa kuesioner. Diketahui kenakalan remaja yang mendapat penilaian negatif dari yang paling tinggi adalah: pergaulan bebas (17%), *bullying* (13%), keluar malam (11%), dan pacaran (10%). Perilaku seperti merokok (9%), bolos sekolah (7%), narkoba (5%), kekerasan (5%), mabuk (4%), tindakan pornografi (3%), melawan guru (3%), dan mencuri (2%) masih dalam kategori sedang dan rendah. Sebanyak 89% responden setuju bahwa pendidikan karakter dapat mengembangkan potensi siswa untuk berhati baik, perpikiran baik, dan bertindak baik sehingga perlu adanya kerja sama intervensi orang dewasa di sekitar remaja dan pembentukan kebiasaan dalam empat lingkungan yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat.

**Kata kunci:** kenakalan remaja, pendidikan karakter, sekolah menengah, lingkungan psikososial

## PENDAHULUAN

Remaja memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan perilaku. Dalam menemukan jati dirinya, tak jarang remaja melakukan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan perilaku remaja seringkali disebut dengan kenakalan remaja. Dekadensi moral tidak kalah memprihatinkan di kalangan remaja. Umumnya remaja mudah labil dan mengikuti pergaulan tanpa melihat akibat dari apa yang dilakukan.

Contoh bentuk kenakalan remaja yang terjadi diantaranya: siswa melawan guru/orang tua, tawuran, merokok, mabuk dengan meminum air rebusan pembalut, pergaulan bebas hingga prostitusi online yang melibatkan remaja.

Dalam kehidupan sosial remaja dan berdasarkan data yang bersumber dari Kepolisian Bangka Barat, dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun 2020 terdapat 18 kasus kenakalan remaja yang dilakukan siswa SMP maupun SMA sederajat. Adapun jenis penyimpangan tersebut berupa pencurian, pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, penganiayaan, dan pencabulan. Adapun kenakalan remaja dengan siswa SMP/SMA sederajat yang menjadi korban terjadi pada bentuk perilaku kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, dan persetubuhan.

Semua perilaku negatif di kalangan remaja tersebut jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang cukup parah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan selain karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Masalah kenakalan remaja perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan sepatutnya dilakukan upaya menekan tindak kenakalan remaja.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, prestasi remaja Kabupaten Bangka Barat belum cukup membanggakan. Prestasi remaja Bangka Barat bidang akademik pada peringkat Ujian Nasional tingkat SMP *stagnan* dalam tiga tahun terakhir, yaitu berada pada peringkat kedua dari bawah.

Tindak kenakalan remaja yang masih kerap terjadi dan masih rendahnya prestasi remaja Bangka Barat menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam upaya mewujudkan visi misi Bupati Bangka Barat Tahun 2016-2021. Adapun visi Bupati

Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah "Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021". Pernyataan visi tersebut mengandung makna yaitu "Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas, dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari". Penelitian diprioritaskan pada misi ke-3, yaitu: membangun masyarakat yang maju dan berkualitas, karena pencapaian dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Perda RPJM 2016-2021, 2016: 5-1).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan kenakalan remaja, diantaranya (1) kurangnya kasih sayang dan perhatian dari pihak keluarga dan juga adanya perpecahan dalam keluarga, (2) tidak adanya pengakuan dari masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak yang bermasalah, serta (3) adanya ajakan dari teman untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak adanya teman yang mengajak untuk melakukan kegiatan yang positif (Purnamasari, 2018: 1). Penelitian lain menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja antara lain a) faktor internal: krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, b) faktor eksternal: kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, minimnya pemahaman keagamaan, pengaruh lingkungan sekitar, dan tempat pendidikan (Sumara *et al.*, 2017: 352).

Penelitian lain menyebutkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas geng dengan kenakalan remaja. Artinya, semakin tinggi konformitas geng maka semakin tinggi pula kenakalan remaja (Prihardani, 2012: 6). Senada dengan penelitian tersebut, sebuah penelitian menyebutkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. Koefisien korelasi bertanda negatif artinya semakin tinggi konformitas teman sebaya maka semakin rendah kenakalan remaja, dan begitu pula sebaliknya (Asih, Winarno, & Hastuti, 2012: 191).

Kenakalan remaja juga dapat dilakukan atas dasar kesetiakawanan disebabkan karena takut kehilangan teman dan tekanan untuk melakukan tindakan kriminal. Ini menunjukkan

bahwa remaja merasakan lebih banyak tekanan dalam hubungan dengan teman sebaya (Bazon & Estevão, 2012: 1162). Namun aspek teman sebaya dalam penyebab kenakalan remaja tidak cukup untuk menjelaskan munculnya kenakalan remaja, aspek ini harus dipertimbangkan bersama dengan sifat hubungan remaja dalam keluarga dan di sekolah (Bazon & Estevão, 2012: 1164).

Mengingat pentingnya peranan remaja sebagai generasi muda bagi masa depan bangsa, maka masalah kenakalan remaja mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap remaja. Pada dasarnya setiap remaja berpotensi melakukan bentuk-bentuk kenakalan remaja, namun dengan adanya pendidikan karakter diharapkan dapat mengarahkan remaja Bangka Barat mencapai visi misi Kabupaten Bangka Barat 2016-2021.

Permasalahan kenakalan remaja yang telah dijabarkan di atas menggugah peneliti untuk mendapat gambaran terhadap siswa menengah terhadap jenis-jenis kenakalan remaja dan pendidikan karakter. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan penyebab terjadinya kenakalan remaja dan penelitian lain yang mendeskripsikan siswa terhadap sesuatu hal yang dihubungkan dengan kenakalan remaja. Namun belum terdapat penelitian yang menggambarkan kenakalan remaja yang dihubungkan dengan pendidikan karakter dalam memperkecil peluang remaja terjerumus dalam berbagai bentuk kenakalan remaja. Poin inilah yang menjadi *novelty of research* penelitian. Hasil penelitian akan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola karakter yang ditawarkan untuk menekan berbagai bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat?

## KAJIAN LITERATUR

Kenakalan remaja dalam konsep psikologis disebut sebagai *juvenile delinquency*, yang artinya perilaku jahat, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda (Jamaludin, 2015: 369). Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi

pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trademark* (Sudarsono, 2012: 10).

Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan dirasakan sehingga menimbulkan imitasi terhadap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak. Sebagaimana menurut Kartini Kartono, *juvenile delinquency* yang berarti "perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang" (Kartono, 2017: 6). *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di bangku sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan. Penelitian lain menyebutkan bahwa kombinasi faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan banyak dan beragam. Penyebabnya selalu terletak pada kombinasi faktor, dan tidak ada dua kombinasi yang sama (Bridges, 1927: 576). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab kenakalan remaja disebabkan tiga faktor, yaitu faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Iqbal, 2014: 237).

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah sikap dan perbuatan remaja yang keluar dari norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk uji coba dan penemuan jati diri remaja. Remaja yang memasuki masa transisi dari anak-anak ke dewasa cenderung melakukan suatu sikap atau perbuatan yang dilihat. Tanpa pemahaman yang baik, pengawasan, dan pengendalian dari orang dewasa di sekitarnya, kenakalan remaja dapat menyebabkan kerugian bagi remaja tersebut maupun lingkungan sekitarnya. Salah jalan ataupun salah dalam menentukan sikap dapat menjerumuskan remaja pada tindakan yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, para remaja sebaiknya didekatkan dengan nilai-nilai masa lalu yang terdapat dalam cerita kearifan lokal seperti cerita rakyat dan hal ini banyak diperoleh dari kehidupan di masyarakat desa. Nilai masa lalu tersebut seperti kejujuran, ketabahan, moral, etika, dan kegotongroyongan (Suryadin, 2013: 181).

Berbagai kasus kenakalan baik remaja sebagai pelaku maupun korban beragam. Dalam tiga tahun terakhir kasus pencurian dengan pelaku dari remaja SMA paling banyak terjadi. Selain menjadi pelaku, remaja juga menjadi korban dari tindak kenakalan remaja. Dalam tiga tahun terakhir, kasus persetubuhan menjadi kasus terbanyak dengan siswa menengah sebagai korban. Selain kedua hal tersebut, kasus pencabulan, perkosaan, kekerasan terhadap anak, pengeroyokan dan penganiayaan terjadi di kalangan remaja seperti yang ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Kenakalan Remaja di Kabupaten Bangka Barat

No	Kasus	SMP Pelaku			SMA Pelaku			SMP Korban			SMA Korban		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Pencabulan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3.	Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	3	1
4.	Kekerasan terhadap anak	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
5.	Pengeroyokan	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pencurian	1	1	-	3	14	2	-	-	-	-	-	-
7.	Penganiayaan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kepolisian Bangka Barat, 2019.

#### A. Batasan Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa ke dewasa, dimulai dari pubertas, yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Masa remaja disebut juga sebagai *adolescence*, yang dalam bahasa latin berasal dari kata *adolescere* yang berarti tumbuh menjadi dewasa, yang dalam bahasa Inggris disebut "*to grow into adulthood*". Adolescence merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa, yang terjadi perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial (Syamsu & Sugandhi, 2013: 77).

Masa remaja merupakan masa yang sangat rentan karena anak cenderung lebih menyukai dan ingin mencoba hal-hal baru dari apa yang dilihat atau didengar tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya dampak yang akan dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang menyangkut masa depannya. Untuk itu diperlukan peran orang dewasa guna mengarahkan remaja untuk melewati masa remaja dengan positif dan agar remaja dapat mengendalikan diri dan tidak terjerumus ke dalam karakter negatif. Masa atau fase remaja merupakan salah satu periode yang paling unik dan menarik dalam rentang kehidupan individu

sehingga banyak pakar yang meneliti kehidupan remaja, terutama dalam masalah kenakalan remaja (Jamaludin, 2015: 365-366).

Golongan remaja muda biasanya para gadis yang berusia 13 sampai 17 tahun, dan bagi laki-laki biasanya berusia 14 sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 sampai 18 tahun, maka mereka lazim disebut golongan muda atau pemuda pemudi. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian (Soekanto, 2009: 51). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masa remaja awal berusia 13 atau 14 tahun sampai usia 17 tahun, dan masa remaja akhir berusia 17 sampai usia 21 tahun (Sudarsono, 2012: 13).

Dari penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masa remaja adalah masa bagi remaja untuk berekspressi terhadap sesuatu yang baru dalam menikmati masa pencarian jati diri. Pada masa remaja inilah anak menjadi rentan terhadap hal baru di luar mereka. Dibutuhkan pendampingan yang terus menerus agar anak dapat melewati masa remaja menjadi dewasa yang berbudi. Golongan remaja pada penelitian ini dibatasi pada remaja yang sedang bersekolah pada jenjang sekolah menengah.

#### B. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan karakter bangsa. Pendidikan karakter yang diarahkan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20, 2003: 6).

Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan karakter dari beberapa sumber buku:

- 1) Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya (Zubaedi, 2011: 17).
- 2) Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (*good character*) berlandaskan kebijakan-kebijakan (*core virtues*) yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat (Saptono, 2011: 23).
- 3) Pendidikan karakter adalah pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah kepada lingkungannya (Kesuma, 2011: 5).
- 4) Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu: tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya (Gunawan, 2012: 23).
- 5) Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti, yaitu sebagai proses pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara melatih, menghayati nilai-nilai, dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam kehidupan siswa (Adisusilo, 2014: 70).

Penguatan Pendidikan Karakter seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari lima nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum (Kemdikbud, 2018: 3).

Tujuan pendidikan karakter menurut Kesuma (2011: 9) adalah 1) meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, 2) mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, 3) membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendidikan karakter dalam penelitian ini adalah penanaman akhlak yang baik sehingga menumbuhkan pemikiran, perkataan, dan perilaku yang sesuai dengan norma, adat, dan peraturan yang berlaku hingga menjadi kebiasaan dan diterapkan dalam seluruh lingkungan kehidupan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan kenakalan remaja dan pendidikan karakter. Metode *literatur review* digunakan dalam menyusun pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan dilaksanakan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019. Populasi penelitian adalah seluruh sekolah menengah negeri dan swasta yang berjumlah 35 SMP dan 19 SMA/ sederajat. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan *significance level* 5%, sebagai berikut:

$$S = \frac{\Lambda^2 \cdot n \cdot p \cdot q}{D^2(n-1) + \lambda^2 \cdot p \cdot q}$$

Keterangan:

$\Lambda^2$  dengan dk = 1, taraf kesalahan 5%

P = q = 0,5. D = 0,005.

S = Jumlah sampel

Berdasarkan rumus di atas, dengan taraf kesalahan 5%, maka dari 7504 orang jumlah siswa SMP negeri dan swasta tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Bangka Barat, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 334 responden. Dan dari 6804 orang jumlah siswa SMA dan SMK negeri dan swasta tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Bangka Barat, diperoleh jumlah sampel sebanyak 332 responden. Sehingga total sampel penelitian sebanyak 666 responden. Kuesioner disebar kepada 12 siswa per SMP dan 20 siswa per SMA/SMK. Dari 800 kuesioner yang disebar dan setelah dilakukan verifikasi, ditentukan 666 kuesioner yang dipergunakan sebagai sampel penelitian.

Penentuan responden dilakukan dengan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Penentuan sampel dilakukan oleh enumerator penelitian. Berperan sebagai enumerator penelitian adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau guru Bimbingan Konseling (BK) masing-masing sekolah.



Gambar 1. Teknik Sampling

Sumber: Hidayat, 2012.

#### A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2013: 11). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013: 206).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner dengan penilaian model skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 134). Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang ditemukan, peneliti tuangkan dalam instrumen penelitian berupa kuesioner. Poin konstruk dalam kuesioner diperoleh dari berbagai hasil penelitian dan fakta kejadian kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat.

Kuesioner penelitian diujicobakan kepada 30 siswa SMP Negeri 4 Muntok dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Sebelum siswa mengisi kuesioner, perlu diberikan pengarahan terkait teknis pengisian kuesioner, tujuan dan imbas pengisian kuesioner bagi siswa. Perlu diberi pengertian bahwa kuesioner tidak berpengaruh pada penilaian akademik siswa;
- 2) Siswa cenderung melihat/meniru jawaban teman, untuk itu dalam penyebaran kuesioner sebaiknya perlu dijaga jarak antar responden;
- 3) Ukuran baris setiap kolom perlu perbaikan dikarenakan banyak siswa yang melewati pertanyaan kuesioner dengan jarak baris yang terlalu kecil;
- 4) Dalam pembekalan penyebaran kuesioner oleh enumerator perlu disampaikan bahwa enumerator perlu memastikan siswa sudah menjawab semua nomor soal ketika siswa mengumpulkan kuesioner.

Validitas instrumen diperoleh dengan menggunakan pendapat para ahli (*experts judgement*). Variabel yang diukur dalam

mengetahui kenakalan remaja tertuang dalam kisi-kisi kuesioner yang meliputi pacaran, pergaulan bebas, keluar malam, tindakan pornografi, kekerasan, mencuri, *bullying*, bolos sekolah, merokok, mabuk, narkoba, dan melawan guru. Penilaian pendidikan karakter diukur melalui variabel indikator penerimaan terhadap jam belajar, sanksi di sekolah, organisasi sekolah, pantauan orang tua, pembiasaan baik di rumah, pembiasaan baik di sekolah, dan pantauan guru.

#### B. Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif diolah melalui tahapan-tahapan yang diawali dengan editing, koding, data entri, dan interpretasi. Kemudian data kuantitatif dari kuesioner diolah secara statistik deskriptif menggunakan aplikasi excel yang ditampilkan dalam persentase dan diagram.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan 10% responden menilai kenakalan remaja wajar dilakukan dan 9% lainnya menyatakan ragu-ragu. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa siswa SMA memiliki persepsi negatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP.

Dari dua belas jenis kenakalan remaja yang diteliti, diketahui tingkat masing-masing kenakalan remaja dan jika diurutkan dari yang paling tinggi ke yang rendah, yaitu: pergaulan bebas, *bullying*, keluar malam, pacaran, merokok, bolos sekolah, narkoba, kekerasan, mabuk, tindakan pornografi, melawan guru, dan mencuri.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa siswa laki-laki maupun perempuan memiliki pandangan yang relatif sama terhadap pacaran, melakukan pergaulan bebas sebelum menikah, keluar malam melebihi jam 9 malam, dan menonton film porno.

Selanjutnya terdapat 14% siswa sering di-*bully* teman dan 25% lainnya mengatakan ragu-ragu. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat 13% siswa mengatakan tidak setuju terhadap pelanggaran membully teman, yang artinya setuju dengan praktek *bullying*. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat praktek *bullying* pada siswa.

Sebanyak 5% responden menilai bahwa mengonsumsi narkoba dapat digunakan sebagai

pelarian. Terdapat 15% responden menyatakan bahwa terdapat kecenderungan narkoba bisa diperoleh dengan mudah dan 23% lainnya ragu untuk menjawabnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba di kalangan remaja cukup transparan. Meskipun persentasenya terbilang kecil, namun informasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menangani peredaran narkoba di Kabupaten Bangka Barat.

Selain fakta tersebut, ada satu fenomena yang bertolak belakang dengan hasil kuesioner, yaitu kecilnya informasi siswa terhadap mabuk-mabukkan. Diketahui bahwa sangat jarang siswa berkumpul bersama teman sambil mabuk-mabukkan, namun masih terdapat 4% responden yang melakukannya. Kontrasnya data dengan keadaan di lapangan dimungkinkan karena remaja yang mabuk-mabukkan umumnya adalah remaja yang sudah putus sekolah. Namun tetap diperlukan pantauan dan pembinaan bagi remaja yang mabuk-mabukkan.

#### Pendidikan karakter untuk menekan berbagai bentuk kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat

Hasil penyebaran kuesioner dapat menggambarkan kekuatan pendidikan karakter saat ini, diantaranya, pernyataan siswa terhadap pendidikan karakter bernilai positif. Siswa sudah mengenal pendidikan karakter dan pendidikan karakter sudah diterapkan di sekolah.

Melalui responden terungkap keinginan siswa agar sekolah memiliki aturan tegas dalam menindak kenakalan remaja di sekolah, perlu adanya penetapan jam belajar siswa, perlu adanya pemantauan orang tua dan pembiasaan baik di rumah, perlu adanya pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah, orang tua perlu mengetahui kenakalan anaknya, teman sebaya menjadi sangat berpengaruh dalam tindakan kenakalan remaja, dan organisasi sekolah dan kegiatan remaja perlu ditingkatkan. Persepsi siswa terhadap organisasi sekolah dan kegiatan remaja sudah cukup menarik, namun masih terdapat responden yang meragukan dan menilai sebaliknya. Untuk itu diperlukan inovasi ataupun penguatan terhadap organisasi sekolah dan kegiatan remaja lainnya.

Selain hasil tersebut, diketahui juga bahwa sebenarnya remaja bersikap terbuka terhadap sebuah peraturan. Hal ini terlihat dari 87%

responden yang mendukung dan menginginkan jika sekolah menerapkan sanksi tegas bagi siswa yang bolos sekolah. Ini menandakan bahwa remaja bersikap terbuka terhadap peraturan yang dibuat sekolah. Selain responden bersikap terbuka terhadap peraturan sekolah, responden juga bersikap terbuka terhadap peraturan pemerintah, terlihat dari responden yang mendukung pemerintah dalam melarang penjualan rokok bagi remaja.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan penerapan pendidikan karakter. Terlihat dari terdapat 5% responden yang senang menggunakan kekerasan dan 12% lainnya ragu menggunakan kekerasan. Angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan menggunakan kekerasan dalam membantu teman yang berkelahi. Hasil penelitian juga menunjukkan 23% responden menganggap bahwa membantu teman yang berkelahi adalah bagian dari wujud kesetiakawanan dan 22% lainnya mengatakan ragu-ragu akan hal tersebut. Meskipun bukan nilai tertinggi, namun persepsi setuju dan ragu-ragu terhadap membantu teman yang berkelahi dengan total yang hampir 50% ini mengungkapkan bahwa konformitas geng dengan perkelahian (kenakalan remaja) memiliki hubungan yang sangat kuat.

Hasil tersebut sejalan dengan tiga penelitian dari Prihardani, Asih dkk, dan Purnamasari tentang konformitas geng yang mengungkapkan bahwa pengaruh konformitas teman sebaya berperan penting terhadap tindakan remaja. Jika konformitas membawa pengaruh positif, kenakalan remaja dapat menurun, dan sebaliknya, jika konformitas teman sebaya membawa pengaruh negatif, kenakalan remaja dapat meningkat. Untuk itu perlu menjadi perhatian karena meskipun persepsi siswa terhadap kekerasan tergolong rendah, namun persepsi siswa terhadap membela teman yang berkelahi menunjukkan kesetiakawanan tergolong tinggi. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bazon & Estevão tentang kesetiakawanan.

### 1. Gambaran responden terhadap kenakalan remaja

Ada beberapa hal yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kenakalan remaja yang wajar

dilakukan remaja. Namun kenakalan yang dianggap biasa tersebut jika mengalami degradasi sosial dapat menjadi permasalahan yang serius dan dapat merugikan remaja/orang di lingkungannya. Beberapa penemuan hasil penelitian jika dirangkumkan antara lain:

- Penggunaan narkoba sebagai pelarian rendah, namun terdapat kecenderungan narkoba dapat diperoleh dengan mudah.
- Remaja memiliki kecenderungan terikut teman dalam melakukan tindak kenakalan remaja.
- Pernah terdapat tindak kenakalan remaja yang mengarah ke pergaulan bebas, dan sejalan dengan hasil kuesioner yang mengungkapkan 17% responden setuju pergaulan bebas sebelum menikah.
- Anak-anak yang sering mabuk-mabukkan dimungkinkan kebanyakan bukan dari anak yang masih bersekolah.
- Masih terdapat praktek *bullying*.
- Siswa terbuka terhadap peraturan: menindak segala bentuk kenakalan remaja di sekolah, dan pembatasan penjualan rokok untuk remaja.
- Orang tua dan pihak sekolah umumnya tidak mengetahui tindak kenakalan remaja.
- Tindak kenakalan remaja umumnya terjadi ketika jauh dari pantauan orang tua/orang dewasa di sekitarnya.
- Permasalahan kenakalan remaja lebih banyak di luar sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa jenis kenakalan remaja yang perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai upaya preventif, yaitu untuk 4 jenis kenakalan yang menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil penelitian, yaitu pergaulan bebas, *bullying*, keluar malam, dan pacaran.

#### 1) Pergaulan bebas

Persepsi siswa terhadap pergaulan bebas yang mencapai 17% cukup mengkhawatirkan. Jika diibaratkan dalam satu kabupaten, maka terdapat 113 responden yang menilai

pergaulan bebas dapat dibenarkan. Hal ini patut dikhawatirkan. Selain dari kuesioner, diketahui juga dari surveyor penelitian bahwa terdapat siswa yang meresahkan karena bersikap terlalu bebas dan berani melakukan hal yang mengarah ke pergaulan bebas secara terang-terangan. Pandangan responden terhadap pergaulan bebas tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu upaya yang menyeluruh untuk menekan pergaulan bebas di kalangan remaja. Lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan masyarakat perlu turut memantau pergaulan remaja. Persepsi pergaulan bebas yang peneliti maksud di sini adalah hubungan di luar nikah yang dianggap remaja sebagai hal yang wajar dilakukan untuk zaman sekarang.

#### 2) *Bullying*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktek *bullying* dikalangan siswa menengah di Kabupaten Bangka Barat. Korban *bullying* perlu mengkomunikasikan perasaannya kepada orang di sekitarnya. Pemantauan orang dewasa di sekitar remaja menjadi penting untuk mengatasi *bullying*. Orang tua selaku orang terdekat perlu selalu menanyakan keadaan/hal yang dialami anak. Dengan komunikasi yang terbuka, anak akan lebih mudah menceritakan perasaan dan kejadian yang dialaminya. Untuk itu, diperlukan hubungan komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua dan anak. Selain itu, kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah juga diperlukan dalam pemantauan perkembangan anak.

#### 3) Keluar malam

Keluar malam bagi remaja sudah dianggap biasa saat ini. Bahkan jam keluar malam pun tak selalu dibatasi oleh orang tua. Keluar malam menjadi salah satu pintu bagi remaja untuk melakukan kebebasan, termasuk diantaranya melakukan hal yang kurang bermanfaat atau bahkan dikhawatirkan dapat mengarah ke luar batas.

#### 4) Pacaran

Remaja sudah mulai mengenal hubungan dengan lawan jenis. Tidak jarang juga hubungan tersebut secara terang-terangan disampaikan ke orang tua dan diketahui orang di sekitarnya.

Hubungan tersebut jika tidak mendapatkan pantauan orang dewasa dapat menjadi hubungan yang lebih jauh dan berbahaya bagi akhlak remaja. Jika remaja sudah mulai berani untuk pacaran di tempat sepi, mengindikasikan remaja menghindari pantauan orang dewasa dan bisa saja melakukan hal yang di luar batas.

Dalam penanganan kenakalan remaja terdapat kendala yang dihadapi di lapangan antara lain:

- Tidak ada peraturan yang mengatur penangkapan remaja yang melakukan kenakalan remaja.
- Remaja tidak takut dengan aparat desa/kecamatan.
- Pembinaan terhadap remaja yang terjaring razia kurang mendapat dukungan orang tua.
- Kurangnya inovasi pembinaan terhadap remaja yang terjaring razia.
- Kurangnya antusiasme masyarakat dalam memantau aktivitas remaja yang nongkrong.
- Kurang aktifnya keamanan kampung/desa.
- Terbatasnya jangkauan Satpol PP melakukan pemantauan dan aktivitas remaja se-Kabupaten Bangka Barat.

Sejalan dengan visi dan misi 3 Kabupaten Bangka Barat dalam membangun masyarakat yang maju dan berkualitas, diperlukan gerakan dalam menekan berbagai bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menindaklanjuti misi tersebut dalam bentuk program/kegiatan/gerakan yang dapat menunjang tercapainya cita-cita daerah.

Peneliti menilai perlunya membuat rekayasa sosial pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan tempat tinggal. Rekayasa sosial tersebut dapat menjadi *pilot project* desa berkarakter yang melibatkan berbagai pihak di desa. Aparat keamanan desa dapat dilibatkan untuk memantau aktivitas remaja di lingkungan desa. Perlu juga bekerjasama dengan orang tua dalam memantau aktivitas anak di rumah, serta mengisi kegiatan bagi remaja kampung dengan berbagai kegiatan positif seperti penetapan jam malam dan jam belajar sebagai batasan bagi remaja yang keluar malam. Rekayasa sosial ini dapat diterapkan pada satu atau beberapa

desa terlebih dahulu sebagai *pilot project* desa berkarakter. Di desa tersebut akan ditunjuk beberapa remaja yang akan berperan sebagai **agen pembangunan kapasitas remaja desa**. Agen ini yang nantinya akan berkoordinasi bergerak bersama keamanan desa dalam memantau aktivitas remaja di masyarakat, bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memantau aktivitas remaja desanya di sekolah, dan bekerjasama dengan orang tua dalam memantau aktivitas anak di rumah.

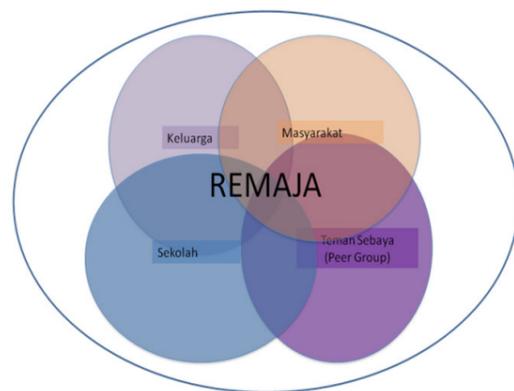
## 2. Habituisasi pendidikan karakter pada empat lingkungan

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030, penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70%, sedangkan sisanya, 30%, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Untuk itu pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu hadir untuk remaja dan menyelamatkan masa remaja dengan upaya pencegahan dan penanganan dari kenakalan remaja. Remaja adalah generasi emas daerah. Untuk membangun daerah dibutuhkan waktu yang cukup dan peningkatan karakter sejak dini. Diperlukan penanaman karakter dan kompetensi yang unggul dalam menghadapi bonus demografi 2030.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menilai diperlukan intervensi orang dewasa di sekitar remaja dan pembentukan kebiasaan/habituisasi dalam menanamkan pendidikan karakter kepada remaja. Remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang memiliki kepribadian labil dan sedang mencari jati diri untuk membentuk karakter permanen. Pendidikan karakter sebagai upaya dalam mengembangkan sikap etika moral dan tanggung jawab remaja dalam kehidupan sosial dapat menjadi pencegah timbulnya kenakalan remaja. Pendidikan karakter dalam diri remaja dapat menjadi penyaring informasi-informasi yang tidak sesuai bagi remaja. Komunikasi yang baik dan tauladan orang dewasa di sekitar remaja dapat menjadi pegangan bagi remaja ketika menghadapi permasalahan. Remaja akan mudah terbuka dengan orang dewasa di sekitarnya jika remaja memiliki kepercayaan terhadap orang di sekitarnya.

Peneliti sependapat dengan hasil penelitian Bridges yang menyebutkan bahwa penyebab kenakalan remaja merupakan kombinasi faktor, dan tidak ada dua kombinasi yang sama dalam setiap remaja. Namun peneliti menganalisis bahwa terdapat empat lingkungan psikososial yang diperlukan penguatan karakter remaja, yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Analisis ini sedikit berbeda dengan pendapat Iqbal yang menyebutkan bahwa penyebab kenakalan remaja disebabkan tiga faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Adapun intervensi dan habituisasi tersebut sebagai upaya preventif melalui pembinaan sikap dan upaya kuratif melalui kegiatan positif. Secara diagramatik, koherensi keempat lingkungan pencegahan kenakalan remaja tersebut peneliti gambarkan dalam diagram ven berikut.



Gambar 3. Koherensi Empat Lingkungan Psikososial Pencegahan Kenakalan Remaja

Keempat lingkungan psikososial tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur remaja. Pada prinsipnya intervensi orang dewasa dan habituisasi yang diciptakan pada empat lingkungan siswa tersebut dilakukan dalam rangka mencegah remaja menggunakan waktu luangnya untuk hal yang menyimpang.

Berikut peneliti jelaskan dalam penjabaran sebagai berikut.

### 1) Lingkungan keluarga

Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi lapangan, penekanan penerapan pendidikan

karakter pada lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian pada pemantauan orang tua dan pembiasaan baik di rumah. Orang tua memiliki kesibukan masing-masing sehingga anak kurang mendapat perhatian. Orang tua menganggap anak sudah bisa mandiri dan mampu menentukan baik dan buruk sehingga orang tua cenderung melepas/memberi kebebasan kepada anak. Pembiasaan yang dicontohkan orang tua di rumah juga tergolong masih minim sehingga mayoritas responden menilai pemantauan orang tua dan pembiasaan baik di rumah masih kurang.

Orang tua tidak mengetahui kenakalan anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua kurang memiliki kedekatan dengan anak. Hendaknya orang tua dapat lebih memiliki kedekatan dengan anak agar anak dapat lebih terbuka dan orang tua dapat mengarahkan anak untuk tidak melakukan bentuk-bentuk kenakalan remaja.

Lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah lingkungan keluarga; orang tua, saudara, ataupun kerabat yang tinggal serumah. Pada lingkungan ini remaja mengalami proses sosialisasi awal. Perhatian keluarga bagi remaja menjadi dasar pola pergaulan hidup sehingga remaja mengenal nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, menghargai, komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Pembiasaan untuk sholat berjama'ah, mengaji, dan menerima curahan hati anak dapat dijadikan solusi mendekatkan hubungan keluarga.

### 2) Lingkungan teman sebaya

Penguatan lingkungan teman sebaya sebagai pelaksanaan pendidikan karakter setidaknya dapat meningkatkan nilai religius, jujur, toleran, disiplin, demokratis, menghargai, komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial. Teman sebaya peneliti artikan sebagai seseorang yang memiliki kesamaan usia, jenjang pendidikan, pola pikir, dan lingkungan baik di rumah maupun sekolah. Kelompok teman sebaya akan terbentuk dengan sendirinya ketika anak-anak merasa memiliki kecocokan dan seringnya frekuensi bertemu. Kelompok teman sebaya juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter remaja. Teman sebaya sebagai agen pembentukan karakter anak adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.

### 3) Lingkungan sekolah

Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi lapangan, penekanan penerapan pendidikan karakter pada lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan memiliki aturan tegas dalam menindak kenakalan remaja. Responden terbuka jika sekolah memiliki aturan tegas dalam menindak kenakan remaja. Setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir tindak kenakalan remaja yang marak dilakukan. Pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah pun masih harus dikembangkan agar anak dapat merasa sukarela dalam melakukan pembiasaan baik di sekolah.

Menciptakan kultur sekolah yang humanis, penguatan peran guru Bimbingan Konseling, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memantau dan memberikan pembinaan terhadap siswa diperlukan dalam penguatan karakter remaja. Kepala sekolah hendaknya dapat menjadi mediator dan fasilitator antara guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam membangun dan menciptakan kultur lingkungan sekolah yang humanis dan berperan sebagai tauladan bagi siswa.

Bagi guru Bimbingan Konseling, konselor hendaknya mendapat kepercayaan siswa agar siswa dapat terbuka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga peran konselor sebagai penunjuk jalan, pembangkit kekuatan dan pembina tingkah laku positif siswa dapat lebih maksimal. Penguatan lingkungan sekolah setidaknya dapat meningkatkan nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

### 4) Lingkungan masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi lapangan, penekanan penerapan pendidikan karakter pada lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian pada penetapan jam belajar siswa. Responden terbuka jika diberlakukan jam belajar di masyarakat, responden pun sependapat jika jam belajar dapat mengurangi intensitas remaja keluar malam. Hal ini dapat menjadi solusi bagi maraknya remaja yang nongkrong/mabuk/ngebut-ngebutan dan pacaran di malam hari.

Lingkungan masyarakat termasuk pada lingkungan terluar bagi remaja. Namun

lingkungan ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif tergantung ajakan yang ada di lingkungan tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh Bripta Guntur Hidayat, S.Ip selaku Bhabin kamtibmas Kelurahan Kelapa yang telah melakukan “shaber ngaber”, yaitu sholat berjama’ah, ngaji bersama bagi remaja yang terjerat razia karena kenakalan remaja. Dalam pembinaan kenakalan remaja di Kelurahan Kelapa dilakukan dalam tujuh hari dengan melakukan sholat berjama’ah dan mengaji. Namun pembinaan anak-anak yang melakukan tindak kenakalan remaja di Kelurahan Kelapa terkendala belum adanya rumah binaan bagi anak-anak yang terjerat razia kenakalan remaja. Untuk itu, diharapkan bantuan pembentukan rumah binaan kepada anak-anak kenakalan remaja di Kelurahan Kelapa.

Penanganan kenakalan remaja di kecamatan lain belum sebaik pembinaan yang dilakukan di Kelurahan Kelapa. Di kecamatan lain jika menemukan bentuk-bentuk kenakalan remaja yang belum mengarah ke kriminal ditangani dengan nasehat dan mediasi serta mengundang orang tua remaja sebagai bentuk komunikasi mengembalikan remaja kepada pemantauan orang tuanya. Untuk itu juga diperlukan pembinaan yang lebih merata di Kabupaten Bangka Barat.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah remaja tidak takut dengan aparat desa/kecamatan. Hal ini terlihat dari remaja berani nongkrong yang meresahkan masyarakat di sekitar kantor desa/kantor kecamatan. Bahkan terdapat tindak kenakalan remaja mabuk-mabukkan yang melempar kaca kantor kecamatan hingga pecah. Namun tidak bisa dipastikan pelaku tersebut apakah pelajar atau remaja yang sudah tidak sekolah. Untuk itu diperlukan penguatan lingkungan masyarakat yang setidaknya dapat meningkatkan nilai-nilai karakter remaja, yaitu nilai religius, toleran, bekerja keras, demokratis, menghargai, komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial. Secara tidak langsung, penerapan pendidikan karakter pada keempat lingkungan psikososial tersebut dapat meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikhawatirkan terabaikan dikarenakan tindak kenakalan remaja.

## SIMPULAN

Remaja Bangka Barat masih berpotensi melakukan berbagai bentuk tindak kenakalan remaja. Sebanyak 10% responden menyatakan kenakalan remaja wajar dilakukan. Urutan kenakalan remaja yang mendapat penilaian negatif dari yang paling tinggi ke yang rendah, yaitu pergaulan bebas (17%), *bullying* (13%), keluar malam (11%), pacaran (10%), merokok (9%), bolos sekolah (7%), narkoba (5%), kekerasan (5%), mabuk (4%), tindakan pornografi (3%), melawan guru (3%), dan mencuri (2%). Siswa memiliki peluang untuk terlibat dalam kenakalan remaja dikarenakan beberapa faktor, yaitu rasa solidaritas teman sebaya, lingkungan yang negatif, serta kurangnya pantauan dan pengendalian dari orang dewasa di sekitarnya. Untuk menekan berbagai bentuk kenakalan remaja diperlukan penerapan pendidikan karakter yang lebih fokus pada intervensi orang dewasa di sekitar remaja dan pembentukan habituasi remaja. Intervensi dan habituasi tersebut peneliti rumuskan dalam empat lingkungan psikososial siswa, yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat.

## REKOMENDASI

Menyikapi hasil penelitian yang ditemukan, peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai alternatif kebijakan dalam upaya menekan tindak kenakalan remaja. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bangka Barat selaku pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengakomodir dan mengupayakan perangkat daerah terkait dengan:

1. Membuat *pilot project* desa berkarakter melalui rekayasa sosial.
2. Bekerja sama dengan berbagai elemen pada empat lingkungan psikososial untuk menggerakkan keamanan desa dalam memantau aktivitas remaja di masyarakat; bekerjasama dengan pihak sekolah dalam memantau aktivitas remaja di sekolah; bekerjasama dengan orang tua dalam memantau aktivitas anak di rumah dan memantau teman sepergaulan anak.

Dalam pelaksanaan rekomendasi kebijakan tersebut, diperlukan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang. Untuk itu, kepala

daerah perlu menunjuk perangkat daerah tertentu yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan kenakalan remaja di Kabupaten Bangka Barat dapat ditekan.

## PUSTAKA ACUAN

- Adisusilo, S. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asih, Martha Kurnia, Rachmad Djati Winarno, dan Lita Widyo Hastuti. 2012. “Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja Pada Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.” *PREDIKSI* 1 (2): 189. <http://journal.unika.ac.id/index.php/pre/article/view/270>.
- Bazon, Marina Rezende, and Ruth Estevão. 2012. “Juvenile Criminal Behavior and Peers’ Influences: A Comparative Study in the Brazilian Context.” *Universitas Psychologica* 11 (4): 1157–66. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1657-92672012000400011](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672012000400011).
- Bridges, K. M. Banham. 1927. “Factors Contributing to Juvenile Delinquency.” *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology* 17 (4): 531. <https://doi.org/10.2307/1134348>.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A (2012). Populasi dan Sampel: Pengertian Populasi Adalah? <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html>
- Iqbal, Muh. 2014. “Penanggulangan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus SMA Negeri 1 Pomalaa Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara).” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 17 (2): 229–42. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a6>.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartono, Kartini. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kemdikbud. 2018. “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.” [https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud\\_Tahun2018\\_Nomor20.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor20.pdf).

Kesuma, Dharma. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

“Perda RPJM 2016-2021.” 2016.

Prihardani, I. 2012. “Hubungan Antara Konformitas Geng dengan Kenakalan Remaja.” <http://eprints.ums.ac.id/20365>.

Purnamasari, Lesti. 2018. “Akar Sebab Siklus Penyimpangan Pada Remaja: Penelitian Tentang Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/13773>.

Saptono. 2011. *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi Dan Langkah Praktis*. Jakarta: Esensi.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. 2017. “Kenakalan Remaja Dan Penanganannya.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>.

Suryadin, Asyraf. 2013. *Lingkungan dan Folklor Masyarakat Bangka Belitung, Folklor dan Folklife dalam Kehidupan Dunia Modern: Kesatuan dan Keberagaman*. Edited Suwardi Endraswara dkk. Yogyakarta: Ombak.

Syamsu, Yusuf LN, dan Nani M Sugandhi. 2013. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rajawali Pers.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” 2003. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**ABSTRACT**

*The application of curriculum in accordance with the 21st century core competencies has been carried out in Indonesia. However, the results of PISA in 2018 actually declined. Therefore, an evaluation to the learning activities carried out by the teacher was needed. The purpose of this study was to evaluate the teaching activities in the learning process starting from the introduction, the core, until the closing. The research method used was an evaluation study with a qualitative approach. This study used secondary data from the official website of the organizer of PISA. The total number of respondents was 12,098 students. The evaluation results of this study showed that (i) the implementation of the preliminary activities in the learning process carried out by the teacher was considered very good, especially in lesson repeating and conveying the learning objectives, (ii) the implementation of core activities in the learning process especially in the activities of teachers conducting scientific learning was considered sufficient, and (iii) implementation of closing activities in the learning process especially in the framework of teachers encouraging the development of students' metacognition was also considered sufficient.*

**Key words:** *Learning Activities, Scientific Approach, Metacognition.*

**ABSTRAK**

Penerapan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi abad 21 telah dilakukan di Indonesia. Namun, hasil *Program for International Students Assessment* (PISA) tahun 2018 malah mengalami penurunan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kegiatan mengajar guru dalam proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, sampai penutup. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data berasal dari website resmi penyelenggara PISA. Data yang digunakan adalah hasil kuesioner yang dijawab oleh siswa Indonesia pada pelaksanaan PISA tahun 2018. Total jumlah responden sebanyak 12.098 siswa. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (i) pelaksanaan kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada umumnya dinilai sangat baik, khususnya ketika guru mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran, (ii) pelaksanaan kegiatan inti pada proses pembelajaran khususnya pada kegiatan guru melakukan pembelajaran saintifik dinilai cukup, dan (iii) pelaksanaan kegiatan penutup pada proses pembelajaran khususnya ketika guru mendorong pengembangan metakognisi siswa dinilai cukup.

**Kata kunci:** Kegiatan Pembelajaran, Pendekatan Saintifik, Metakognisi.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 dikenal dengan istilah 4C yaitu, *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan pandai memecahkan masalah), *communication* (komunikasi), *creativity and innovation* (kreatifitas dan inovasi), dan *collaboration* (kolaborasi). Sedangkan menurut Jaedun dkk (2014), Kurikulum 2013 dirancang untuk mempersiapkan orang Indonesia sebagai warga negara yang memiliki keyakinan, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada masyarakat, bangsa, negara, dan peradaban dunia.

Pada kenyataannya, perubahan kurikulum tidak serta merta meningkatkan kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Hal ini dapat dilihat dari capaian hasil PISA (*Program for international students assessment*) siswa Indonesia di tahun 2018 yang mengalami penurunan pada ketiga kompetensi yang diujikan, jika dibandingkan dengan hasil PISA tahun 2015. Skor kompetensi membaca menurun dari 397 menjadi 371, skor matematika menurun dari 386 menjadi 379, dan skor sains menurun dari 403 menjadi 396 (OECD, 2019).

Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya capaian kompetensi siswa Indonesia adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum optimal. Dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran, banyak guru yang tidak membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sendiri. Kebanyakan guru berpikir pragmatis, salah satunya dengan hanya mengikuti RPP yang sudah ada, baik dari penerbit buku maupun dari internet. Sehingga banyak kekeliruan yang terjadi dalam pembuatan rencana pembelajaran tersebut (Suraji dkk, 2013). Hal ini mengakibatkan produk RPP yang telah dibuat dan dikembangkan oleh guru memiliki tingkat implementasi yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin dkk (2020) menunjukkan bahwa produk RPP, diantaranya perumusan indikator (tujuan) dan pencapaian kompetensi telah terjalar dengan baik, namun upaya pencapaiannya masih rendah. Selain itu, model pembelajaran dan pendekatan saintifik belum dijabarkan secara rinci baik dalam RPP maupun dalam

implementasi pembelajarannya.

RPP merupakan produk penting dari kegiatan pembelajaran dimana guru memiliki wewenang untuk merumuskan proses pembelajaran dalam pernyataan yang telah dibuatnya (Latifa, 2017). Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif diperlukan persiapan dalam bentuk RPP yang disusun oleh guru itu sendiri, sehingga diharapkan dalam implementasi kegiatan pembelajaran dapat tercapai sesuai rencana yang dibuat. Panduan penyusunan RPP tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

Penelitian berjudul "Evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan hasil PISA 2018" ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan mengajar guru dalam proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, sampai pada penutup sehingga dapat dilihat tingkat implementasi RPP oleh guru. Evaluasi pada kegiatan pendahuluan difokuskan pada kegiatan guru dalam penyampaian pelajaran sebelumnya dan dalam menyampaikan tujuan materi pelajaran yang akan diajarkan. Evaluasi pada kegiatan inti difokuskan pada kegiatan guru dalam melakukan pembelajaran saintifik. Hal ini karena Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dengan aktivitas mengamati, menanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (Sulastri, 2018). Selain itu, penggunaan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Novianto dkk, 2019).

Evaluasi pada kegiatan penutup difokuskan pada kegiatan guru dalam mendorong pengembangan metakognisi siswa. Pengembangan metakognisi penting dilakukan, karena metakognisi merupakan kunci dalam pencapaian pemahaman suatu materi pelajaran (Zuhaida, 2017). Metakognisi adalah kesadaran peserta didik terhadap kemampuan yang dimilikinya serta kemampuan untuk memahami, mengontrol, dan memanipulasi proses-proses kognitif yang mereka miliki (Downing, 2010).

Hasil penelitian evaluasi ini dapat bermanfaat untuk masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, pengawas, kepala sekolah, dan

guru dalam memperbaiki implementasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran.

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis penelitian. Menurut Wirawan (2016), evaluasi adalah penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilai dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Jenis evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi proses, yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani (Wirawan, 2016). Dalam hal ini, objek yang akan dievaluasi adalah proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Evaluasi proses dijalankan dengan melakukan penilaian terhadap sebuah informasi yang diperoleh, dengan melihat apakah layanan program telah dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Informasi tersebut kemudian dianalisis dan dapat disajikan dengan data yang bersifat kualitatif.

### Proses Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berikut ini akan dijabarkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang wajib dilakukan oleh guru sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib (a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, (b) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik, (c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, (d) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan (e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran dengan berpusat pada siswa. Kegiatan inti dalam proses pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (a) Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. (b) Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. (c) Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi (a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, (b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, (c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan (d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya (Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar).

Dari Permendikbud di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas kegiatan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup yang wajib dilakukan oleh guru.

### Penilaian PISA

*Program for international students assessment* (PISA) merupakan Program yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. PISA bertujuan untuk menilai sejauh mana

siswa berusia 15 tahun telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dapat beradaptasi dalam masyarakat modern. PISA tidak hanya menilai apakah siswa dapat mengetahui suatu pengetahuan, tetapi juga apakah mereka dapat memperkirakan dari apa yang telah mereka pelajari dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi baru dan kehidupan nyata. Soal PISA menekankan penguasaan proses, pemahaman konsep, dan kemampuan untuk berfungsi dalam berbagai jenis situasi. Pendekatan ini mencerminkan fakta bahwa ekonomi modern menghargai individu bukan karena apa yang mereka ketahui, tetapi untuk apa mereka lakukan dengan yang mereka ketahui. Penilaian dikembangkan secara kooperatif, disepakati oleh negara yang berpartisipasi, dan dilaksanakan oleh organisasi nasional. Penilaian PISA dilakukan setiap tiga tahun yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1997. Materi yang diujikan berfokus pada mata pelajaran inti disekolah yakni membaca, matematika dan sains (OECD, 2019)

Berdasarkan hal tersebut, penilaian PISA sangat diperlukan oleh setiap negara. Hal ini karena penilaian PISA dapat dijadikan *benchmark* untuk mengetahui kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dibandingkan dari berbagai negara di dunia.

#### Hasil Penelitian Sejenis

Penelitian sejenis terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti. Amin, Sukestiyarno dkk (2020) telah melakukan penelitian terkait dengan kualitas RPP dan implementasinya. Hasilnya penelitiannya menunjukkan bahwa produk RPP yang telah dibuat dan dikembangkan oleh guru memiliki tingkat implementasi yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indriani (2017) yang terkait kualitas rencana RPP. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mayoritas RPP hanya mengadopsi dan mengunduh dari internet tanpa mencermati kesesuaiannya dengan kondisi kelas masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat implementasi dari RPP tersebut. Untuk mengubah paradigma tersebut Holmes & Holmes (2011) dalam penelitiannya terkait *Hierarchy for Effective Lesson Planning* menuntut guru mampu membuat perencanaan pengajaran sendiri

dalam berbagai tingkat kemampuan.

Dari hasil penelitian sejenis di atas menyebutkan mayoritas RPP hanya mengadopsi dan mengunduh dari internet, sehingga RPP yang dikembangkan oleh guru memiliki tingkat implementasi yang rendah. Untuk itu, guru harus mampu membuat perencanaan pengajaran sendiri sehingga tingkat implementasinya akan tinggi.

#### Kerangka Berpikir

Penerapan Kurikulum yang sesuai dengan Kompetensi abad 21 telah dilakukan. Namun, Hasil PISA tahun 2018 malah mengalami penurunan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, sampai pada kegiatan penutup.

Dalam penelitian evaluasi ini, kegiatan pendahuluan dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran oleh guru dalam menyampaikan materi sebelumnya dan tujuan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran oleh guru dalam mendukung pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kegiatan penutup dibatasi pada kegiatan guru dalam meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Jenis evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi proses. Evaluasi proses bertujuan untuk meneliti dan menilai apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah dilaksanakan seperti yang telah direncanakan dan sesuai dengan aturan terkait. Evaluasi dilakukan dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup.

Evaluasi kegiatan pendahuluan untuk mengetahui kegiatan guru dalam menyampaikan materi yang telah diajarkan dan tujuan dari materi yang akan dipelajari, indikatornya adalah seberapa sering (i) guru bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya, (ii) guru menyajikan ringkasan singkat dari pelajaran sebelumnya, (iii) guru menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran, (iv) guru memberi tahu siswa apa

yang harus siswa pelajari.

Variabel evaluasi kegiatan inti pada pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kegiatan guru dalam mendukung pendekatan saintifik, indikatornya seberapa sering (i) guru mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks, (ii) guru membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan, (iii) guru menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi dalam teks dibangun (membantu menyimpulkan sebuah teks), (iv) guru mengajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif.

Evaluasi kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kegiatan guru dalam meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa, indikatornya seberapa sering (i) guru memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi, (ii) guru memberi tahu siswa bagian yang masih perlu ditingkatkan, (iii) guru memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi OECD (2020). Data yang diambil adalah hasil kuesioner yang diisi oleh siswa Indonesia pada pelaksanaan penilaian PISA tahun 2018. Cara mendapatkan datanya yakni dengan mengunjungi website <https://www.oecd.org/pisa/>, kemudian membuka data dan mengunduh hasil kuesioner siswa dalam bentuk SPSS. Total responden data tersebut sebanyak 12.098 siswa. Namun, jawaban setiap item pertanyaan pada kuesioner tidak sebanyak total responden dan berbeda-beda pula antar item pertanyaan. Hal ini dikarenakan terdapat responden yang tidak menjawab atau mengisi pertanyaan pada item tertentu.

Teknis analisis data evaluasi proses dilakukan dalam dua tahapan penilaian. Tahap pertama adalah pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan dengan interpretasi penilaian seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Interpretasi penilaian terhadap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru

Interval Rerata Skor	Interpretasi Penilaian	Perkiraan Pelaksanaan
1,00 – 1,60	Sangat Kurang	00% - 20%
1,61 – 2,20	Kurang	21% - 40%
2,21 – 2,80	Cukup	41% - 60%
2,81 – 3,40	Baik	61% - 80%
3,41 – 4,00	Sangat Baik	81% - 100%

Rerata skor pada tabel 1 diperoleh dari total skor seluruh responden dibagi dengan jumlah responden. Setelah rerata skor didapat, kemudian menentukan kelompok pada kolom interval rerata skor, interpretasi penilaian, dan terakhir perkiraan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tahap kedua adalah perbandingan yang telah diperoleh dari penilaian pada tahap 1, kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut (Wirawan, 2016).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan akan dijabarkan berdasarkan variabel dari tujuan penelitian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada tingkat pendidikan menengah.

##### Kegiatan Pendahuluan

Evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada tahap kegiatan pendahuluan adalah untuk mengetahui apakah guru (i) bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya, (ii) menyajikan ringkasan singkat dari pelajaran sebelumnya, (iii) menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran, (iv) memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari. Berikut ini akan dijabarkan hasil evaluasi tentang kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru.

Tabel 2. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "How often during: The teacher asks questions to check whether we have understood what was taught".

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Every lesson	7719	4	30876
Most lessons	2742	3	8226
Some lessons	1230	2	2460
Never or hardly ever	168	1	168
Total	11859		41730
Mean Skor	3.52		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa jawaban siswa yang mengatakan pada setiap pembelajaran "guru bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya" paling banyak yakni sebesar 7.719 atau sekitar 65%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 3,52. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendahuluan terkait dengan "guru bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya" mempunyai penilaian "Sangat Baik". Adapun perkiraan pelaksanaan dalam proses pembelajaran sekitar 81% – 100%.

Penilaian "Sangat baik" pada kegiatan "guru bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya" sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang salah satu isinya mewajibkan Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Tujuan utama guru memeriksa pemahaman siswa yakni untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, dalam mengaitkan kegiatan pembelajaran tersebut, guru dituntut memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan penerapan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah guru memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya, guru seyogyanya menyajikan ringkasan singkat dari apa yang telah didiskusikan. Tabel 3 menunjukkan bahwa jawaban siswa yang mengatakan pada setiap pembelajaran "guru menyajikan ringkasan

singkat dari pelajaran sebelumnya" paling banyak yakni 5.183 responden atau sekitar 44%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendahuluan terkait dengan "guru menyajikan ringkasan singkat dari pelajaran sebelumnya" mempunyai penilaian "Baik".

Tabel 3. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "How often during: the teacher presents a short summary of the previous lesson".

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Every lesson	5183	4	20732
Most lessons	3038	3	9114
Some lessons	2984	2	5968
Never or hardly ever	630	1	630
Total	11835		36444
Mean Skor	3.08		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Penilaian "Baik" pada kegiatan "guru menyajikan ringkasan singkat dari pelajaran sebelumnya" dinilai masih belum optimal, mengingat baru sekitar 61% - 80% guru yang melakukan hal tersebut. Padahal guru yang menanyakan kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya mempunyai nilai yang sangat baik. Hal ini dikarenakan guru sering lupa dalam menyimpulkan setelah bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya. Umumnya, setelah guru memeriksa pemahaman siswa tentang materi sebelumnya, guru lalu mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan, tanpa menyimpulkan terlebih dahulu.

Tabel 4. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "How often during: The teacher sets clear goals for our learning".

Responses	N (Freq)	Skor	NxSkor
Every lesson	7010	4	28040
Most lessons	2861	3	8583
Some lessons	1750	2	3500

Responses	N (Freq)	Skor	NxSkor
Never or hardly ever	265	1	265
Total	11886		40388
Mean Skor	3.40		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 4 menunjukkan bahwa jawaban siswa yang mengatakan setiap pembelajaran "guru menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran" paling banyak yakni 7.010 responden atau sekitar 59%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 3,40. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendahuluan terkait dengan "guru menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran" mempunyai penilaian "Baik".

Penilaian "Baik" pada kegiatan "guru menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran" dinilai masih belum optimal, mengingat baru sekitar 61% - 80% guru yang melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan guru sering kali memberikan tujuan implisit (kurang jelas) atau langsung ke materi yang akan dipelajari. Padahal dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses guru diwajibkan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran adalah tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran dan dapat dinyatakan dengan deskripsi yang spesifik/jelas (Yustitia, 2017). Dengan tujuan yang jelas akan membantu ketercapain dari kegiatan pembelajaran tersebut.

Tabel 5. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pernyataan "How often during: The teacher tells us what we have to learn".

Responses	N (Freq)	Skor	NxSkor
Every lesson	7825	4	31300
Most lessons	2538	3	7614
Some lessons	1224	2	2448
Never or hardly ever	239	1	239
Total	11826		41601
Mean Skor	3.52		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Berbeda dengan item "guru menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas" yang dinilai baik. Siswa yang mengatakan setiap pembelajaran "guru memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari" penilaiannya "sangat baik". Tabel 5 menunjukkan bahwa siswa yang menjawab di setiap pembelajaran "guru memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari" yakni 7.825 responden atau sekitar 66%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 3,52.

Penilaian "sangat baik" pada kegiatan "guru memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari" sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang salah satu isinya mewajibkan guru memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari. Adapun perkiraan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran sekitar 81% – 100%. Penilaian sangat baik guru dalam memberi tahu siswa dengan apa yang harus dipelajari sudah terbiasa dilakukan oleh guru. Biasanya pada kegiatan pendahuluan guru memberikan materi yang akan dipelajari. Namun, terkadang lupa memberi tahu ke siswa tujuan pembelajaran secara spesifik.

#### Kegiatan Inti

Evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada tahap kegiatan inti adalah untuk mengetahui kegiatan guru dalam mendukung pembelajaran dengan pendekatan saintifik, indikatornya seberapa sering guru (i) mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks, (ii) membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan, (iii) menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi dalam teks dibangun (guru membantu menyimpulkan sebuah teks), (iv) mengajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Berikut ini akan dijabarkan hasil evaluasi tentang kegiatan inti yang dilakukan oleh guru.

Tabel 6. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "In your (language lessons), how often: The teacher encourages students to express their opinion about a text."

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or hardly ever	598	1	598
In some lessons	5309	2	10618
in most lessons	3128	3	9384
in all lesson	2852	4	11408
Total	11887		32008
Mean Skor	2.69		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuisioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 6 menunjukkan bahwa jawaban siswa yang mengatakan dalam beberapa pembelajaran "guru mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks" paling banyak yakni 5.309 responden atau sekitar 45%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,69. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan inti terkait dengan "guru mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks" mempunyai penilaian "Cukup".

Perkiraan pelaksanaan guru mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks sekitar 41% – 60%. Kecilnya pelibatan guru dalam mendorong siswa untuk aktif mengekspresikan pendapatnya karena sebagian guru masih mempunyai pandangan tradisional tentang belajar mengajar dengan paradigma hanya guru yang aktif (Parjono, 2000).

Tabel 7. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "In your (language lessons), how often: The teacher helps students relate the stories they read to their lives."

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or hardly ever	880	1	880
In some lessons	5371	2	10742

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
in most lessons	3354	3	10062
in all lesson	2243	4	8972
Total	11848		30656
Mean Skor	2.59		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuisioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 7 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di beberapa pembelajaran "guru membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan" yakni 5.371 responden atau sekitar 45%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,59. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terkait dengan "guru membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan" mempunyai penilaian "Cukup".

Adapun perkiraan pelaksanaan guru membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan sekitar 41% – 60%. jumlah ini merupakan angka yang memprihatinkan karena sekitar setengah dari guru tidak melakukan. Kendala yang terjadi dalam mengaitkan materi dalam kehidupan sekitar (kontekstual) adalah keterbatasan waktu, karakter guru, karakter siswa dan referensi yang terbatas (Ananta, 2020)

Tabel 8. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "In your (language lessons), how often: The teacher shows students how the information in texts builds on."

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or hardly ever	619	1	619
In some lessons	5203	2	10406
in most lessons	3457	3	10371
in all lesson	2529	4	10116
Total	11808		31512
Mean Skor	2.67		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuisioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 8 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di beberapa pembelajaran "guru menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi dalam teks dibangun (guru membantu menyimpulkan sebuah teks)" yakni 5.203 responden atau sekitar 44%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,67. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan inti pembelajaran terkait dengan "guru menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi dalam teks dibangun (guru membantu menyimpulkan sebuah teks) penilaiannya "Cukup". Adapun perkiraan pelaksanaan guru guru membantu menyimpulkan sebuah teks sekitar 41% – 60%.

Tabel 9. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "In your (language lessons), how often: The teacher poses questions that motivate students to participate actively."

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or hardly ever	424	1	424
In some lessons	3831	2	7662
in most lessons	3347	3	10041
in all lesson	4220	4	16880
Total	11822		35007
Mean Skor	2.96		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuisioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 9 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di setiap pembelajaran "Guru mengajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif" yakni 4.220 responden atau sekitar 36%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,96. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan inti pembelajaran terkait dengan "Guru mengajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif penilaiannya "Baik". Adapun perkiraan pelaksanaan guru guru membantu menyimpulkan sebuah teks sekitar 61% – 80%.

Kegiatan bertanya guru kepada siswa dalam proses pembelajaran sudah terbiasa dilakukan oleh guru, khususnya setelah guru menyampaikan materi atau menyimpulkan materi pelajaran. Namun terdapat kendala

yang dihadapi oleh guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa, diantaranya guru belum optimal menguasai keterampilan bertanya, siswa yang belum serius mengikuti pelajaran, dan keterbatasan waktu (Taufik dkk, 2013). Selain itu, guru juga harus mampu melakukan pertanyaan melalui pendekatan persuasif sehingga siswa tidak merasa malu dan takut ketika guru menanyakan sesuatu dan siswa juga dapat berperan aktif dalam kegiatan diskusi.

### Kegiatan Penutup

Evaluasi kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kegiatan guru dalam meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa, indikatornya seberapa sering guru (i) memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi, (ii) memberi tahu siswa bagian yang masih perlu ditingkatkan, (iii) memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi.

Tabel 10. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan "How often during (language lessons): The teacher gives me feedback on my strengths in this subject."

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or almost never	1840	1	1840
Some lessons many lessons	6082	2	12164
every lesson or almost every lesson	2181	3	6543
	1786	4	7144
Total	11889		27691
Mean Skor	2.33		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuisioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 10 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di beberapa pembelajaran "guru memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi" yakni 6.082 responden atau sekitar 51%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan

penutupan pembelajaran terkait dengan “guru memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi penilaiannya “Cukup”. Adapun perkiraan pelaksanaan guru memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi sekitar 41% – 60%.

Tabel 11. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan “How often during (language lessons): The teacher tells me in which areas I can still improve.”

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or almost never	999	1	999
Some lessons	5051	2	10102
many lessons	3198	3	9594
every lesson or almost every lesson	2633	4	10532
Total	11881		31227
Mean Skor	2.63		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 11 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di beberapa pembelajaran “guru memberi tahu siswa bagian yang masih perlu ditingkatkan” yakni 5.051 responden atau sekitar 42%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,63. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penutupan pembelajaran terkait dengan guru memberi tahu siswa bagian yang masih perlu ditingkatkan penilaiannya “Cukup”. Adapun perkiraan pelaksanaan guru memberi tahu siswa bagian materi yang masih perlu ditingkatkan sekitar 41% – 60%.

Tabel 12. Jawaban siswa atas kuesioner dengan pertanyaan “How often during (language lessons): The teacher tells me how I can improve my performance.”

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
Never or almost never	748	1	748
Some lessons	4732	2	9464

Responses	N (Freq)	Skor	Nx-Skor
many lessons	3288	3	9864
every lesson or almost every lesson	3087	4	12348
Total	11855		32424
Mean Skor	2.74		

Sumber: data diolah dari Hasil Kuosioner Siswa (OECD: 2020)

Tabel 12 menunjukkan bahwa jawaban siswa paling banyak yang mengatakan di beberapa pembelajaran “guru memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi” yakni 4.732 responden atau sekitar 42%. Sedangkan rata-rata skor sebesar 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penutupan pembelajaran terkait dengan guru memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi penilaiannya “Cukup”. Adapun perkiraan pelaksanaan guru memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi sekitar 41% – 60%.

Kegiatan guru dalam meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa pada ketiga indikator tersebut penilaiannya cukup. Artinya hanya sekitar setengah jumlah guru yang membantu meningkatkan kemampuan metakognisi siswa. Padahal kemampuan metakognisi siswa dapat membantu dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan menyelesaikan soal PISA. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2020) bahwa siswa dengan metakognisi sangat baik dan baik dapat menyelesaikan masalah soal model PISA dengan tingkat sedang, sedangkan siswa dengan metakognisi tidak baik dalam menyelesaikan soal PISA tergolong rendah.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Hasil evaluasi terhadap guru dalam kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Pelaksanaan guru bertanya kepada siswa untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya, penilaiannya sangat baik yakni sekitar 81% - 100% guru. Pelaksanaan guru menyajikan ringkasan singkat dari pelajaran sebelumnya, penilaiannya baik yakni sekitar 61% - 80%.

Pelaksanaan guru menetapkan tujuan yang jelas pada setiap pembelajaran, penilaiannya baik yakni sekitar 61% - 80%. Sedangkan pelaksanaan guru memberi tahu siswa apa yang harus siswa pelajari, penilaiannya sangat baik yakni sekitar 81% - 100%.

Hasil evaluasi terhadap guru dalam kegiatan inti pada proses pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Pelaksanaan guru mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sebuah teks dinilai cukup yakni sekitar 41% - 60%. Pelaksanaan guru membantu siswa menceritakan materi yang dibacanya dikaitkan dalam kehidupan dinilai cukup yakni sekitar 41% - 60%. Pelaksanaan guru menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi dalam teks dibangun (membantu menyimpulkan sebuah teks) dinilai cukup yakni sekitar 41% - 60%. Pelaksanaan guru mengajukan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dinilai baik yakni sekitar 61% - 80%.

Hasil evaluasi terhadap guru dalam kegiatan penutup pada proses pembelajaran di kelas pada ketiga indikator, semua memperoleh penilaian yang cukup, yakni sekitar 41% - 60% guru yang melaksanakan. Ketiga indikator diantaranya pelaksanaan guru memberikan umpan balik tentang kelebihan siswa dalam penguasaan materi, pelaksanaan guru memberi tahu siswa bagian yang masih perlu ditingkatkan, dan pelaksanaan guru memberi tahu siswa bagaimana dapat meningkatkan penguasaan materi.

Saran berdasarkan hasil penelitian antara lain: (i) pemerintah memberikan penguatan proses kegiatan inti dan kegiatan penutup, khususnya membangun guru dalam melakukan pendekatan pembelajaran saintifik dan mengembangkan kompetensi guru dalam meningkatkan metakognisi siswa. Penguatannya dapat berupa pelatihan atau workshop dan optimalkan penilaian kinerja guru, (ii) pemerintah menyiapkan modul pembelajaran terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan juga modul cara-cara guru dalam meningkatkan kompetensi metakognisi siswa, (iii) pemerintah memberikan bantuan berupa perangkat teknologi dan perangkat pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik maupun dalam peningkatan metakognisi siswa, (iv) kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan kegiatan pengawasan salah satunya

melalui supervisi yang berkesinambungan, yang di dalamnya terkait dengan kegiatan pembelajaran saintifik dan metakognisi, (v) kepala sekolah dan pengawas melakukan pembinaan yang berkesinambungan yang bersumber salahsatunya dari hasil supervisi secara berkesinambungan, (vi) guru melakukan pengembangan kapasitas. Selain itu, guru harus selalu berusaha melakukan pendekatan saintifik dengan optimal dan berusaha dalam menguatkan kompetensi metakognisi siswa.

#### PUSTAKA ACUAN

- Amin, I; Sukestiyarno, Y.L; Waluya, S.B; & Mariani,S. (2020). Kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Implementasinya dalam Pembelajaran Matematika SMA. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*. Volume 4 (1). Hal 125 -142.
- Ananta, M. E (2020). Problematika Pembelajaran Kontekstual Mata Pelajaran PKn. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/-tikel4C-B934514E34CEED210DB8EEA799175D.pdf>. Diunduh 12 April 2020
- Downing, Kevin. (2010). Problem-Based Learning and Metacognition.” *Asian Journal Education & Learning*. Volume 1 (1). Hal 75–96.
- Holmes, K. P. & Holmes, S. V. (2011). *Hierarchy for Effective Lesson Planning: A Guide to Differentiate Instruction Through Material Selection*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 1 (19). Hal 144-151.
- Indriani, K. W. A. (2017). Analisis Kualitas Perancangan RPP dengan Menggunakan Kerangka Kerja ELPSA pada Focused Group Discussion di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Didaktik Matematika*. Volume 4 (1), Hal 25-34.
- Jaedun, A., Hariyanto, V. L., & Nuryadin. (2014). *An Evaluation of The Implementation of Curriculum 2013 at The Building Construction Department of Vocational High School in Yogyakarta*. *Journal of Education*, Volume 7(1), Hal 14-22.

- Kemendikbud (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latifa, I. S. (2017). *The Analysis of Teachers' Lesson Plan through Behavioral Objectives Theory. Journal of Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Volume 82 (9). Hal 6-11.
- Novianto, D., Dwikurnaningsih, Y & Saputri, T.S. (2019) Peningkatan Hasil Belajar Pembelajaran Tematik Melalui Pendekatan Pembelajaran Saintifik Model *Contextual Teaching And Learning. Jinop (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, Volume 5 (1). Hal 6-16
- OECD (2019). *PISA 2018 Results what students know and can do, volume 1*. Paris : OECD Publishing.
- OECD (2020). *PISA 2018 Database* <https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/>. Di unduh 8 April 2020
- Parjono (2000) Konsepsi guru tentang belajar dan mengajar dalam perspektif belajar aktif. *Jurnal Psikologi*. Nomor 2 (1). Hal 73 – 83
- Safitri, P.T., Yasintasari, E., Putri, S,A,. & Hasanah, U. (2020). Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Model PISA. *Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang*. Volume 4 (1). Hal 11-21
- Sulastrri (2018) Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5 Kota Bandung. *Jurnal Atthulab*, Volume 3 (2). Hal 185-198
- Suraji, I., Wamugi & Nurkhamidi, A. (2013). Kemampuan guru MI yang bersertifikat pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. *Jurnal penelitian*. Volume 10 (1). Hal 43 – 62.
- Taufik, R., Rivaie, W & Sulistyarni, (2013) Kemampuan guru menerapkan keterampilan bertanya pada pelajaran sosiologi di kelas XI. *Jurnal Online Universitas tanjung pura*. [jurnal.untan.ac.id > index.php > jpdpb > article > di donwnload](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article) 12 April 2020
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to identify the shortage of teaching workloads of teachers and school strategies to meet their shortcomings. This research is a case study. Primary data is collected through filling out questionnaires by the teacher, enriched with interviews and discussions. The number of questionnaires processed was 34 respondents. Data were analyzed using descriptive statistical techniques. The results of the study found that there were still many teachers who were constrained in meeting the minimum workload so that they lost the opportunity to receive professional allowances. One reason is the limited number of additional tasks. The school strategy in meeting workloads is to prioritize teachers who are already certified educators meet their workload by being given additional assignments and / or assigned to teach in other schools. It is recommended that in efforts to meet workload, teachers should look for alternative activities, either by increasing teaching hours at the original school by involving them in extra and co-curricular activities, or other schools. In addition, the five-day school program by increasing work hours at school and additional work can be an alternative to meeting the minimum workload.*

**Keywords:** certification, workload, professional allowance, five days school.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekurangan beban kerja mengajar guru dan strategi sekolah dalam memenuhi kekurangannya. Penelitian ini merupakan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh guru, diperkaya dengan wawancara dan diskusi. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 34 responden. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan masih banyak guru terkendala dalam pemenuhan beban kerja minimal sehingga mereka kehilangan peluang mendapat tunjangan profesi. Salah satu sebabnya adalah terbatasnya jumlah tugas tambahan. Strategi sekolah dalam memenuhi beban kerja adalah mengutamakan guru yang sudah bersertifikat pendidik memenuhi beban kerjanya dengan cara diberi tugas tambahan dan/atau ditugaskan mengajar di sekolah lain. Direkomendasikan dalam upaya pemenuhan beban kerja, hendaknya guru dicarikan alternatif kegiatan, baik melalui penambahan jam mengajar di sekolah asal dengan melibatkannya dalam kegiatan ekstra dan kokurikuler, atau sekolah lain. Selain itu program lima hari sekolah dengan menambah jam kerja di sekolah dan tugas tambahan dapat menjadi alternatif pemenuhan beban kerja minimal.

**Kata kunci:** sertifikasi, beban kerja, tunjangan profesi, lima hari sekolah.

---

<sup>1</sup> Kajian ini merupakan bagian dari studi “Kajian Pemenuhan Beban Kerja Guru” Puslitjakdikbud pada tahun 2017

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang dan Permasalahan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 14 ayat 1 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penghasilan guru adalah memberikan tunjangan profesi guru (TPG). Pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan berhak mendapatkan TPG yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Namun sejalan dengan itu, selain memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimum, guru juga harus memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka (JTM) per minggu untuk mata pelajaran yang diampu sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki.

Pada kenyataannya masih banyak guru sudah mengantongi sertifikat pendidik terkendala untuk mendapat TPG karena mengalami kekurangan jam mengajar. Salah satu cara mengatasi, sejak 2016 Kemendikbud mencanangkan implementasi kebijakan lima hari sekolah (LHS) dengan mengharuskan guru bekerja 37,5 jam efektif per minggu. Yustinus (2016) mengemukakan bahwa guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi jam kerja yang setara dengan beban kerja pegawai lainnya yaitu 37,5 jam kerja (@ 60 menit) per minggu.

Selama ini pemenuhan tuntutan beban kerja 24 JTM/minggu dilakukan dengan mengajar di dua sekolah. Data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2016 mencatat 44.060 guru PNS mengajar di dua sekolah karena JTM-nya di sekolah satuan administrasi pangkal (Satminkal) tidak mencapai 24 JTM per minggu. Selain itu terdapat 378 guru yang secara administrasi terdaftar di sekolah Satminkal namun mengajar di sekolah lain, artinya JTM-nya nol di sekolah Satminkal; sehingga total guru yang mengajar di dua sekolah adalah 44.438 guru (lihat: Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah guru PNS yang mengajar pada lebih dari satu sekolah

No	Provinsi	Jumlah guru	No	Provinsi	Jumlah guru	No	Provinsi	Jumlah guru
1	Aceh	1.557	13	Kalsel	857	25	Riau	815
2	Bali	722	14	Kalteng	496	26	Sulbar	171
3	Babel	191	15	Kaltim	399	27	Sulsel	2.172
4	Banten	461	16	Kaltara	61	28	Sulteng	610
5	Bengkulu	414	17	Kepri	110	29	Sultra	677
6	Gorontalo	234	18	Lampung	1.843	30	Sulut	1.882
7	Jakarta	501	19	Maluku	455	31	Sumbar	2.210
8	Jambi	738	20	Malut	176	32	Sumsel	1.639
9	Jabar	2.758	21	NTB	546	33	Sumut	3.048
10	Jateng	8.924	22	NTT	688	34	DIY	1.057
11	Jatim	6.989	23	Papua	349			
12	Kalbar	547	24	Pabar	141	Nasional		44.438

Sumber data: Ditjen GTK (2016)

Yang masih dipertanyakan adalah bagaimana guru dapat memenuhi beban jam mengajarnya, dan apakah kebijakan LHS dapat memecahkan permasalahan yang efektif dalam pemenuhan beban kerja guru? Di sisi lain kiranya masih perlu dicarikan alternatif tugas tambahan yang diberikan kepada guru untuk mengatasi persoalan beban kerja tersebut. Berkenaan dengan itulah paper ini diketengahkan, sebagai bagian dari hasil penelitian yang lebih luas di tahun 2017.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut disusun tujuan dari kajian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah kekurangan beban kerja yang dialami guru;
2. Mengetahui strategi sekolah dalam memenuhi kekurangan beban kerja guru;
3. Mengetengahkan alternatif solusi penambahan tugas sebagai upaya pemenuhan beban kerja guru.

## KAJIAN LITERATUR

### Beban Kerja Guru

Istiani (2017) mendefinisikan beban kerja sebagai suatu kegiatan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab seseorang atau suatu organisasi dalam waktu tertentu. Tanggung jawab yang harus diselesaikan dapat berupa fisik, mental maupun sosial. Yustinus (2016) mendefinisikan beban kerja sebagai frekuensi kegiatan dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dicirikan sebagai sejumlah kegiatan, waktu dan energi yang harus dikeluarkan seseorang baik fisik maupun mental dengan memberikan kapasitasnya untuk memenuhi tuntutan tugas yang diberikan.

Lebih lanjut Istiani (2017) mendefinisikan beban kerja Guru merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan guru karena menjadi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan pokok guru tersebut adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Yustinus (2016) mengemukakan beban kerja Guru merupakan seluruh tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Jadi, beban kerja Guru merupakan seluruh tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab guru, meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang

melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerjanya; yang harus diselesaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu tertentu.

Wahyuni (2014) berpendapat bahwa beban kerja Guru atau beban mengajar guru berpengaruh pada hasilnya. Dengan demikian beban kerja guru perlu memiliki suatu ukuran ideal untuk mendapatkan hasil maksimal. Lebih lanjut Wahyuni mengatakan beban kerja yang menyimpang dari ukuran ideal tersebut akan menyebabkan timbulnya kelelahan fisik, stres, tidak konsentrasi, pemahaman materi kurang optimal, dan ketidakpuasan. Dengan demikian maka sangat penting untuk menentukan beban kerja yang mendekati ideal yang didukung dengan bimbingan, arahan, pelayanan dan bantuan dari kepala sekolah kepada guru-guru untuk mencapai hasil yang optimal. Ikhsan, Zakso dan Wahyudi (2013) mengemukakan terkait beban kerja guru, kepala sekolah dapat membagi beban kerja seadil-adilnya melalui musyawarah guru dan kepala sekolah dalam bentuk pembagian beban kerja.

Fadhil (2011) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalyono (dalam Fadhil, 2011) mengatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor guru, meliputi kualitas mengajar guru, kedisiplinan dan metode mengajar guru. Artinya guru setelah menerima tugas dari kepala sekolah dalam bentuk beban kerja harus dapat melaksanakan secara disiplin dengan menggunakan metode mengajar yang tepat agar mendapat hasil yang maksimal. Hasil penelitian Fadhil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel X Mutu mengajar guru dengan variabel Y Prestasi belajar siswa.

Regulasi yang mengatur beban kerja guru terdapat dalam UUGD pasal 35 ayat 2 yang berbunyi guru mengajar sekurang-kurangnya 24 JTM dan sebanyak-banyaknya 40 JTM dalam seminggu. Di sini penekanan beban kerja guru hanya pada pembelajaran di depan kelas, padahal beban kerja guru seharusnya mencakup semua tugas utama guru sebagai pendidik, sebagaimana tertera pada pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: beban kerja guru mencakup kegiatan pokok guru yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Atau menurut Kamdi (2014) mengemukakan beban kerja guru ini dalam enam jenis kegiatan kependidikan yang dilakukan guru yaitu: (i) merencanakan pembelajaran, (ii) melaksanakan pembelajaran (kegiatan tatap muka), (iii) melakukan penilaian, (iv) membimbing kegiatan siswa, (v) melakukan pekerjaan tambahan, dan (vi) melakukan pengembangan profesi kependidikan. Keenam kegiatan tersebut dilakukan guru pada waktu jam kerja sekolah dan di luar jam kerja sekolah. Jadi beban kerja guru sebenarnya tidak melulu mengajar di depan kelas. Menurut Sinaga (2016), tuntutan UU bahwa guru harus mengajar 24 JTM per minggu telah menimbulkan suatu situasi sangat fenomenal karena tidak semua guru berada pada kondisi yang ideal yang dengan mudah mendapatkan beban kerja 24 JTM dalam seminggu.

Pemenuhan beban mengajar 24 JTM per minggu kini menjadi target utama. Segala upaya ditempuh, walaupun harus mengajar ke sekolah lain. Kalau dulu guru *stress* karena diberikan beban yang banyak, kini agak terbalik banyak guru kesulitan memenuhi beban mengajar minimal 24 jam di sekolah Satminkalnya. Para guru paham bahwa pemenuhan 24 jam mengajar adalah perolehan 1 kali gaji pokok yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada akhirnya, tuntutan jam mengajar ini juga membelenggu guru untuk dapat menumpahkan kreativitas dan inovasinya dalam mengajar. Pembelajaran di kelas menjadi kering. Peserta didik sebagai konsumen yang wajib mendapat layanan maksimal menjadi sering terabaikan. Keprofesionalan guru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pun akhirnya semakin kabur dan tak bisa diukur. Sebab, kenyataannya keprofesionalan guru hanya diukur sebatas jumlah jam mengajar.

Menurut Sudarsono (2015) guru yang profesional diharuskan memiliki beberapa persyaratan minimal, antara lain harus memiliki keahlian dalam mendidik atau mengajar, mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya, bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, menguasai secara mendalam materi pekerjaan yang dilakukan, menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya, dan selalu

mengembangkan diri secara terus menerus melalui organisasi profesi, seminar, internet dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru dituntut untuk menguasai konsep-konsep keilmuan dan perekayasa yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral. Konsekuensinya seorang guru dalam pembelajarannya tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah saja, melainkan komunikasi dua arah sehingga pembelajaran menjadi kondusif yang pada akhirnya kreativitas dan potensi peserta didik bisa tergali.

Mendikbud Muhadjir Effendy (dalam Fadhillah, 2017) mengatakan bahwa kebijakan tentang beban kerja guru ini menjadi persoalan besar sekolah di Indonesia. Mendikbud menjelaskan bahwa banyak guru tidak bisa memenuhi beban mengajar minimal tersebut. Akhirnya, tidak sedikit guru yang memilih mencari sekolah lain untuk memenuhi syarat 24 JTM. Menurut Mendikbud, kebijakan itu tidak bisa menjadikan guru bekerja sesuai fungsinya yang salah satunya mengajarkan karakter pada siswa. Sistem itu justru membuat guru hanya menganggap sekolah sebagai tempat transit, karena kegiatannya hanya datang, mengajar dan pergi.

Untuk itu perlu perumusan ulang mengenai beban kerja guru. Beban kerja guru harus mencakup semua unsur-unsur yang menjadi tugas pokok seorang guru yang menggambarkan bahwa guru profesional, bukan tugas mengajar di depan kelas saja. Program LHS diharapkan merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu tercapainya harapan tersebut.

#### **Kebijakan Sertifikasi**

Dalam UUGD No. 14/2005 disebutkan bahwa sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Penerapan sertifikasi dan pemberian tunjangan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Kartini & Kristiawan (2019) dalam kajiannya menemukan bahwa TPG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru.

Muamar, dkk (2017) menulis bahwa program sertifikasi guru adalah program yang berisi tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Guru yang dinyatakan lulus uji

sertifikasi akan memperoleh sertifikat pendidik sebagai tenaga profesional sehingga diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Hasnariah (2016) mengemukakan sertifikasi guru bertujuan untuk: (i) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (ii) meningkatkan proses dan hasil belajar, (iii) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (iv) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional bermutu.

Yuliandri dan Tahrin (2017) mengemukakan bahwa pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional. Hasil kajian Yuliandri dan Tahrin menunjukkan bahwa TPG memberikan pengaruh positif pada peningkatan kompetensi guru.

Yustinus (2016) mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam dua kelompok yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor dari dalam diri karyawan dan dibawa sejak mulai bekerja, sedangkan faktor ekstrinsik adalah hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan antara lain beban kerja dan sistem imbalan/tunjangan. Yustinus menganalisis hubungan antara beban kerja dan sistem tunjangan terhadap kepuasan kerja. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa dengan memberikan tunjangan khusus kepada karyawan yang diberi beban kerja tertentu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel beban kerja (X1) dan tunjangan khusus (X2) memiliki pengaruh kuat pada kepuasan kerja. Menurut Hardianto (2018) kepuasan kerja guru sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang optimal. Guru yang merasa puas dalam bekerja akan semakin bersemangat dalam bekerja. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kinerja guru. Pemberian penghargaan yang sesuai dengan harapan guru akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dan kinerja pada dasarnya saling berkaitan dan dipengaruhi oleh penghargaan.

Hasnariah (2016) menulis bahwa TPG merupakan

salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru yang berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat atau Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Sesuai Pasal 15 ayat (i) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 (PP 74/2008), tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan berikut: (i) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu registrasi guru oleh kementerian, (ii) memenuhi beban kerja sebagai guru, (iii) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya, (iv) terdaftar pada kementerian sebagai guru tetap, (v) berusia paling tinggi 60 tahun, (vi) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Dari sini terlihat bahwa salah satu persyaratan bagi seorang guru menerima tunjangan profesi adalah guru tersebut harus memiliki beban kerja tertentu, sebagaimana tertera dalam UUGD, pasal 35 ayat (2) yang mengatur tentang beban kerja guru yaitu sekurang-kurangnya 24 JTM per minggu.

Saroni dalam Yuliandri dan Tahrin (2017) mengatakan bahwa program sertifikasi guru yang bermuara pada pemberian TPG, diterapkan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan meningkatkan kesejahteraan hidup guru, juga mengakui bahwa profesi guru setara dengan profesi lainnya.

#### **Penerapan Lima Hari Sekolah (LHS)**

Indahri (2017) menulis bahwa Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah. Inti dari Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan mulai tahun ajaran 2017/2018. Dasar disusunnya kebijakan LHS adalah adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang tertuang dalam Nawacita dengan agenda strategisnya menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Selain itu, ada pula tuntutan global agar pendidikan di sekolah dapat menumbuhkan karakter siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, mampu

berkomunikasi, dan berkolaborasi, agar dapat bersaing di abad ke-21. Hal ini sejalan dengan empat kompetensi yang harus dimiliki siswa yang disebut 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), *creativity* (kreativitas), *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), dan *ability to work collaboratively* (kemampuan untuk bekerja sama).

Indahri dan juga Anggiet (2017) mengemukakan bahwa ada lima alasan/tujuan menerapkan kebijakan LHS yaitu: (i) agar sekolah mempunyai waktu lebih untuk meningkatkan religiusitas, (ii) meningkatkan nasionalisme, (iii) menumbuhkembangkan sikap gotong royong bersama masyarakat khususnya di akhir pekan, (iv) meningkatkan integritas diri, (v) biar mandiri. LHS bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada beragam aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan guru. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima nilai prioritas pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum, yaitu belajar sesuai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Menurut Lestari dan Sukanti (2016), kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Anggraini (2018) menyampaikan bahwa kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja

sama, dan kemandirian siswa secara optimal. Fadhlyda, Erlamsyah dan Daharnis (2014) mengutarakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana pembinaan siswa yang dapat dikembangkan sehingga siswa tersebut memiliki jati diri dan moral yang jelas. Oleh karena itu sekolah harus dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik secara efektif dan efisien.

#### Keberlanjutan Kebijakan LHS

Kemendikbud menerbitkan Permendikbud No. 23/2017 agar sekolah-sekolah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan kebijakan LHS. Hanya saja karena kurangnya sosialisasi maka kebijakan LHS dianggap menimbulkan kegaduhan/polemik di dalam masyarakat (Indahri, 2017). Permendikbud ini akhirnya gugur dengan sendirinya sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan LHS setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), di mana dikatakan pada Pasal 17 bahwa pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun Permendikbud No. 23/2017 sudah tidak berlaku lagi, namun dalam Perpres No. 87/2017 dikatakan bahwa penyelenggaraan program PPK di sekolah terus dapat dilanjutkan pelaksanaannya tergantung kesiapan sekolah dan boleh dilakukan melalui program LHS atau enam hari sekolah dalam seminggu. Dasar hukum penyelenggaraan PPK tertera pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: (i) intrakurikuler; (ii) kokurikuler; dan (iii) ekstrakurikuler.

Dengan demikian, faktanya memang banyak sekolah menyelenggarakan LHS. Khusus untuk SMP berdasarkan SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) telah ditetapkan sebanyak 271 SMP di seluruh Indonesia yang menjadi sekolah percontohan melaksanakan program PPK tahun 2016. Sekolah-sekolah ini ditetapkan menyelenggarakan PPK dengan pola LHS.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan dan analisis data sekunder, terkait dengan (i) Jumlah guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah dari Ditjen GTK, dan (ii) Data SMP percontohan kebijakan LHS atau yang menyelenggarakan PPK dari Dit. PSMP. Hasil analisis data sekunder—menjadi dasar untuk mengumpulkan data primer berupa verifikasi di lokasi kajian melalui kegiatan: (i) diskusi kelompok terpusat (DKT) dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum, dan (ii) penyebaran angket kepada guru.

### Lokasi Penelitian dan Cara Penentuannya

Tulisan ini merupakan bagian dari studi yang lebih luas yang dilaksanakan tahun 2017. Tulisan memusatkan perhatian di Kota Depok sebagai studi kasus dengan alasan memiliki 6 sekolah percontohan PPK dan termasuk *best practice* dalam pelaksanaan LHS.

### Sampel Sekolah dan Responden

Sebagaimana studi aslinya, sekolah yang dipilih jadi sampel adalah seluruh sekolah (tingkat Sekolah Menengah Pertama SMP) yang ditetapkan sebagai sekolah percontohan program PPK dengan pola LHS. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan responden, terdiri dari: kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan juga guru mata pelajaran K-13 (tidak termasuk guru bimbingan dan penyuluhan/BP). Jumlah responden di Kota Depok untuk pelaksanaan DKT terdiri atas enam kepala sekolah, enam wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kuesioner diberikan kepada seluruh guru di sekolah sampel. Berikut ini daftar sekolah sampel dalam studi kasus di Kota Depok: (i) SMP Islam Dian Didaktika, (ii) SMP IT Nurul Fikri, (iii) SMP IT Ummul Quro, (iv) SMP Putra Bangsa, (v) SMPN 18 Depok, (vi) SMPS Islam Alhamidiyah.

### Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dari responden adalah: (i) rerata JTM guru (beban kerja guru), (ii) strategi sekolah dalam memenuhi beban kerja guru, (iii) masalah yang dihadapi dalam memenuhi kekurangan beban kerja, (iv) konsekuensi pemenuhan beban kerja guru, (v) gambaran pemenuhan program LHS dalam pemenuhan beban kerja, dan (vi) persepsi guru tentang kegiatan-kegiatan guru yang perlu diakui dan dikonversi dalam sejumlah JTM tertentu berikut alasannya.

### Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi dan grafik. Data kuantitatif diperkaya dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, DKT, dan literatur yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Jumlah guru yang mengisi kuesioner di Kota Depok sebanyak 34 orang. Seluruh guru yang mengisi kuesioner sudah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. Guru tersebut sudah memiliki pengalaman mengajar 17 tahun. Responden terdiri atas 35,3 persen guru PNS dan sisanya 64,7 persen guru non PNS. Dari seluruh responden sebanyak 79,4 persen (27 guru) sudah memiliki sertifikat pendidik, sisanya 22,6 persen belum memiliki sertifikat pendidik. Dari 27 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 21 guru (77,8 persen) memenuhi persyaratan beban kerja minimal 24 JTM dan menerima TPG, sisanya 22,2 persen tidak menerima TPG karena mata pelajaran yang diampu tidak linear dengan sertifikat pendidiknya dan beban kerja guru yang belum mencukupi 24 jam/minggu. Dari 21 guru yang menerima TPG, sebanyak 12 guru (57,1 persen) JTM minimalnya terpenuhi di sekolah Satminkalnya sedangkan 9 guru (42,9 persen) JTM minimalnya tidak terpenuhi di sekolah Satminkal. Dari 9 guru yang tidak terpenuhi JTM minimalnya di sekolah Satminkal, sebanyak 7 guru (77,8 persen) memenuhinya dengan mengajar di sekolah lain, sedangkan sisanya 2,2 persen memenuhi dengan mengerjakan tugas tambahan.

### Beban Kerja Guru

Masalah yang dihadapi guru-guru dalam perhitungan beban kerja guru adalah perhitungan yang hanya membatasi terhadap pelaksanaan pembelajaran (mengajar di depan kelas) dan melakukan tugas tambahan, sebaliknya mengabaikan tugas lainnya berupa perencanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing dan melatih peserta didik. Hal ini mengakibatkan banyak guru kesulitan untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal 24 JTM.

Isu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 15/2005 tentang SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (2) poin b. butir 5 dikatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan minimal di tingkat satuan pendidikan adalah "setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Isu ini sejalan dengan kebijakan LHS, karena dengan LHS guru dapat bekerja 37,5 jam per minggu sebagaimana layaknya jam kerja ASN. Dengan LHS guru dapat mengerjakan seluruh tugasnya, tapi belum menjadi alternatif pemenuhan beban kerja sesuai UU bagi guru agar dapat menerima TPG.

Selanjutnya UUGD, pasal 35 ayat (2) mengatur tentang beban kerja guru, yaitu sekurang-kurangnya 24 JTM dan sebanyak-banyaknya 40 JTM dalam satu minggu. PP 74/2008 tentang Guru, pasal 52 ayat (1) mempertegas bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu (i) merencanakan pembelajaran, (ii) melaksanakan pembelajaran, (iii) menilai hasil pembelajaran, (iv) membimbing dan melatih peserta didik, dan (v) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 JTM dan paling banyak 40 JTM dalam satu minggu tersebut merupakan bagian jam kerja pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam satu minggu.

Namun data memperlihatkan (Tabel 1), masih

terdapat banyak guru yang kekurangan beban kerja minimalnya dan mereka memenuhinya dengan mengajar di sekolah lain. Dari Tabel 1 tercatat sebanyak 44.438 guru PNS dari tingkat TK/PAUD hingga SMA/SMK, yang kekurangan JTM di sekolah Satminkal dan mereka memenuhi kekurangan beban kerja tersebut dengan mengajar di sekolah lain. Sesuai fokus studi yaitu khusus guru SMP, maka tercatat sebanyak 25.820 guru yang harus mengajar pada lebih dari satu sekolah karena mereka kekurangan beban kerja di sekolah Satminkal. Ketika dibandingkan dengan jumlah guru PNS SMP di Indonesia yaitu sebanyak 307.829 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) maka persentase guru SMP PNS yang mengajar di lebih dari satu sekolah adalah 8,4 persen. Dalam tabel berikut disajikan jumlah guru yang mengajar pada >1 sekolah di Kota Depok dan juga rerata JTM/minggu di sekolah Satminkal dan di sekolah lainnya.

Tabel 2. Jumlah Guru yang Mengajar pada >1 Sekolah dan Rerata JTM/minggu

Lokasi sampel	Jumlah guru	JTM/minggu		
		Sekolah Satminkal	Sekolah lain	Total
Kota Depok	29	13,1	17,6	29,3
Nasional	25.820	14,6	12,3	26,9

Sumber: Ditjen GTK 2016 (Hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 2, rerata JTM/minggu di sekolah Satminkal dari guru yang mengajar pada >1 sekolah di Kota Depok yaitu 13,1 JTM/minggu. Rerata JTM/minggu ini lebih rendah dari tuntutan beban kerja minimal sehingga guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tidak akan dapat menerima TPG. Di Kota Depok, jumlah guru yang mengajar pada >1 sekolah adalah sebanyak 29 orang. Jika guru-guru tersebut sudah disertifikasi maka mereka akan kehilangan peluang mendapat TPG, kecuali mereka mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah yang diakui setara dengan sejumlah JTM tertentu oleh pemerintah seperti menjadi kepala laboratorium atau kepala perpustakaan sebagaimana disebutkan dalam PP 74/2008 tentang Guru. Selain dengan cara memberikan tugas tambahan kepada guru, cara lain yang

ditempuh adalah mengajar di sekolah lain asalkan JTM di sekolah Satminkalnya minimal 6 JTM, sebagaimana tuntutan Permendiknas 35/2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Kenyataan masih ada guru yang kekurangan beban kerja. Oleh karena rerata JTM guru di sekolah Satminkal adalah 14,6 JTM, maka rerata kekurangan beban kerja guru untuk mencapai beban kerja minimal adalah sebesar 9,4 JTM. Sesungguhnya kekurangan JTM ini dapat dipenuhi guru dengan mengerjakan tugas tambahan, namun karena jumlah tugas tambahan terbatas maka solusi yang ditempuh adalah dengan mengajar di sekolah lain. Namun cara kedua ini banyak menuai kritikan. Jika sekolahnya dekat mungkin tidak terlalu bermasalah, sebaliknya jika lokasi sekolah itu berjauhan. Studi tentang pemenuhan beban kerja guru (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), 2016) menemukan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan berikut ketika guru harus mengajar pada >1 sekolah: (i) harus bersaing dengan guru lainnya, (ii) harus mengeluarkan biaya ekstra baik tenaga maupun dana untuk mencapai sekolah lain, (iii) resiko terjadi kecelakaan cukup tinggi karena guru harus melakukan perjalanan jauh, (iv) berpotensi menyebabkan kelelahan, (v) guru kehilangan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran keesokan hari, (vi) waktu guru untuk mengurus keluarganya juga berkurang, (vii) guru tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri dan sebagainya.

### Strategi Sekolah Dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru

Kinerja guru sebagai ASN diatur dalam (i) Permenpan RB 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (ii) Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (iii) Permendiknas No. 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan (iv) Buku pedoman Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, 2012).

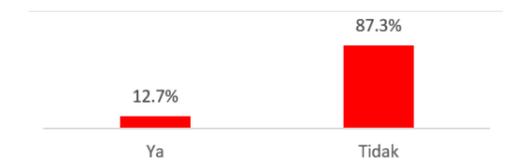
Kota Depok tidak membuat regulasi khusus atau menetapkan strategi tertentu untuk membantu guru dalam memenuhi beban kerja minimalnya.

Sekolah juga sama. Kalaupun sekolah membuat suatu regulasi tertentu terkait pemenuhan beban kerja minimal, itu hanyalah semacam peraturan tata tertib sekolah yang hanya berlaku di internal sekolah saja. Faktanya adalah bahwa sekolah selalu berusaha mengikuti ketentuan/regulasi yang ditetapkan Pusat.

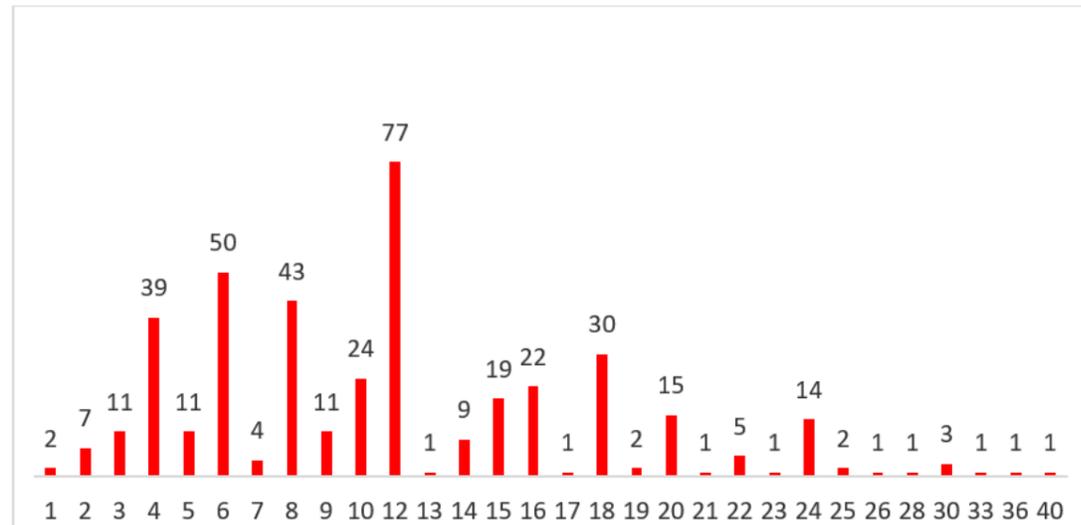
Di tingkat sekolah umumnya kepala sekolah sudah memiliki sertifikat pendidik dan menerima TPG karena sebagai kepala sekolah tidak diwajibkan untuk mengajar, sebagaimana diatur dalam PP 19/2017 tentang Perubahan atas PP 74/2008 tentang Guru pasal 54 ayat (1) yang mengatakan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya strategi pemenuhan beban kerja guru oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kepala sekolah memberi prioritas kepada guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar mengajar 24 JTM/minggu sehingga membuka kesempatan mendapat TPG. Jika JTM yang tersedia terbatas, maka guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik namun JTM-nya tidak mencapai 24 JTM; kepada guru-guru seperti ini diberi prioritas mendapat tugas tambahan yang dapat diekuivalensi dengan JTM tertentu agar terpenuhi beban kerja minimal. Jika upaya maksimal sudah dilakukan namun tetap saja ada guru yang tidak memenuhi beban kerja minimalnya, maka guru ditugaskan untuk mengajar di sekolah lain.

Kebijakan tentang pemenuhan beban kerja dengan menugaskan guru mengajar di sekolah lain sudah sejak lama dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini ditemukan dalam studi di Puslitjakkidbud sebelumnya yaitu studi tentang Sertifikasi Guru tahun 2013. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa sebagian besar guru memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di dua sekolah. Jumlah guru yang mengajar di dua sekolah dan rerata JTM di sekolah kedua dalam studi tersebut disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Persentase guru mengajar di >1 sekolah (N=3.212) (Puslitjakkidbud, 2013)



Gambar 2. Jumlah Jam Mengajar Guru Di Sekolah Lain (Puslitjakdikbud, 2013)

Dari gambar 2 dikalkulasi rerata JTM, median, modus, JTM minimal dan maksimal di sekolah lain. Hasilnya: N = 409 (12,7%), rerata JTM = 11.39, median = 12, modus = 12, Standar deviasi 6,36, JTM minimal 1, dan JTM maximal 40. Jadi terdapat 12,7 persen guru mengajar di dua sekolah, dengan rerata JTM-nya di sekolah kedua adalah 11,39. Jadi sudah sejak lama ada banyak guru yang mengajar di dua sekolah. Oleh karena penarikan sampel studi tersebut adalah secara random, maka hasil studi tersebut dapat digeneralisasi sehingga dapat dikatakan bahwa secara nasional terdapat sekitar 12,7 persen guru mengajar pada lebih dari satu sekolah. Dari gambar 2 terlihat banyak guru yang mengajar lebih dari 24 JTM di sekolah lain; hal ini menunjukkan bahwa banyak guru yang beban kerjanya melebihi beban kerja minimal yang dipersyaratkan. Namun demikian guru-guru yang JTM-nya di atas 24 JTM di sekolah kedua umumnya adalah guru-guru non PNS. Guru non PNS memang banyak yang mengajar dengan beban kerja yang tinggi karena umumnya gaji mereka rendah dan mereka dibayar berdasarkan jumlah JTM yang mereka ajarkan. Jadi berbeda dengan guru PNS yang umumnya mengajar di sekolah lain karena ingin memenuhi tuntutan beban kerja minimal untuk mendapat TPG, guru non PNS mengajar di sekolah lain karena ingin meningkatkan penghasilannya.

Mengajar melebihi beban kerja minimal pasti melelahkan, apalagi harus mengajar di dua

sekolah yang mungkin letaknya berjauhan sudah pasti sangat melelahkan, sehingga guru tidak akan maksimal dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Menyadari hal ini maka terdapat sekolah swasta di Kota Depok yang membuat aturan yang melarang gurunya mengajar di sekolah lain dengan tujuan supaya guru tetap berkonsentrasi mengajar di satu sekolah saja.

Supaya guru tetap berkonsentrasi mengajar di satu sekolah saja maka sekolah menetapkan dan mengkonversi semua kegiatan yang dilakukan di sekolah dalam sejumlah JTM tertentu. Berikut ini disajikan sebuah praktek baik di sekolah swasta yang mengkuivalensi setiap kegiatan yang dilakukan guru di sekolah. Sekolah mengupayakan agar setiap guru dapat bekerja sebagai layaknya seorang ASN yang dipersyaratkan bekerja 37,5 jam per minggu. Dengan demikian, setiap guru diupayakan bekerja dengan beban kerja yang kurang lebih sama atau diatur sedemikian sehingga guru tidak lagi memiliki waktu lebih untuk mencari tambahan JTM di luar. Bahkan sekolah/yayasan melarang gurunya untuk tidak boleh mengajar pada lebih dari satu sekolah dengan sanksinya guru akan diberhentikan kontrak kerjanya. Berikut disajikan beban kerja setiap guru di sebuah sekolah swasta milik yayasan yang membagi beban kerja berimbang antara satu guru dengan yang lain untuk semua kegiatan di sekolah.

Tabel 3. Beban Kerja Guru dan Konversi Kegiatan dalam JTM di Sebuah Sekolah Swasta

No	Nama*)	Konversi							Total Beban Kerja	Minus		
		Mengajar	Walas	Piket	Staf	BPI	PJ	remedial/pen-gayaan			inspi-rasi	Adm
1	BHP	24	4		4	2		2		4	40	2.5
2	LF	22	4	1		2	2	2		4	37	-0.5
3	DY	25	4		4	2		2		4	41	3.5
4	IP	23	4	2		2		2		4	37	-0.5
5	INSR	21	4	2		2		2	2	4	37	-0.5
6	EW	21	4	2		2		2	2	4	37	-0.5
7	A	20		7		2	2	2		4	37	-0.5
8	HR	25		2		2	2	2		4	37	-0.5
9	SK	25	4			2	2	2		4	39	1.5
10	YH	20	4	1	4	2		2		4	37	-0.5
11	FAC	20	4	5		2		2		4	37	-0.5
12	WW	20		5	4	2		2		4	37	-0.5
13	YK	20		3	4	2	2	2		4	37	-0.5
14	IN	20	4	1	4	2		2		4	37	-0.5
15	K	18	4	1	4	2	2	2		4	37	-0.5
16	MA	20	4	3		2	2	2		4	37	-0.5
17	MK	18		7		2	4	2		4	37	-0.5
18	In	18	4	3	4	2		2		4	37	-0.5
19	Ir	25		4		2		2		4	37	-0.5
20	AS	20		5	4	2		2		4	37	-0.5
21	Rb	24	4	3		2		2		4	39	1.5
22	Rs	20		7		2	2	2		4	37	-0.5
23	T	24		5		2		2		4	37	-0.5

Keterangan:

\*) Untuk menjaga *privacy*, nama guru disingkat dengan inisialnya saja

BPI = Bina Pribadi Islam semacam pendidikan akhlak/budi pekerti; umumnya diekuivalensikan setara 2 JTM/minggu

PJ = penanggung jawab kegiatan, contoh: ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, palang merah remaja (PMR), pasukan pengibar bendera (Paskib), pramuka, literasi, minat bakat siswa, pembina osis dan sebagainya; penanggung jawab kegiatan ini umumnya diekuivalensikan setara dengan 2 JTM/minggu.

Staf = Staf/anggota tim pengembang misalnya (i) Kurikulum meliputi penilaian, KBM, SDM dan sebagainya, dan (ii) Kesiswaan meliputi minat bakat siswa, ekstrakurikuler dan sebagainya; kegiatan ini umumnya diekuivalensi setara 4 JTM per minggu

Dalam paragraf di atas disajikan bagaimana sebuah sekolah swasta mengupayakan agar guru-gurunya tidak perlu mencari tambahan JTM di luar sekolah untuk meningkatkan penghasilannya namun tetap berkonsentrasi dan fokus mengajar dan berbakti di satu sekolah saja agar dapat meningkatkan mutu sekolah. Dengan cara ini guru jadinya bekerja sekitar 37,5 JTM per minggu yang dapat disetarakan dengan beban kerja seorang ASN. Sayangnya kegiatan sekolah yang dapat diekuivalensi ini hanya berlaku di tingkat sekolah/yayasan saja, tidak diakui di tingkat nasional sehingga di sekolah-sekolah tertentu masih banyak guru baik di negeri maupun swasta memenuhi beban kerja minimalnya

atau meningkatkan penghasilannya dengan mengajar pada >1 sekolah. Kasus di Depok ini menjadi praktek baik yang dapat menjadi model pelaksanaan LHS sebagai alternatif pemenuhan beban kerja guru.

Selanjutnya di sekolah tertentu khususnya di sekolah swasta milik yayasan sudah ada banyak sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi sekolah percontohan pelaksana PPK yang dikemas pelaksanaannya dalam program LHS. Caranya sekolah membuat jadwal sekolah dalam 5 hari per minggu dari Senin-Jumat sedangkan Sabtu dan Minggu libur. Program sekolah ini sejalan dengan kebijakan LHS bahwa guru dapat memenuhi beban kerjanya melalui LHS dengan mengerjakan PPK. Meskipun kebijakan LHS telah menimbulkan polemik sehingga Pemerintah menerbitkan Perpres 87/2017 yang membatalkan pelaksanaannya namun sekolah swasta tertentu tetap menyelenggarakan LHS; pertama karena manfaat dari LHS yang dirasakan sekolah dan kedua karena dalam Perpres 87/2017 dikatakan bahwa penyelenggaraan PPK boleh melalui lima atau enam hari sekolah.

Kebijakan LHS ini diyakini memperkuat pendidikan keluarga sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud, dengan LHS para orangtua dan anak memiliki banyak waktu luang berinteraksi, khususnya pada Sabtu dan Minggu (Yunita, 2017). Dikatakannya bahwa libur Sabtu sangat tepat buat keluarga karena punya waktu yang cukup untuk berkumpul. Manfaatnya adalah terjadi interaksi komunikasi yang baik antara orangtua dan anak sehingga keluarga dapat mengembangkan karakter anak sebagai pilar utama untuk menentukan kesuksesan anak di luar jam sekolah. Untuk itu orangtua memang memiliki waktu yang memadai untuk memperhatikan pendidikan karakter anaknya. Dengan begitu orangtua dapat menjalin komunikasi dengan anaknya untuk tujuan membentuk karakter anak. Selain itu, kebijakan LHS dinilai baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru akan memiliki banyak waktu untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama ini RPP masih suka di-copy paste saja oleh guru sehingga bilamana guru mempunyai waktu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sekolah-sekolah yang menjadi percontohan merasakan manfaat dari LHS. Guru-guru

mempunyai waktu cukup untuk menyusun RPP dan menyelesaikan tugas-tugasnya seperti mengoreksi ulangan anak di sekolah tanpa guru harus membawa tugas-tugas sekolah untuk dikerjakan di rumah, sehingga di rumah guru dapat menggunakan seluruh waktunya untuk mengurus keluarganya. Jadi LHS sesungguhnya menjadi salah satu alternatif yang tepat bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya untuk mendapat TPG. Dengan LHS guru tidak perlu lagi mencari tambahan JTM di luar sekolah untuk memenuhi JTM minimalnya.

Dalam studi lainnya (Sinaga, 2016) ditemukan bahwa banyak guru kesulitan untuk mengajar di dua sekolah sehingga mereka terpaksa memenuhi beban kerjanya dengan cara mengajar mata pelajaran lainnya yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan akademisnya, sehingga menghadapi risiko kehilangan haknya untuk menerima TPG. Dengan demikian memang perlu dicarikan solusi yang tepat yang tidak bertentangan dengan regulasi agar guru tetap dapat menjaga peluangnya menerima TPG.

Pada Tabel 3 diutarakan bagaimana upaya sekolah swasta melaksanakan LHS. Guru-guru yang kekurangan JTM dapat memenuhi beban kerja minimalnya dengan mengerjakan berbagai kegiatan sekolah yang mana kegiatan-kegiatan tersebut disetarakan dengan sejumlah JTM tertentu. Oleh karena kegiatan yang diakui setara dengan JTM tertentu tersebut hanya diakui di tingkat internal sekolah saja, maka dalam kajian ini guru-guru yang menjadi responden dimintakan pendapatnya mengenai bagaimana sebaiknya pembobotan kegiatan sekolah dalam JTM yang lebih rasional yang dapat diterima di tingkat nasional. Tentunya pendapat guru ini perlu dipertimbangkan dengan pendapat pakar pendidikan atau dibandingkan dengan ekuivalensi JTM yang pernah ditetapkan dalam regulasi yang pernah ada sehingga dapat ditetapkan JTM ekuivalensi yang paling tepat yang diterima oleh berbagai kalangan. Berikut disajikan pendapat guru tentang JTM ekuivalensi untuk berbagai kegiatan sekolah baik yang dapat dilakukan guru di tingkat internal maupun external sekolah.

Tabel 4. JTM Ekuivalensi Kegiatan Sekolah Berdasarkan Persepsi Guru

No	Kegiatan sekolah	n	JTM ekuivalensi			
			Min	Max	rerata	St. dev
<b>A Internal Sekolah:</b>						
1	Wali kelas	233	1	33	4,9	4,7
2	Guru piket	164	1	12	3,3	2,2
3	Pembina OSIS	142	1	12	4,0	2,5
4	Bendahara sekolah (OSIS)	92	1	24	6,5	5,0
5	Operator TIK	106	1	40	6,0	5,8
6	Pengasuh asrama	37	1	24	6,0	5,4
7	Pembina ekstrakurikuler	149	1	12	3,1	2,1
8	Pembimbing kegiatan kokurikuler	102	1	12	3,1	2,0
<b>B Eksternal Sekolah:</b>						
1	Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	57	2	12	4,0	2,0
2	Tim penilai penilaian kinerja guru	67	1	12	3,8	2,4
3	Guru bina SMP Terbuka	54	2	12	4,5	3,1
4	Guru pamong SMP Terbuka	58	1	12	4,8	3,0
5	Tutor program Paket B	41	2	12	4,7	2,9
6	Tutor keaksaraan dasar/fungsional	40	2	12	4,4	3,0
7	Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara) MGMP	68	1	12	4,1	2,1
8	Narasumber/guru inti/instruktur/ pengampu/mentor MGMP	66	1	12	5,1	2,9
9	Tim pengembang kurikulum pada MGMP	61	1	12	5,2	3,2
10	Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	52	2	12	4,8	2,9
11	Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	51	1	12	5,0	2,9

Dari tabel di atas terlihat ada kecenderungan bahwa guru-guru menginginkan seluruh kegiatan sekolah diekuivalensikan setara dengan JTM tertentu, hanya saja oleh karena kaitannya dengan kepentingan guru sehingga guru cenderung memberikan bobot yang tinggi. Dengan demikian maka persepsi guru ini tidak serta merta diadopsi namun perlu pendapat pihak lain yang kompeten agar JTM ekuivalensi yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan sekolah dapat diterima berbagai kalangan. Sebagai contoh adalah tugas sebagai wali kelas. Dalam Permendikbud 4/2015 tugas wali kelas ditetapkan sebagai tugas tambahan dengan bobot ekuivalensi 2 JTM per minggu, berbeda dengan pendapat guru dalam penelitian ini bahwa tugas wali kelas dinilai guru setara 4,9 JTM per minggu. Untuk itu memang perlu

dipertimbangkan dengan pendapat lainnya, sebelum ditetapkan menjadi tugas tambahan.

Jadi, sekolah-sekolah bervariasi dalam mengambil kebijakan pemenuhan beban kerja guru. Kebijakan yang dibuat umumnya disesuaikan dengan regulasi yang dibuat Pusat. Kepala sekolah umumnya mengutamakan pemenuhan beban kerja 24 JTM per minggu bagi guru-guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik. Dengan demikian, andaikata ada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, namun JTM tidak cukup tersedia di sekolah, maka mereka diprioritaskan mendapat tugas-tugas tambahan yang dapat diekuivalensikan dengan JTM tertentu. Andaikata tugas tambahan pun tidak mencukupi maka guru diberikan tugas untuk mengajar di sekolah lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Masalah yang masih dihadapi guru adalah perhitungan beban kerja guru yang hanya memperhitungkan dua dari lima tugas guru dalam rangka menetapkan beban kerja guru minimal yang harus dipenuhi untuk mendapat TPG. Dengan demikian banyak guru terkendala dalam pemenuhan beban kerja minimal 24 JTM per minggu. Tugas guru yang diperhitungkan hanyalah melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan tugas tambahan. Oleh karena ketersediaan jumlah tugas tambahan terbatas, maka guru terpaksa mengajar di sekolah lain untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal tersebut.

Strategi sekolah dalam memenuhi beban kerja guru adalah dengan mengutamakan menugaskan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar dapat memenuhi beban kerja minimalnya untuk mendapat TPG. Guru yang sudah bersertifikat pendidik diutamakan untuk mengajar minimal 24 JTM di sekolah Satminkal. Jika JTM-nya masih kurang maka guru akan diberi tugas tambahan yang diekuivalensi dengan JTM agar dapat terpenuhi beban kerja minimalnya. Jika memang sudah tidak ada pilihan lain barulah guru ditugaskan mengajar di sekolah lain, meski kadang berisiko bagi guru. Di sekolah swasta umumnya guru dilarang untuk mengajar di sekolah lain, kecuali sekolah lain itu juga menjadi binaan/milik yayasan. Untuk tetap berada di sekolah dan bekerja selama 37,5 JTM per minggu, guru diberi tugas tambahan untuk memenuhi beban kerja guru. Kegiatan-kegiatan guru yang belum diekuivalensi ditetapkan ekuivalensinya dan dilakukan oleh guru agar tetap dapat bekerja sehari-hari di sekolah dan bekerja 5 hari dalam seminggu. Guru tidak lagi memiliki waktu untuk mengajar di sekolah lain. Dengan begitu sekolah akhirnya dapat melaksanakan kebijakan LHS yang dicanangkan dalam Permendikbud 23/2017. Pembatalan Permendikbud tersebut kiranya perlu ditinjau kembali dengan membolehkan penyelenggaraan PPK dengan pola lima atau enam hari sekolah. Dengan demikian LHS dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan beban kerja guru minimal untuk mendapat TPG, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Rekomendasi

Bagi Pemerintah Pusat (Kemendikbud):

Perlu menerbitkan regulasi berupa tugas tambahan yang terekuivalen dan diakui sebagai unsur pemenuhan JTM, seperti tabel 5 di bawah. Dengan diformalkan tugas-tugas guru ini, maka guru-guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik yang mengajar di sekolah yang menyelenggarakan PPK baik dengan pola LHS atau 6 hari sekolah mendapat haknya untuk mendapat TPG.

Tabel 5. Kegiatan Guru yang Masih Perlu diekuivalensi dalam JTM tertentu dan Diformalkan

No	Jenis kegiatan	JTM ekuivalen per minggu	
		LHS	Non LHS
1	Menjadi wali kelas	4 JTM	2 JTM
2	Membina OSIS	2 JTM	1 JTM
3	Menjadi guru piket	maks. 7 JTM	1 JTM
4	Membina Ekskul: OSN, keagamaan, Pramuka, OR, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR	masing-masing 2 JTM	masing-masing 1 JTM
5	Menjadi tutor Paket A/B/C/C Kejuruan/ program pendidikan kesetaraan*)	-	maks. 6 JTM
6	Mengajar di sekolah lain*)	-	maks. 18 JTM
7	Remedial, pengayaan	masing-masing 2 JTM	masing-masing 1JTM
8	Administrasi**)	4 JTM	-
9	Penanggung jawab kegiatan PPK	2 JTM	1JTM
10	Staf kegiatan PPK	4 JTM	2JTM
11	Bendahara sekolah	2 JTM	2JTM
12	Operator TIK	6 JTM	3 JTM
13	Pengasuh asrama	6 JTM	3 JTM
14	Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)	4 JTM	2 JTM

No	Jenis kegiatan	JTM ekuivalen per minggu	
		LHS	Non LHS
15	Tim penilai penilaian kinerja guru	4 JTM	2 JTM
16	Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara) MGMP	4 JTM	2 JTM
17	Narasumber/guru inti / instruktur / pengampu / mentor MGMP	5 JTM	2,5 JTM
18	Tim pengembang kurikulum pada MGMP	5 JTM	2,5 JTM
19	Pengelola taman bacaan masyarakat (TBM)	5 JTM	2,5 JTM
20	Pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	5 JTM	2,5 JTM

\*) Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPK dengan pola LHS tidak ada JTM ekuivalensi karena guru tidak lagi memiliki waktu untuk mengajar di sekolah lain.

\*\*) Kegiatan administrasi meliputi menyusun RPP dan melakukan penilaian (penilaian sikap & karya siswa), mempersiapkan kegiatan awal tatap muka, dan membuat resume tatap muka

Perlu mempertimbangkan untuk menetapkan sekolah penyelenggara PPK, khusus untuk yang menyelenggarakannya dengan pola LHS agar dijadikan alternatif pemenuhan beban kerja guru sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendikbud 23/2017, karena guru-guru di sekolah ini sudah bekerja kurang lebih 37,5 JTM per minggu dengan mengerjakan lima jenis tugas guru sehingga guru tidak ada waktu lagi untuk mengajar di sekolah lain. Praktek baik di Kota Depok dapat dicontoh. Berikut ini disampaikan semacam konsep yang dapat menjadi alternatif pemenuhan beban kerja guru khusus bagi guru Mapel di SMP.

Tabel 6. Contoh Beban Kerja Guru di SMP dengan 3 Rombel dan menerapkan K-13

Guru Mapel	KBM <sup>1)</sup>	Admi-nistrasi	Kokuri. wajib (remedial)	Ekskul		Tugas tambahan		Total beban kerja
				Wajib (Pramuka)	Pilih-an	Wajib (guru piket)	Yang sudah diakui	
Agama dan Budi Pekerti	9	4	2	2		1	12 <sup>2)</sup>	30
PPKn	9	4	2	2	4 <sup>3)</sup>	1	2	24
B. Indonesia	18	4	2	2		1		27
Matematika	15	4	2	2	2	1		26
IPA	15	4	2	2		1	12 <sup>2)</sup>	36
IPS	12	4	2	2	2	1		25
B. Inggris	12	4	2	2	2	1		25
Seni Budaya	9	4	2	2	4 <sup>3)</sup>	1	2	24
Penjasorkes	9	4	2	2	2	1	4 <sup>3)</sup>	24
Prakarya	6	4	2	2	2	1	12 <sup>2)</sup>	29

Catatan:

1. Jumlah JTM minimal di SMP yang hanya memiliki 3 Rombel
2. Ditugaskan menjadi wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium
3. Mengerjakan dua kegiatan Ekskul atau dua tugas tambahan

**PUSTAKA ACUAN**

- Anggit F. 2017. Inilah 5 Tujuan Kemendikbud Tetapkan Aturan Sekolah 5 Hari dalam <http://hai.grid.id/Feature/Skulizm/Inilah-5-Tujuan-Kemendikbud-Tetapkan-Aturan-Sekolah-5-Hari>, diakses pada 18 September 2019.
- Anggraini R. 2018. Pengaruh Kegiatan Kokurikuler Dalam Mendukung Kegiatan Intrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Budi K. 2018. Strategi Jitu Kemendikbud agar Guru Mendapat Tunjangan Profesi dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2018/04/06/17070051/strategi-jitu-kemendikbud-agar-guru-mendapat-tunjangan-profesi?page=all>, diakses pada 15 Mei 2020.
- Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. Data Sekunder Guru PNS yang Mengajar di Dua Sekolah. *Soft File*.
- Fadhil A. 2011. Pengaruh Mutu Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Ekonomi Di SMA Negeri 14 Tangerang. Skripsi. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Tadris IPS (Ekonomi) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadhilah U.N. 2017. Mendikbud: Beban Kerja Guru Selama Ini Jadi Masalah. <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/07/12/osz69i-mendikbud-beban-kerja-guru-selama-ini-jadi-masalah>, diakses pada 12 Juli 2020.
- Fadhlyda R., Erlamsyah & Daharnis. 2014. Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Sawahlunto. *Jurnal Konselor Universitas Negeri Padang* Volume 3, 3, 100-105.
- Hardianto. 2018. Optimalisasi Kepuasan Kerja Guru. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana* Volume: 5, 2, 190-195.
- Hasnariah H. 2016. Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja dalam Perspektif Islam melalui Motivasi Kerja (Studi Pada Pondok Pesantren di Kota Makassar). Undergraduate (S1) thesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ikhsan, Zakso A., dan Wahyudi. 2013. Efek Beban Kerja, Pengalaman Kerja, Status Sekolah Dan Sertifikasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru Di SMA Kota Sambas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Pasca Sarjana AP, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak* Volume 2, 1, 1-14
- Indahri Y. 2017. Kebijakan Lima Hari Sekolah. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Volume IX, 13/1/ Puslit/Juli/2017, 9-12.
- Istiani H. 2017. Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan Beban Kerja Guru Pada Beberapa Mata Pelajaran Di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kamdi, W. 2014. Kinerja Guru SMK: Analisis Beban Kerja Dan Karakteristik Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Dan Kejuruan Universitas Negeri Malang*, Volume 37, 1, 1-12.
- Kartini D. dan Kristiawan M. 2019. Pengaruh Tunjangan Profesi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana* Volume 6, 1, 25-33.
- Lestari P. dan Sukanti. 2016. Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler Ekstrakurikuler, Dan *Hidden Curriculum* (di SD Budi Mulia 2 Pandean Sari Yogyakarta). *Jurnal Penelitian, STAINU Purworejo*, Volume 10, 1, 71-95.
- Muamar, Darmoko P.D., Srifariyati dan Muntoha. 2017. Dampak Tunjangan sertifikasi terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madaniyah*, Volume 1, XII, 21-45.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2015/2016.
- Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Evaluasi Dampak Bantuan Program *Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* (BERMUTU) kepada KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru. Laporan Penelitian.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Kajian Beban Kerja Guru (Formula Pemenuhan Beban Mengajar Berbasis Kompetensi Dan Kinerja Guru Dalam Menentukan Tunjangan Profesi Guru). Laporan Penelitian.
- Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Pedoman Pelaksanaan penilaian Kinerja Guru. Jakarta.
- Sinaga, D. 2016. Analisis Beban Kerja Guru Dalam Pembangunan Pendidikan Studi Kasus Di SMP Negeri Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun. *Jurnal Saung Guru Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*, Volume 8, 2, 138-163.
- Sudarsono. 2015. Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 3, 1, 111-116.
- Undang-Undang Republik Indonesia 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Yuliandri J. dan Tahrin. 2017. Tunjangan Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mewujudkan Guru Profesional. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP) Universitas PGRI Palembang* Volume 2, 1, 115-126.
- Yunita N.W. 2017. Kemdikbud: Manfaat Sekolah 5 Hari Tingkatkan Komunikasi Ortu & Anak dalam <https://news.detik.com/berita/d-3593746/kemdikbud-manfaat-sekolah-5-hari-tingkat-kan-komunikasi-ortu--anak>, diakses pada 4 Januari 2020.
- Yustinus J. 2016. Pengaruh Beban Kerja dan Tunjangan Khusus terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP, SMA Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kabupaten Sintang. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Wahyuni S. 2014. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Beban Kerja Guru Terhadap Kualitas Mengajar Guru Di SMP Muhammadiyah I Sragen. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.



#### **ABSTRACT**

*This study aimed to determine the effect of the inquiry-based learning model assisted by the Games Book media on the ability to understand science concepts in terms of the learning interests of elementary school students. The research was conducted in the odd semester of the 2019/2020 school year in grade IV of the Kampung Bali 07 Pagi Elementary School, Central Jakarta. The sample was selected using cluster random sampling technique, which resulted in 30 students of grade IVA as the experimental group and 30 students of grade IVB as the control group. This research was an experimental research using treatment by level 2 x 2. The data was analysed using the two-way ANOVA. The results showed: 1) There were differences in the ability to understand different concepts of science in students using Games Book assisted inquiry with students using expository. 2) There was an interaction between the learning approach and learning interest on the ability to understand science concepts. 3) Students who had high learning interest and used the inquiry method assisted by Games Book media had better understanding of the concept of science compared to students who learned using expository. 4) Students who had low learning interest and used the inquiry method assisted by Games Book media had poorer understanding of the concept of science compared to students who learned using expository.*

**Key words:** *inquiry, games book, science concept understanding*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis *inquiry* dengan bantuan media Games Book terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA ditinjau dari minat belajar siswa sekolah dasar. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kampung Bali 07 Pagi Jakarta Pusat. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, yang menghasilkan 30 siswa kelas IVA sebagai kelompok eksperimen dan 30 siswa kelas IVB sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan treatment by level 2 x 2. Teknik analisis data menggunakan ANAVA dua jalur. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA yang berbeda pada siswa menggunakan *inquiry* dengan bantuan media Games Book dengan siswa yang menggunakan ekspositori. 2) Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA. 3) pemahaman konsep IPA siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan menggunakan metode *inquiry* dengan bantuan media Games Book lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar menggunakan ekspositori. 4) pemahaman konsep IPA siswa yang memiliki minat belajar rendah dan menggunakan metode *inquiry* dengan bantuan media Games Book lebih rendah dibandingkan siswa yang belajar menggunakan ekspositori.

**Kata kunci:** *inquiry, games book, pemahaman konsep IPA.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan langkah awal dalam mengenyam pendidikan di Indonesia. Prosesnya sangatlah penting karena merupakan landasan dan pondasi awal untuk siswa sebelum memasuki tahap yang lebih tinggi. Prosesnya termasuk orientasi pembelajaran untuk melatih berbagai kemampuan dan nantinya dapat diterapkan dalam keseharian siswa. Salah satu mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Menurut Wisudawati (2014: 30), IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibatnya. Dalam kegiatan belajar mengajar IPA, siswa diarahkan untuk menjadikan lingkungan alam sekitar sebagai objek belajar. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan alam sekitar, bersikap ilmiah, dan mampu memaknai serta menerapkan konsep pembelajaran IPA di kesehariannya.

Pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan salah satu pembelajaran yang bertujuan menanamkan sikap peduli lingkungan sejak usia dini. Pembekalan sejak kecil ini diupayakan agar anak kelak terbiasa untuk menjaga lingkungan dalam kehidupannya dan dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wisudawati (2014: 22), IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual baik berupa kenyataan ataupun kejadian dan hubungan sebab akibat.

Menurut Widiana (2016: 824), IPA pada hakekatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. Oleh karena itu, menurut Marasabessy (2012: 8), pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan dengan metode *inquiry* ilmiah. Untuk mencapai pembelajaran secara *inquiry* ilmiah, pembelajaran yang dilakukan harus didukung oleh pengelolaan yang baik dan guru yang profesional. Dengan dikelola oleh guru profesional, nantinya akan tercipta berbagai pembaharuan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut yang kemudian memunculkan gagasan keterampilan yang harus dimiliki di abad ke 21 ini, menurut Kivunja (2015: 227), ada aspek 4C yang terdapat dalam kompetensi siswa abad ke 21 yaitu, *creativity, communication, critical thinking, and collaboration*. Empat aspek

tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk guru dan penggiat pendidikan dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia.

Sumantri (2014: 190), mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa adalah faktor guru. Sejalan dengan itu, Farren dalam Gunduz (2017: 1749) mengemukakan bahwa "*teachers play an important role in monitoring their students in this competency*". Selain itu, menurut Sumantri (2016: 75), guru SD memerlukan kemampuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondusif agar siswa termotivasi untuk lebih ingin mengetahui materi, senang bertanya, dan berani mengajukan pendapat, serta melakukan percobaan yang menuntut pengalaman baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa menjadi seorang guru bukanlah merupakan sebuah pekerjaan yang mudah, karena guru terutama guru SD harus menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, pemahaman konsep haruslah ditingkatkan. Menurut Hamdani (2016: 82), pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasikannya.

Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan seakan belum sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini dapat dilihat dari capaian hasil penilaian tengah semester mata pelajaran IPA 2019/2020 kelas IV di SDN Kampung Bali 07 Pagi. Dari total 70 orang siswa kelas IV-A dan IV-B, 60% siswa belum mencapai KKM. Ini menunjukkan bahwa yang sudah dinyatakan mencapai KKM yang ditetapkan masih kurang dari setengahnya (40% siswa).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekurangan capaian hasil belajar. Masalah tersebut tentu harus dapat ditanggulangi oleh guru, karena berhasil atau tidaknya proses pendidikan bergantung kepada strategi yang dilakukan dan diberikan oleh guru tersebut. Untuk itu, peneliti mencoba mengaplikasikan sebuah strategi dalam pembelajaran. Strategi tersebut diharapkan dapat menunjang kemampuan siswa dalam memahami dan memaknai pembelajaran.

Menurut Purwanto (2014: 51), pemahaman merupakan kemampuan menghubungkan fakta dengan fakta. Menurut Hamdani (2011: 151),

kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan menghubungkan fakta dengan memahami dan menerima dari pembelajaran dan dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemampuan pemahaman inilah yang nantinya akan menunjang siswa dalam pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Siswa sekolah dasar memiliki karakteristik pemahaman yang bersifat operasional konkrit. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Piaget (dalam Susanto, 2013: 77), "*Pada usia 7-11 tahun siswa sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya, serta berfikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkrit*".

Salah satu yang dapat dikembangkan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan proses pembelajaran melalui penggunaan model pembelajaran interaktif dan komunikatif. Artinya, desain pembelajaran yang mendorong peran aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran *inquiry* banyak dikembangkan oleh para tokoh pakar pendidikan diantaranya adalah Suchman (1962). Suchman meyakini bahwasannya anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu (Sirait, 2012: 254).

Hanafiah dalam Siti Masitoh (2016: 336) mengemukakan bahwa *inquiry* merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara optimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap serta keterampilan siswa.

Guru sebagai peneliti juga perlu memahami beberapa prinsip dan karakteristik untuk menganalisis beberapa hal penting yang mendukung terlaksananya pembelajaran *inquiry*, baik melalui pemanfaatan sumber belajar, media, strategi pembelajaran ataupun

teknik penataan manajemen kelas. Untuk itu, dalam melaksanakan model pembelajaran *inquiry* guru seyogyanya dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai salah satu cara melaksanakan model pembelajaran.

*Games Book* merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang dengan tujuan menyampaikan materi melalui konsep permainan (Rahmat, 2017: 29). Senada dengan hal tersebut, Rihadi (2018: 143) menyatakan bahwa media berbasis *Games Book* dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya.

Media alternatif ini menyajikan materi dalam bentuk permainan guna memberikan motivasi para siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Permainan tersaji dalam sebuah buku yang didesain berisi berbagai macam permainan yang variatif dan menantang. Setiap permainan relevan dengan tujuan pembelajaran serta berlandaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

*Games Book* menyajikan berbagai macam permainan yang disertai dengan petunjuk penggunaan dan tata cara penyelesaian masalah. Setiap permainan menyajikan berbagai persoalan dan pertanyaan terkait materi pembelajaran yang menuntut para siswa terlibat aktif untuk memecahkannya. Pemecahan masalah dilakukan baik dengan cara berkelompok, mandiri ataupun campuran. Pada hakikatnya, media ini menuntut adanya kerjasama antar siswa untuk dapat menyelesaikan setiap permainan.

Pada dasarnya media pembelajaran *Games Book* merupakan penunjang bagi model pembelajaran *inquiry* untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan siswa melalui kegiatan penemuan terstruktur, baik melalui tanya jawab, *open ended*, penelusuran berdasarkan referensi, maupun eksplorasi konsep pembelajaran melalui kegiatan langsung.

Hasil Penelitian Ratni Sirait (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media Gambar Berseri dengan persentase keberhasilan dari 40% siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal menjadi 97% siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal.

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran

dengan inovasi media inovatif khususnya dikembangkan dalam mata pelajaran IPA serta pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA ditinjau dari minat belajar siswa sekolah dasar. Penelitian ini diberi judul *“Pengaruh Model Pembelajaran inquiry dengan Bantuan Media Games Book terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep IPA Ditinjau dari Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar”* (Penelitian Eksperimen di Kelas IV SD Negeri Kampung Bali 07 Pagi Jakarta Pusat).

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dalam pembelajaran berpengaruh terhadap pemahaman konsep IPA ditinjau dari minat belajar siswa sekolah dasar? Bertitiktolak dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA yang diajarkan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dan kemampuan pemahaman konsep IPA yang diajarkan dengan ekspositori. 2. Mendeskripsikan interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA. 3. Menjabarkan perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa yang memiliki minat belajar tinggi dengan menggunakan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dan ekspositori. 4. Menjabarkan perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa yang memiliki minat belajar rendah dengan menggunakan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dan ekspositori.

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis yang didasarkan atas proses berfikir refleksi karena adanya suatu kebutuhan, masalah, dan pembuktian data lapangan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pendidikan, menambah wawasan tentang pentingnya penerapan model dan media pembelajaran serta memberikan informasi tentang pengaruhnya bagi hasil belajar. 2. Manfaat praktis yaitu menjadi dasar masukan saran bagi peneliti dalam memberikan pengalaman baru implementasi model dan media pembelajaran serta sebagai bahan masukan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan konsep model dan media pembelajaran secara komprehensif pada tahun-tahun berikutnya.

Keselman dalam Margus Pedaste (2015: 154) menyatakan bahwa

*“Inquiry-based learning is an educational strategy in which students follow methods and practices similar to those of professional scientists in order to construct knowledge.”*

Carol C Kuhthau (2007: 2) mempertegas bahwa

*“Inquiry is an approach to learning whereby students find and use a variety of sources of information and ideas to increase their understanding of a problem, topic, or issue. It requires more of them than simply answering questions or getting a right answer. It espouses investigation, exploration, search, quest, research, pursuit, and study.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, *inquiry* merupakan model pembelajaran yang menekankan pada proses siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan gagasan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah, topik, atau konsep materi pembelajaran melalui penyelidikan, eksplorasi, pencarian, penelitian, dan telaah sumber materi pembelajaran.

Menurut Brunner (Hosnan, 2014: 346), mengenalkan model *inquiry* mengarah pada pentingnya siswa untuk belajar menemukan, memecahkan masalah sehingga siswa mampu menemukan konsep secara mandiri.

Di antara beberapa model pembelajaran *inquiry* yang ada, model pembelajaran *guide inquiry* (terbimbing) merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang relevan diterapkan di sekolah dasar. Hal ini diperkuat alasan bahwa siswa sekolah dasar masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru.

Hudoyono dalam Markaban (2006:154) mempertegas bahwa

*“Dalam usaha menemukan suatu konsep siswa memerlukan bimbingan bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak. Siswa memerlukan bantuan untuk mengembangkan kemampuannya memahami pengetahuan baru. Walaupun siswa harus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetapi pertolongan guru tetap diperlukan.”*

Dalam mengembangkan model pembelajaran di kelas. Sumantri (2015: 165) menyatakan bahwa

*“Dalam mengajar, guru dapat mengembangkan model mengajarnya yang dimaksudkan sebagai upaya mempengaruhi perubahan baik dalam perilaku siswa, pengembangan model-model mengajar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar siswa.”*

Mulyasa (2012: 108) menyatakan bahwa model pembelajaran *inquiry* merupakan salah satu model pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan satu dengan penemuan lain.

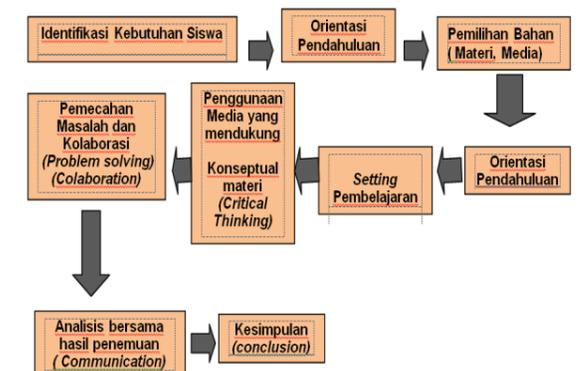
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwasanya *inquiry* merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Metode ini berfokus pada siswa aktif karena banyak hal yang dilakukan oleh siswa. Ini berarti konsep pembelajaran *inquiry* didasarkan pada siswa. Model pembelajaran *inquiry* menitikberatkan pada pembelajaran berpusat pada siswa, artinya pembelajaran berdasarkan hasil temuan siswa, hasil interaksi siswa serta hasil kreatifitas siswa dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, siswa lah yang memecahkan masalah, dan siswa lah yang mencari konsep sendiri berdasarkan temuannya baik dalam buku, pengamatan, dan uji coba.

Eruce dan Weil dalam Hosnan (2014: 346) menyatakan bahwa model pembelajaran *inquiry* dapat menambah pengetahuan sains, menghasilkan kemampuan berpikir kreatif, dan keterampilan dalam memperoleh suatu data atau konsep. Sedangkan Nasution (2005: 128), menyatakan bahwa model pembelajaran *inquiry* merupakan proses belajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menguji dan menafsirkan masalah secara sistematis yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Pada hakikatnya, pembuktian tersebut dapat dijadikan suatu strategi untuk mendapatkan suatu konsep materi pembelajaran.

Sanjaya (2006: 43) menambahkan bahwa model pembelajaran *inquiry* adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Sejalan dengan pendapat tersebut pada hakikatnya model *inquiry* menitikberatkan pada pembelajaran berbasis analisis dan pembuktian konsep melalui tindakan penggalan, pencarian dan pendalaman materi secara terstruktur melalui aktivitas kerja dan interaksi yang tepat.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, perlu diketahui beberapa tahapan (*syntax*) dari sebuah model pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran *inquiry* menurut Hamdayana (2014: 187) yaitu, 1) orientasi pembelajaran dan pemberian konsep dasar pembelajaran, 2) perumusan masalah, 3) perumusan hipotesis, 4) pengumpulan data, 6) pengujian hipotesis dengan tindakan pembelajaran, 7) perumusan kesimpulan, penarikan konsep dan kesimpulan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahapan dan alur pembelajaran *inquiry*, tahapan pembelajaran *inquiry* yang akan dipakai dalam penelitian ini dinyatakan dalam bagan pada Gambar 1



Gambar. 1 Bagan Tahapan Model Pembelajaran *Inquiry* Dengan bantuan Media *Games Book*.

Sebuah model pembelajaran dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan tujuan memperlancar proses pelaksanaan tahapan model pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran dengan model pembelajaran

*inquiry*, guru menyajikan bahan berupa media dan sumber ajar untuk dapat membuat siswa menemukan pemahaman secara sendiri dan mandiri.

*Games Book* merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang dengan tujuan menyampaikan materi melalui konsep permainan (Rahmat, 2017: 28). Senada dengan pendapat tersebut, Suyono (2018: 65) menyatakan bahwa *Games Book* merupakan inovasi pembelajaran melalui media buku sebagai konsepsi materi pembelajaran.

Sebuah gagasan dan media alternatif ini menyajikan materi dalam bentuk permainan untuk memberikan motivasi pada siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Permainan tersaji dalam sebuah buku yang dirancang berisi berbagai macam permainan yang variatif dan menantang. Setiap permainan relevan dengan tujuan pembelajaran serta berlandaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

*Games Book* menyajikan berbagai macam permainan yang disertai dengan petunjuk penggunaan dan tata cara penyelesaian masalah (Rahmat, 2017: 30). *Games Book* dibuat sebagai salah satu media pendukung pelaksanaan model pembelajaran *inquiry* yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran serta mampu mencari, menggali, melakukan penemuan konsep materi pembelajaran baik melalui diskusi antar siswa, tanya jawab, melihat buku sumber, sehingga diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang luas sesuai dengan tuntutan dan tujuan pembelajaran.

Pada implementasi *Games Book* dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), peran serta guru sangat diperlukan, guru mendesain permainan dengan semenarik mungkin baik dari segi warna, alat bahan menarik yang dipakai serta strategi yang digunakan dalam prosedur permainan. Pada hakikatnya *Games Book* didesain dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang nyata mengenai sebuah konsep materi yang akan disampaikan. Diharapkan media *Games Book* dapat memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa dalam mengimplementasikan serta mengefisienkan model pembelajaran *inquiry* sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan desain penelitian *treatment by level 2 x 2*. Menurut Wayne K. Hoy (2010: 16), "*experimental research is the ideal because there is more control over the factors that might confound the findings*". Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep IPA (Y). Pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu mencari pengaruh dari variabel perlakuan yaitu *brain based learning* dan ekspositori ( $X_1$ ) dan variable moderator yaitu minat belajar ( $X_2$ ).

Rancangan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan *treatment by level 2 x 2*

Variabel Atribut (B)	Variabel Perlakuan (A)	
	<i>inquiry</i> dengan bantuan media <i>Games Book</i> (A1)	Pembelajaran Ekspositori (A2)
Minat Tinggi (B1)	A1B1	A2B1
Minat Rendah (B2)	A1B2	A2B2

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kampung Bali 07 Pagi Jakarta Pusat. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV di SDN Kampung Bali 07 Pagi Jakarta Pusat sebanyak 60 siswa dari populasi 70 siswa. Menurut Walpole (2002: 196) *a sample is a subset of a population*. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan *simple random sampling*. Hasil pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas IV-A dan IV-B dengan jumlah sampel masing-masing 30 orang. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Waktu penelitian dilaksanakan 3 minggu dengan rincian: pra penelitian 1 minggu, pelaksanaan penelitian 1 minggu dan analisis, penelaahan pengumpulan alat bukti penelitian selama 1 minggu.

Teknik pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar IPA dan lembar angket minat belajar IPA. Teknik analisis data dilakukan dengan ANAVA 2 jalur yang menggunakan *treatment by level 2 x 2*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

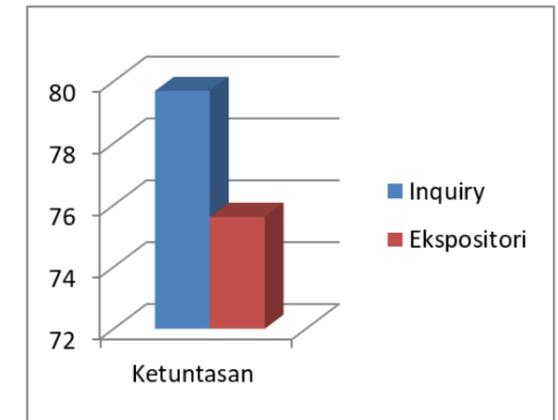
1. **Perbedaan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA yang Diajarkan dengan Model Pembelajaran *inquiry* dengan bantuan Media *Games Book* dan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA yang Diajarkan Dengan Ekspositori.**

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa ada perbedaan hasil kemampuan pemahaman konsep IPA yang dilaksanakan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dengan hasil kemampuan pemahaman konsep IPA yang dilaksanakan dengan ekspositori.

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* merupakan sebuah pembelajaran yang memaksimalkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Ketika pembelajaran berlangsung, guru harus bisa membuat siswa menjadi lebih mampu dalam memahami makna belajar. Pembelajaran yang dilaksanakan harus menyelaraskan aktivitas siswa dalam mencari dan menggali informasi melalui media permainan.

Sedangkan pembelajaran yang menggunakan ekspositori adalah cara yang dilaksanakan oleh guru dengan adanya ceramah, tanya jawab, dan penugasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan ekspositori lebih menitikberatkan kepada keterampilan guru dalam menjelaskan materi. Artinya, pembelajaran yang dilaksanakan berpusat kepada guru (*teacher centered*) bukan berpusat kepada siswa (*student centered*). Guru menjadi tokoh utama dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehingga siswa hanya berperan mengikuti arahan yang diberikan oleh guru.

Perbedaan antara kemampuan pemahaman konsep IPA yang diajarkan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dan kemampuan pemahaman konsep IPA yang diajarkan dengan ekspositori dinyatakan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Perbedaan Kemampuan Hasil Belajar IPA antara penerapan dengan *inquiry* dan Ekspositori

Walaupun kedua pendekatan memiliki keunggulan masing-masing, pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* terbukti memiliki nilai rata-rata yang lebih baik yaitu 79.69, dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas yang pembelajarannya dilaksanakan dengan pendekatan ekspositori yaitu 75.62.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa hasil kemampuan pemahaman konsep IPA yang dilaksanakan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* lebih tinggi dibandingkan hasil kemampuan pemahaman konsep IPA yang dilaksanakan dengan ekspositori.

Pada dasarnya media *Games Book* dijadikan sebagai alat bantu supaya model pembelajaran *inquiry* dapat dilaksanakan dengan baik. Media *Games Book* menyajikan berbagai permainan menarik yang memuat beberapa pertanyaan dan persoalan yang menantang dan interaktif mengenai materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai salah satu penunjang model pembelajaran yang diterapkan peneliti dalam proses pembelajaran IPA. Pada saat proses pembelajaran IPA berlangsung, media *Games Book* menyajikan berbagai permasalahan yang menunjang materi pembelajaran. Pertanyaan beragam mulai dari pertanyaan yang bersifat tantangan untuk diisi, pertanyaan yang perlu penelaahan berbagai

sumber referensi, pertanyaan yang perlu didiskusikan secara berkelompok, serta berbagai pertanyaan yang penyelesaiannya harus dibuktikan langsung oleh siswa dengan menggali sumber pembelajaran ataupun melalui diskusi, tanya jawab antar siswa, bahkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif.

## 2. Pengaruh Interaksi antara Pendekatan Pembelajaran dengan Minat Belajar terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep IPA.

Dari temuan penelitian diketahui bahwa interaksi mendapatkan nilai  $F_{hitung} = 7.24 > F_{tabel} = 4.20$ . Artinya, terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar memberikan efek terhadap perlakuan eksperimental yakni melalui model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* dan ekspositori. Efek tersebut selanjutnya mempengaruhi hasil kemampuan pemahaman konsep IPA.

## 3. Perbedaan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Tinggi dengan Menggunakan Model Pembelajaran *inquiry* dengan Bantuan Media *Games Book* dan Ekspositori.

Minat belajar merupakan salah satu aspek yang menunjang hasil pembelajaran. Minat belajar tinggi tentunya berpengaruh terhadap hasil belajar yang dihasilkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan menggunakan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* memperoleh nilai rata-rata sebesar 93.12. Sedangkan siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan menggunakan ekspositori memperoleh nilai rata-rata sebesar 83.75. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA.

Hal ini membuktikan bahwa siswa yang minat belajar tinggi dan berkombinasi

dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* menjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan siswa yang minat belajar tinggi dan berkombinasi dengan ekspositori.

## 4. Perbedaan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Rendah dengan Menggunakan Model Pembelajaran *inquiry* dengan Bantuan Media *Games Book* dan Ekspositori.

Model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* menjadi kurang berpengaruh apabila diberlakukan untuk siswa yang memiliki minat belajar rendah. Salah satunya, dikarenakan kondisi pembelajaran yang tidak mendukung. Hal tersebut membuat tidak maksimalnya kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Sehingga, hasil yang didapat tidak sesuai harapan.

Fakta yang didapatkan berupa rata-rata skor yang diperoleh siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* sebesar 66.25. Hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan ekspositori yaitu sebesar 67.5.

Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Model Pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* menjadi tidak begitu efektif jika dibandingkan dengan ekspositori pada kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu kepada hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dijabarkan sebagai berikut.

1. Implementasi model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* memiliki pengaruh yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspositori.
2. Ditemukan interaksi antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA.
3. Siswa dengan minat belajar tinggi yang belajar IPA menggunakan model

pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* memiliki pemahaman konsep IPA yang lebih tinggi daripada siswa yang belajar secara ekspositori.

4. Siswa dengan minat belajar rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* memiliki pemahaman konsep IPA yang lebih rendah daripada siswa yang belajar secara ekspositori.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dipaparkan sebelumnya, diajukan beberapa usulan kebijakan, antara lain: 1) Saran bagi pemerintah baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga/ Badan dan Dinas Pendidikan yang berada di bawahnya untuk dapat mengembangkan kompetensi guru melalui komitmen yang kuat terhadap program-program yang selama ini dilaksanakan. Hal ini perlu untuk meningkatkan profesionalitas dan inovasi guru dalam mengembangkan media dan strategi pembelajaran. Selain itu, sebagai apresiasi terhadap para praktisi guru yang sudah membuat kerangka pembelajaran inovatif, dapat diberikan wahana dan fasilitas untuk berbagi ilmu dan strategi inovasi pembelajaran serta diberikan hak atas media atau strategi inovasi yang dibuat melalui dorongan bantuan layanan pemberian sertifikat HAKI. 2) Saran bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah memberikan ruang dan wadah untuk dapat berbagi ilmu terkait pengembangan media dan strategi pembelajaran inovatif baik melalui seminar langsung ataupun virtual kepada rekan guru sejawat, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk implementasi pembelajaran inovatif di berbagai jenjang dan muatan pelajaran. 3) Saran bagi Satuan Pendidikan khususnya jenjang SD untuk dapat mempraktekkan model pembelajaran *inquiry* dengan bantuan media *Games Book* ini dalam proses pembelajaran di kelas.

## PUSTAKA ACUAN

- Carol C Kuhthau. (2007). *Guided inquiry: Learning in the 21st Century School*. London: Libraries Unlimited.
- Gst. Pt. Indra Yuda Dp. (2013). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Otak (Brain

Based Learning) terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri di Desa Sinabun. *Mimbar PGSD UNDIKSHA*. Vol. 1. No. 1.

- Gunduz, Nuket. (2017). Developing and Testing A Scale to Assess Teachers Attitude Toward Peer Mediation of Student Disputes. *Scientific Journal Publisher Limited*. 17-45.
- Hamdani, Dedy. (2016). Pengaruh Model Pembelajaran Generative Dengan Menggunakan Alat Peraga Terhadap Pemahaman Konsep Cahaya Kelas VII SMP Negeri 7 Kota Bengkulu. *Jurnal Exacta*. 82.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamdayana. (2014). *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hedger, Helen and Maria Cooper. (2016). *Inquiring Minds: Theorizing Children's Interest*. Vol. 48, No.3.H. 303-322.
- Hosnan. (2014). *Pendekatan Sainifik dan Kontekstual dalam pembelajaran abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jensen, Eric. (2008). *Brain Based Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Hoy, Wayne. (2010). *Quantitative Research In Education A Primer*. California: SAGE.
- Kivunja, Charles. (2015). Exploring the Pedagogical Meaning and Implications of the 4Cs "Super Skills" for the 21<sup>st</sup> Century through Bruner's 5E Lenses of Knowledge Contruction to Improve Pedagogies of the New Learning Paradigm'. *Creative Education*. Vol. 6 (1), 227.
- Marasabessy, Apriyadi. (2012). Analisis Pengelolaan Pembelajaran yang Dilakukan oleh Guru yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi pada Pembelajaran IPA di Kelas V Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Hlm: 8.
- Markaban. (2006). *Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Penemuan Terbimbing*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Matematika.
- Masitoh, Siti. (Desember 2016). Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi Inquiry

- Discovery Learning di Kelas IV SDN Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dasar UNJ*. Vol.7 Edisi 2.
- Mulyasa, E. (2012). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedaste, Margus. (2015). Phases of Inquiry-Based Learning: Definitions and the Inquiry Cycle. *Procedia - Educational Research Review*. Vol. 14, 47–61.
- Purwanto. (2014). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat. (2017). Games Book sebagai Media Peningkatan Minat Baca pada Pembelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas Tinggi. *Jurnal IJPE UPI*. Vol 1 No 1, 27-33.
- Renninger, K Ann. (2015). *Interest In Mathematics and Science Learning*. Washington: American Education Research Association.
- Rihadi. (2018). *Media dan Inovasi Belajar*. Bekasi: CV Asiaka Tarmana.
- Sanjaya, Wina. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sari, Norma Lita. (2016). Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning terhadap Penguasaan Konsep IPA. *Jurnal Pendidikan Mandala (JUPE)*. Vol. 1 No. 1.
- Sirait, Ratni. (Juni 2012). Pengaruh Model Pembelajaran *Inquiry Training* terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Usaha dan Energi Panas. *Jurnal Pendidikan Fisika UNIMED*. Vol.1 No.1,.
- Sumantri, Syarif. (2014). Pengaruh Umpan Balik dan Minat Profesi Guru terhadap Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*. 190-200.
- Sumantri, Syarif. (2016). Assesmen dan Intervensi Pedagogik dalam Membangun Generasi Emas Ditinjau dari Perspektif Pengembangan Kreativitas Siswa Kelas Awal Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*. 75.
- Suyono. (2018). *Games Book Sebagai Media Alternatif Pembelajaran Kontemporer di SD*. Bandung: ALFABETA.
- Tufekci, Serap. (2009). The Effect of Brain Based Learning on Achievement, Retention, Attitude, and Learning Process. *Procedia Social And Behavioral Sciences* 1. 1782–1791
- Walpole, Ronald E. (2002). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. New Jersey: Prentice Hall.
- Widiana, I Wayan. (2016). Pengembangan Asesment Proyek dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 824.
- Wisudawati, Asih Widi. (2014). *Metodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara.

**ABSTRACT**

*The healthy behavior of elementary school students at schools is still a problem, especially for elementary schools located around market areas. This study aimed to determine the healthy living behavior of elementary school students in schools around market areas. This was a quantitative research using survey as a method of data collection. The respondents were grade 4, 5, and 6 students from schools located around market areas. Data was collected via online questionnaire using google form, and then analyzed using descriptive statistic and inferential. The results showed that the mean score of healthy living behavior of elementary school students was 87,15 with 12,004 standard deviation, while the minimum and maximum scores were 51,11 and 114,35 respectively. A mean score of 87.15 meant that the score of healthy living behavior in elementary school students in schools had only reached 75.13 percent of the ideal maximum score that could be achieved. Most elementary school students (68.00 percent) had a medium score category of healthy lifestyle in schools, whereas for the high and low score categories both amount to 16.00 percent each. The score of healthy living behavior among elementary school students in schools around market areas showed differences in each indicators. The use of hygienic toilet had the lowest score followed by washing hands using soap, throwing garbage in the rubbish bin, and consuming healthy food and drinks. The mean score for male students was not significantly different from the mean score for female students. However, the mean scores for different grades (grade 4, 5, and 6) were significantly different. It could be concluded that the healthy living behavior of elementary school students in schools around market areas had not been satisfactory, since majority of students still scored in the medium category. Indicators that had not achieved good results were the use of hygienic toilets and washing hands using soap. The mean scores between the grades (Grades 4, 5, and 6) differed significantly, and the highest score were obtained by grade 4 students, followed by grades 5 and 6.*

**Key words:** *healthy living behavior, elementary school students, market*

**ABSTRAK**

Perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah masih menjadi persoalan, terutama bagi SD-SD yang berada di sekitar pasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Responden penelitian ini adalah siswa Kelas 4, 5, dan 6 SD di sekitar pasar. Pengambilan data dilakukan secara daring/*online* dengan kuesioner dalam format *google form*. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif dan inferensial. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah memiliki rata-rata skor 87,15 serta standar deviasi 12,004 dengan skor minimum 51,11 dan skor maksimum 114,35. Dengan rata-rata skor 87,15 berarti capaian perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah rata-rata baru mencapai 75,13 persen dari skor maksimum ideal yang dapat dicapai. Banyak siswa SD (68,00 persen) yang berperilaku hidup sehat di sekolah dalam kategori sedang, sedangkan kategori tinggi dan rendah sama banyaknya, yakni 16,00 persen. Capaian perilaku hidup sehat di sekolah menunjukkan perbedaan pada masing-masing indikator perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Indikator menggunakan jamban sehat berada pada posisi terendah diikuti mencuci tangan menggunakan sabun, membuang sampah di tempat sampah, dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Rata-rata skor siswa laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Rata-rata skor antar tingkat kelas (Kelas 4, 5, dan 6) berbeda secara signifikan. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar belum memuaskan karena

banyak siswa SD yang berperilaku hidup sehat di sekolah dalam kategori sedang. Indikator yang capaiannya belum baik adalah penggunaan jamban sehat dan mencuci tangan menggunakan sabun. Rata-rata skor antar tingkat kelas (Kelas 4, 5, dan 6) berbeda secara signifikan dengan skor tertinggi diperoleh siswa Kelas 4, kemudian kelas 5 dan 6.

**Kata kunci:** perilaku hidup sehat, siswa SD, pasar

## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mengingat pentingnya kesehatan, setiap orang berupaya untuk menjaga kesehatan dirinya. Salah satu upaya menjadi sehat melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Bahkan PHBS ini diatur dalam suatu regulasi, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS ini diterapkan di berbagai tempat, termasuk di sekolah dasar (SD). Hal ini penting guna membangun warga sekolah yang sehat, terutama siswa.

Faktanya, masih dijumpai beberapa kasus tentang kesehatan siswa di sekolah, seperti siswa mengalami keracunan di sekolah, antara lain: Kejadian di SDN Pasir Lancar 3 Kecamatan Sindangresmi, di mana puluhan siswa sakit setelah membeli jajanan di samping sekolah mereka. Gejala yang mereka alami adalah mual dan muntah-muntah (Redaksi, 2019). Kasus keracunan juga terjadi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang menimpa puluhan pelajar SD Negeri Tawangargo 2. Diduga, mereka mengonsumsi jajanan yang dibeli di dekat sekolah, sehingga mengalami mual dan muntah (Aminudin, 2019). Hal serupa dialami 30 siswa Sekolah Dasar Taruna Bangsa di Jalan Kayu Manis, Komplek Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Ciputat. Para siswa mengalami keracunan sehabis meminum susu kemasan (Kurnianto, 2018).

Kondisi kesehatan siswa di sekolah diperburuk dengan banyaknya sekolah yang belum memenuhi syarat kesehatan. Data Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020 juga menunjukkan bahwa baru sekitar 62,00% dari 208.361 sarana pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) yang memenuhi syarat kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2020). Hal tersebut terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di sekitar pasar, seperti pasar tradisional. Secara umum, ciri pasar tradisional adalah tidak adanya sistem/manajemen dalam proses penjualan dan biasanya identik dengan tempat yang bau, kumuh, becek dan kotor (Widodo & Watiningsih, 2020). Data Kemenkes tahun 2020 menunjukkan bahwa baru sekitar 73,32% pasar yang memenuhi syarat kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2020). Kondisi ini mendorong sekolah untuk menerapkan perilaku hidup sehat kepada siswanya. World Bank, WHO, UNESCO, dan UNICEF merekomendasikan tidak membangun sekolah dalam jarak dua mil dari fasilitas yang mengeluarkan bahan kimia beracun ke udara atau tanah, di tempat yang terkontaminasi, tempat yang berpotensi terkena banjir atau longsor, atau lingkungan yang sibuk dan bising (Wargo, n.d.).

Kurt Lewin dalam Holahan (1982) berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari manusia serta lingkungan (disebut teori interaksionisme). Lewin dalam Nurrachman dalam Soeparno & Sandra (2011) menyatakan bahwa kita memperoleh pengetahuan yang berguna, tetapi tidak lengkap jika hanya melihat dalam diri individu saja. Demikian halnya jika kita hanya melihat lingkungan individu saja. Kita harus melihat di dalam dan di luar individu bahwa kombinasi keduanya yang menentukan bagaimana serta mengapa kita berperilaku (Krupat, 1994 dalam Soeparno & Sandra, 2011). Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu (Alwisol, 2005). Albert Bandura mengemukakan hal berbeda dari pandangan interaksional. Pertama, model interaksional merepresentasikan hubungan lingkungan dan personal memiliki efek yang terpisah dan satu arah terhadap perilaku. Padahal, efek komponen-komponen lingkungan, psikologi dan perilaku saling berkaitan dan mempengaruhi. Kedua, model interaksional menggambarkan efek dengan arah yang sederhana, dengan input di satu titik dan output di titik lainnya. Faktor lingkungan (lingkungan fisik, struktur sosial, pola budaya) umumnya dipandang sebagai variabel bebas, faktor

psikologi dan kognisi (persepsi, pengetahuan, sikap, karakteristik personal dan latar belakang) sebagai variabel antara/mediasi, dan perilaku individu sebagai variabel terikat (Holahan, 1982).

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, seperti: berjalan, bekerja, berbicara (Notoatmodjo, 2007). Perilaku adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang dapat diamati, diukur, dan diulang (Bicard & Bicard, 2012). Menurut Ossorio dalam Bergner (2011), perilaku dijelaskan sebagai upaya pada bagian dari individu untuk melakukan perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain atau ke memelihara yang saat ini ada. Becker dalam Notoatmodjo, membuat klasifikasi tentang perilaku kesehatan, salah satunya adalah perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini mencakup antara lain: (1) makan dengan menu yang seimbang, (2) olahraga teratur, (3) tidak merokok, (4) tidak minum minuman keras dan Narkoba, (5) istirahat yang cukup, (6) mengendalikan stress, dan (7) perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Kemenkes dalam buku pedoman pembinaan PHBS menyatakan bahwa PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS dapat diterapkan di berbagai tatanan, seperti sekolah. PHBS di sekolah meliputi: (1) mencuci tangan menggunakan sabun, (2) mengonsumsi makanan dan minuman sehat, (3) menggunakan jamban sehat, (4) membuang sampah di tempat sampah, (5) tidak merokok, (6) tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), (7) tidak meludah di sembarang tempat, (8) memberantas jentik nyamuk, dan lain-lain (Kementerian Kesehatan, 2011).

Sementara itu, Taryatman mengemukakan indikator PHBS di sekolah sebagai proses pembentukan karakter, yang terdiri dari: (1) mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, (2) mengonsumsi jajanan

sehat dari kantin sekolah, (3) menggunakan jamban yang bersih dan sehat, (4) berolahraga teratur dan terukur, (5) tidak merokok di sekolah, (6) membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah, (7) memberantas jentik nyamuk, (8) menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, (9) memelihara rambut agar bersih dan rapi, (10) memakai pakaian bersih dan rapi, dan (11) memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih (Taryatman, 2016).

Dari indikator-indikator tersebut, tidak semua relevan dilakukan atau diterapkan sebagai PHBS siswa SD di sekolah. Dalam penelitian ini digunakan empat indikator yang sesuai untuk diterapkan dan dilakukan siswa SD di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu untuk diteliti bagaimana perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Pasar dalam penelitian ini adalah Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sementara itu, indikator perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah dalam penelitian ini berupa: (1) mencuci tangan menggunakan sabun, (2) mengonsumsi makanan dan minuman sehat, (3) menggunakan jamban sehat, dan (4) membuang sampah di tempat sampah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini dilakukan di dua SD sekitar pasar, yakni SD A dan B. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD sekitar pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yakni: SD A dan B dengan jumlah siswa sebanyak 1.792 siswa. Sampel penelitian adalah siswa kelas tinggi (Kelas 4, 5, dan 6), selanjutnya disebut responden. Menurut Djamarah dalam (Surya et al., n.d.), salah satu ciri siswa kelas tinggi adalah adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit. Variabel penelitian ini adalah perilaku hidup sehat siswa SD. Kuesioner dikembangkan berdasarkan 4 indikator, yakni: mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, dan membuang sampah di tempat sampah. Kuesioner memuat 29 pernyataan yang valid dengan cronbach's alpha 0,928. Pengumpulan data dilakukan secara daring/online. Data dikumpulkan dengan

kuesioner dalam format google form. Teknik analisis data dalam penelitian adalah statistik deskriptif (rata-rata skor dan standar deviasinya, skor minimum, serta skor maksimum) dan statistik inferensial berupa uji beda rata-rata (uji T dan Anova).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Responden yang mengisi kuesioner sebanyak 450 siswa. Jumlah responden SD A sebanyak 256 siswa dan SD B sebanyak 194 siswa. Responden laki-laki sekitar 47,11 persen dan perempuan sekitar 52,89 persen. Responden Kelas 4 sekitar 31,77 persen, Kelas 5 sekitar 34,01 persen, dan Kelas 6 sekitar 34,22 persen. Profil responden menurut jenis kelamin dan tingkat kelas disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Profil responden menurut jenis kelamin dan tingkat kelas, tahun 2020

Karakteristik		SD A	SD B	Total	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	122	90	212	47,11
	Perempuan	134	104	238	52,89
	Total	256	194	450	100,00
Tingkat Kelas	Kelas 4	82	61	143	31,77
	Kelas 5	89	64	153	34,01
	Kelas 6	85	69	154	34,22
	Total	256	194	450	100,00

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar memiliki rata-rata skor 87,15 serta standar deviasi 12,00 dengan skor minimum 51,11 dan skor maksimum 114,35. Rata-rata skor laki-laki terlihat lebih tinggi daripada perempuan. Rata-rata skor Kelas 4 lebih tinggi dibandingkan Kelas 5 maupun Kelas 6. Dengan rata-rata skor 87,15 berarti capaian perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah rata-rata baru mencapai 75,13 persen dari ideal maksimum skor (116) yang dapat dicapai. Dengan merujuk pada kategori skor menurut Azwar dalam Akhtar (2018), dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni: (1) rendah,  $X < M - 1SD$ , (2) sedang,  $M - 1SD < X < M + 1SD$ , dan (3) tinggi,  $M + 1SD < X$ , dimana  $M = \text{mean}$ ,  $SD = \text{standar deviasi}$  terlihat bahwa banyak siswa SD (68,00 persen) yang berperilaku hidup sehat di sekolah sekitar pasar dalam kategori sedang, sedangkan kategori tinggi dan rendah sama banyaknya, yakni 16,00 persen. Capaian perilaku hidup sehat di sekolah menunjukkan perbedaan pada masing-masing indikator perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Indikator menggunakan jamban sehat mencapai 57,00 persen dari skor ideal maksimum yang

dapat dicapai, berada pada posisi terendah dibandingkan tiga indikator lainnya. Indikator mencuci tangan menggunakan sabun mencapai 71,40 persen dari skor ideal maksimum yang dapat dicapai, sedangkan indikator membuang sampah di tempat sampah mencapai 79,51 persen dari skor ideal maksimum yang dapat dicapai. Adapun indikator mengkonsumsi makanan dan minuman sehat memperoleh capaian tertinggi yaitu 80,28 persen dari skor ideal maksimum yang dapat dicapai.

Perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa rata-rata skor perilaku hidup sehat siswa laki-laki ( $x = 86,43$ ) lebih rendah dibanding siswa perempuan ( $x = 87,80$ ). Perbedaan rata-rata skor ini setelah dilakukan uji t sampel bebas (*independent samples test*) menunjukkan tidak berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,227 > 0,05).

Perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar menurut tingkat kelas menunjukkan bahwa rata-rata skor perilaku hidup sehat siswa kelas 4 SD ( $x = 88,60$ ) lebih tinggi dibanding siswa kelas 5 SD ( $x = 87,66$ ) maupun kelas 6 SD

( $x = 85,29$ ). Perbedaan rata-rata skor ini setelah dilakukan uji analisis varian satu faktor (one way Anova) menunjukkan berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig. sebesar 0,048 < 0,05).

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar belum memuaskan karena banyak siswa SD yang berperilaku hidup sehat di sekolah dalam kategori sedang, belum mencapai kategori tinggi. Rendahnya capaian perilaku menggunakan jamban sehat (57,00 persen) diduga karena fasilitas jamban di sekolah yang belum memadai. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 menunjukkan bahwa kedua sekolah SD A dan B tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik untuk siswa (Tabel 2).

Demikian pula kondisi perilaku mencuci tangan menggunakan sabun. Masih kurang baiknya perilaku ini (71,40 persen) mungkin disebabkan belum memadainya fasilitas mencuci tangan yang disediakan sekolah. Padahal dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dinyatakan bahwa ruang kelas dilengkapi tempat cuci tangan.

Capaian perilaku membuang sampah di tempat sampah dan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat tergolong tinggi (berturut-turut 79,51 persen dan 80,28 persen) dimungkinkan karena tersedianya tempat buang sampah dan keberadaan kantin sekolah sehingga siswa tidak perlu jajan di luar sekolah.

**Tabel 2.** Jumlah dan Kondisi Sanitasi

Sekolah	Kondisi				Jml
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
SD A	0	7	0	0	7
SD B	0	2	0	0	2

Sumber Data: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>

Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SD yang berada di sekitar pasar. Ditinjau dari

aspek kelayakan, SD yang berada di sekitar pasar kurang memenuhi syarat sebagai lokasi sekolah. Terutama pasar tradisional yang lingkungannya bau, becek, kumuh, kotor (Widodo & Watiningsih, 2020), ketersediaan air yang tidak mencukupi, serta sistem pengelolaan sampah yang tidak baik sehingga menjadi sumber perkecambah penyakit dan menjadi alur penularan penyakit dari individu ke individu lainnya melalui kontak secara langsung atau tidak secara langsung (Efendi & Syifa, 2019).

Bahkan World Bank, WHO, UNESCO, dan UNICEF melarang sekolah berdiri di tempat seperti sekitar pasar. Dalam dokumennya, World Bank, WHO, UNESCO, dan UNICEF tidak merekomendasikan membangun sekolah dalam jarak dua mil dari fasilitas yang mengeluarkan bahan kimia beracun ke udara atau tanah; tempat yang terkontaminasi, tempat yang rawan banjir dan longsor, atau lingkungan yang sibuk dan bising (Wargo, n.d.).

Dengan demikian, sekolah yang berada di sekitar pasar perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih mengingat daerah sekitar pasar tidak layak bagi berdirinya sekolah karena akan mempengaruhi kesehatan warga sekolah, terutama siswanya.

Perilaku hidup sehat siswa di sekolah sekitar pasar tidak menunjukkan perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku hidup sehat siswa di sekolah sekitar pasar ditentukan oleh faktor lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

Menurut tingkatan kelas, terdapat perbedaan perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar. Rata-rata skor perilaku hidup sehat siswa Kelas 4 di SD sekitar pasar lebih tinggi dari pada siswa Kelas 5 maupun Kelas 6. Hal tersebut diduga karena siswa kelas 4 merupakan fase awal memasuki kelompok kelas tinggi sehingga masih terbawa karakteristik kelas rendah, yaitu sikap menurut kepada orang dewasa, seperti kepada guru. Djamarah dalam (Surya et al., n.d.) menyebutkan beberapa sifat siswa kelas bawah, antara lain: adanya korelasi positif yang

tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dan prestasi sekolah, adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan.

Di sisi lain, rentang usia siswa Kelas 5 dan 6 merupakan masa memasuki remaja. Perkembangan pada tahapan ini oleh banyak para ahli disebut dengan masa pancaroba atau labil. Ketidakstabilan ini disebabkan masa peralihan dari masa anak-anak memasuki masa pra-remaja sehingga keadaannya pun sering tidak jelas (ambigu). Dikatakan anak-anak, namun fisiknya sudah kelihatan bongor; tetapi dikatakan remaja pun, pemikirannya masih seperti anak-anak, dan setiap peralihan pun selalu menimbulkan gejala di dalam dirinya (Anshory et al., n.d.). Hal tersebut dapat menjelaskan capaian perilaku hidup sehat siswa kelas 4 yang lebih tinggi dibandingkan capaian kelas 5 dan 6.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perilaku hidup sehat siswa SD di sekolah sekitar pasar belum memuaskan karena banyak siswa SD yang berperilaku hidup sehat di sekolah dalam kategori sedang. Indikator yang capaiannya belum baik adalah penggunaan jamban sehat dan mencuci tangan menggunakan sabun. Rata-rata skor antar tingkat kelas (Kelas 4, 5, dan 6) berbeda secara signifikan dengan skor tertinggi diperoleh siswa Kelas 4, kemudian kelas 5 dan 6.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan perlu: (1) menerapkan perilaku hidup sehat siswa di sekolah sekitar pasar yang lebih ketat dengan monitoring secara berkelanjutan dan menerapkan *reward* dan *punishment* bagi sekolah; (2) meningkatkan penyediaan sarana prasarana sanitasi (jamban dan tempat mencuci tangan) yang memadai; (3) meningkatkan pemantauan pelaksanaan program perilaku hidup sehat siswa di sekolah sekitar pasar bagi kelas tinggi, terutama Kelas 6, 5, kemudian Kelas 4.

## PUSTAKA ACUAN

- Akhtar, H. (2018). *Cara Membuat Kategorisasi Data Penelitian dengan SPSS*. Semesta Psikometrika. <https://www.semestapsikometrika.com/2018/07/membuat-kategori-skor-skala-dengan-spss.html>
- Alwisol. (2005). *Psikologi Kepribadian* (Revisi). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aminudin, M. (2019). *Puluhan Pelajar SD di Malang Keracunan Jajanan Sekolah*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4735004/puluhan-pelajar-sd-di-malang-keracunan-jajanan-sekolah>. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4735004/puluhan-pelajar-sd-di-malang-keracunan-jajanan-sekolah>
- Anshory, I., Yayuk, E., & E, D. W. (n.d.). Tahapan dan Karakteristik Perkembangan Belajar Siswa Sekolah Dasar (Upaya Pemaknaan Development Task). *The Progressive and Fun Education Seminar*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7670/45.pdf?sequence=1>
- Bergner, R. M. (2011). What is behavior? And so what? *New Ideas in Psychology*, 29.
- Bicard, S. C., & Bicard, D. F. (2012). *Defining Behavior*. <https://iris.peabody.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/2013/05/ICS-015.pdf>
- Efendi, R., & Syifa, J. N. A. (2019). Status Kesehatan Pasar Ditinjau dari Aspek Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Pasar Ciputat dan Pasar Modern BSD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, Vol. 9(No. 3). <https://doi.org/10.33657/jurkessia.v9i3.179>
- Holahan, C. J. (1982). *Environmental Psychology*. Random House, Inc.
- Kementerian Kesehatan. (2011). *Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)*.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2019*.
- Kurnianto, M. (2018). *Jumlah Saksi Keracunan Susu di Tangerang Selatan Terus Bertambah*. <https://metro.tempo.co/read/1122548/jumlah-saksi-keracunan-susu-di-tangerang-selatan-terus-bertambah/full&view=ok>

<https://metro.tempo.co/read/1122548/jumlah-saksi-keracunan-susu-di-tangerang-selatan-terus-bertambah/full&view=ok>

Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Redaksi. (2019). *Puluhan Siswa SD di Pandeglang Diduga Keracunan Jajanan di Sekolah*. <https://www.bantennews.co.id/puluhan-siswa-sd-di-pandeglang-diduga-keracunan-jajanan-di-sekolah/>. <https://www.bantennews.co.id/puluhan-siswa-sd-di-pandeglang-diduga-keracunan-jajanan-di-sekolah/>

Sari, N. I., Widjanarko, B., & Kusumawati, A. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sebagai Upaya untuk Pencegahan Penyakit Diare pada Siswa di SDN Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. *Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4, Nomor 3.

Soeparno, K., & Sandra, L. (2011). *Social Psychology: The Passion of Psychology*. 19(1).

Surya, A., Sularmi, Istiyati, S., & Prakoso, R. F. (n.d.). Finding HOTS-Based Mathematical Learning In Elementary School Students. *SHEs: Conference Series 1 (1) (2018)*.

Taryatman. (2016). Budaya Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Dasar untuk Membangun Generasi Muda yang Berkarakter. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3, Nomor 1. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/trihayu/article/view/731/413>

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wargo, J. (n.d.). *The Physical School Environment: An Essential Component of a Health-Promoting School (Information Series on School Health, Document 2)*. The World Health Organization's.

Widodo, S., & Watiningsih, F. (2020). Peran Pasar Tradisional dan Pasar Kontemporer sebagai Karakteristik Bangsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Kota Tangerang Selatan. *Ilmiah Feasible: Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi*, 2. No.1.



**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effectiveness of the Operational Assistance Fund (BOP) for Early Childhood Education in 2019. The research method used in the study was descriptive analysis. Data was collected through secondary sources, distributing questionnaires online using Google forms, and Focus Group Discussion. The study was conducted in 12 regencies/cities both in Java and outside Java, selected using random sampling method. The selection criteria was areas receiving the largest, smallest, and average amount of BOP fund. The results showed that the BOP for the Implementation of Early Childhood Education in all sample regions was quite effective in helping operational costs, increasing learning activities, and alleviating the financial burden on parents, but the schedule for funds delivery was not timely and the use of funds was not in accordance with technical guidelines. Contribution of Operational Assistance Funds for Early Childhood Education for Playgroups was 59%, Similar Early Childhood Education Units were 56%, Kindergarten 33% and Child Care Centers by 29%. It can be concluded that the BOP fund in the Implementation of Early Childhood Education was quite effective in helping operational costs, increasing learning and alleviating the burden on parents, and contributing significantly to the operational costs of Early Childhood Education. However, the promptness of fund delivery in line with the schedule and the use of funds in accordance with the guidelines still need to be reviewed and improved.*

**Key words:** Effectiveness, PAUD, Utilization of PAUD BOP funds

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, penyebaran kuesioner secara online menggunakan *google form*, dan Diskusi Kelompok Terpumpun. Penelitian dilaksanakan di 12 wilayah kabupaten/kota di Jawa dan luar Jawa dengan metode *stratified random sampling* dengan kriteria jumlah wilayah penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan kategori besar, sedang dan kecil. Hasil penelitian menunjukkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di semua wilayah sampel cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa, namun penerimaan dana belum tepat waktu dan pemanfaatan dana juga belum sesuai dengan petunjuk teknis. Kontribusi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain sebesar 59%, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis sebesar 56%, Taman Kanak-kanak 33% dan Tempat Penitipan Anak sebesar 29%. Kesimpulan penelitian yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan pembelajaran dan meringankan beban orangtua, dan berkontribusi cukup besar dalam biaya operasional Pendidikan Anak usia Dini. Ketepatan waktu penerimaan dana dan kesesuaian penggunaan dana perlu mendapat perhatian.

**Kata kunci:** Efektivitas, PAUD, Pemanfaatan dana BOP PAUD

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya PAUD dalam tumbuh kembang anak. Indikasinya adalah semakin bertambahnya jumlah PAUD dan jumlah siswa pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Dapodik tahun 2019, jumlah satuan PAUD sebanyak 203.013, terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 93.024, Kelompok Bermain (KB) sejumlah 84.584, Tempat Penitipan Anak (TPA) sejumlah 2.988, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) sejumlah 22.417 satuan. Tren peningkatan jumlah PAUD untuk TK tahun 2015 yang berjumlah 86.868 kemudian tahun 2017 bertambah menjadi 92.035 dan tahun 2019 menjadi 93.024. Demikian pula untuk jenis PAUD lainnya untuk kelompok bermain (KB) tahun 2015 sebanyak 77.838 dan tahun 2019 bertambah menjadi 84.584. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya PAUD dengan memberikan pendidikan sejak usia dini guna memberikan rangsangan motorik agar anak-anak mereka berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya.

Keberadaan PAUD saat ini sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Data Dapodik tahun 2019 menunjukkan bahwa TK yang merupakan satuan PAUD terbanyak saat ini sebagian besar atau sebanyak 95,7% diselenggarakan oleh swasta. Banyaknya jumlah PAUD yang didirikan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses PAUD. Namun, keberadaan PAUD tersebut juga perlu dikontrol terkait dengan standar pelayanan minimal yang merupakan tuntutan standar layanan yang perlu diupayakan terus menerus. Hal itu perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan PAUD agar kualitas layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan usia emas (*the golden age*) merupakan yang terbaik mengingat perannya dalam

menumbuhkembangkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD patut dihargai. Pemberian dana-dana stimulus untuk penguatan kelembagaan, seperti *block grant*, dana rintisan dan dana stimulan lainnya telah menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk mendirikan PAUD. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan karena dapat meningkatkan akses layanan PAUD, tetapi hal ini juga akan merugikan apabila izin pendirian PAUD tidak mengacu pada syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku pada standar minimal, utamanya terkait dengan sarana-prasarana dan tenaga pengajar yang kompeten. Dengan demikian, masih diperlukan kontrol terhadap kualitas dari setiap PAUD yang akan didirikan.

Seiring dengan tingginya minat masyarakat pada satuan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memperluas layanan PAUD berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan akses PAUD. Melalui dukungan pemerintah Pusat, Daerah, serta masyarakat, diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat meningkat pada setiap tahunnya. Di tahun 2017/2018, APK PAUD mencapai 74,28%, (Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Hal ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan PAUD agar dapat diakses oleh masyarakat luas dengan biaya murah, salah satunya dengan memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). Tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD). Jumlah tersebut naik 10% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp 4,07 triliun. Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.

Peningkatan anggaran BOP PAUD tahun 2019 juga disertai dengan perubahan mekanisme penyaluran dana. Jika pada tahun 2018 menggunakan satu tahap penyaluran, pada tahun 2019 menggunakan dua tahap

penyaluran. Dengan perubahan mekanisme menjadi dua tahap penyaluran diharapkan program BOP PAUD menjadi lebih baik.

Hasil survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 terkait pelaksanaan program PAUD menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: 1) pengetahuan dan pemahaman satuan PAUD terhadap petunjuk teknis BOP PAUD masih rendah, 2) sosialisasi batas waktu melengkapai data pada operator masih kurang, dan 3) kesulitan dalam pemanfaatan dana BOP PAUD. Permasalahan tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penerimaan dana, pemanfaatan dana, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di PAUD.

Sementara dari hasil penelitian Subagyo Rahayu tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di TK negeri di Kabupaten Sleman tahun 2019 (STIE Widya Wiwaha, 2019) menunjukkan bahwa terkait dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga, tahap pelaksanaan belum sesuai dengan juknis BOP PAUD. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi program BOP PAUD pada TK negeri di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana ketepatan waktu penerimaan dana BOP di satuan PAUD? 2) bagaimana pemanfaatan dana yang dilakukan oleh satuan PAUD? 3) bagaimana dampak BOP PAUD dalam pembelajaran? dan 4) bagaimana kontribusi BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD?

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas BOP PAUD terkait dengan 1) ketepatan waktu penerimaan, 2) pemanfaatan dana, 3) dampak BOP dalam penyelenggaraan PAUD, dan 4) kontribusi BOP dalam biaya penyelenggaraan PAUD.

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan dan

pertumbuhan anak baik secara jasmani maupun rohani, sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Martinis Yamin & Jamilah, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14).

Tujuan PAUD secara khusus, yaitu (1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, (2) mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan (Trianto, 2011).

Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB) dan taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis (SPS) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

### 2. Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini

Menurut para ahli terdapat empat aspek perkembangan anak usia dini yaitu perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, dan perkembangan bahasa.

#### a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik ditandai dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Anak dapat mengalami perkembangan tinggi

badan 6 cm dan berat badan 2-kg pertahun. Namun, pola pertumbuhan anak bervariasi secara individual, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan, defisiensi hormon pertumbuhan dan masalah fisik yang terjadi pada masa kanak-kanak (Santrock (2011). Perkembangan tinggi dan berat badan juga diiringi oleh perkembangan otak, motorik kasar, dan motorik halus.

#### 1) Perkembangan otak

Pertumbuhan fisik otak mencapai 50% pada usia 2 tahun, dan 90% pada usia 6 tahun, dan mencapai pertumbuhan optimalnya (100%) pada usia 12 tahun. Sedangkan untuk perkembangan intelektual otak mencapai 50% pada usia 4 tahun, mencapai 80% usia 8 tahun, dan kondisi optimal perkembangan intelektual tercapai pada usia 18 tahun (Keith Osborn, Burton L. White, dan Benjamin S. Bloom (dalam Jamaris, 2013).

Jaringan sel otak (sinapsis) anak berusia 3 tahun, jumlahnya trilyunan, jaringan yang jarang digunakan akan mati, sedangkan yang sering digunakan akan semakin kuat dan permanen Suyadi (2010). Sel-sel otak berkembang mengikuti pengalaman, oleh sebab itu, anak perlu diberikan berbagai rangsangan (stimulus) dan memfasilitasi perkembangan agar otak dapat tumbuh optimal (Masnopal, 2013:80). Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan otak: a) faktor genetik; menentukan ukuran, struktur dan konektivitas saraf, meskipun berbeda masih dapat berfungsi normal, hanya perbedaan genetik tertentu yang bisa mengakibatkan ketidaknormalan, b) stimulasi lingkungan, c) nutrisi, d) steroid, sekelompok hormon dan d) teratogen, zat asing misalnya alkohol dan virus yang dapat menyebabkan ketidaknormalan pada janin (Byrnes dalam Schunk, 2012: 69).

#### 2) Motorik kasar

Motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau keras, semakin anak bertambah dewasa dan kuat tubuhnya, maka gaya geraknya semakin sempurna (Laura E. Ber dalam Suyadi, 2010). Contoh gerakan motorik kasar adalah melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat, melempar dan sebagainya.

#### 3) Motorik halus

Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat (Bambang Sujiono, 2012). Motorik merupakan gerakan yang menggunakan gerakan otot-otot halus atau anggota sebagian tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Gerakan itu misalnya menindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menggunting, melipat kertas, menulis dan lain-lain (Siti Aisah dkk, 2011) Kesimpulannya, perkembangan motorik halus adalah perkembangan fisik-motorik jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf dan otot yang terkoordinasi dalam melakukan suatu gerakan melalui belajar dan berlatih.

#### b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif terdiri atas dua bidang, yakni logika-matematika dan sains. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif, anak dilatih meningkatkan pengertian pada bilangan, menemukan hubungan sebab akibat dan meningkatkan kemampuan berpikir logis (Suyadi, 2010). Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Proses berpikir yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa (Ahmad Susanto, 2011). Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelejensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar.

#### c. Perkembangan Sosio-Emosional

Perkembangan sosio-emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (Suyadi, 2010). Untuk dapat mengembangkan atau mencerdaskan sosio emosional anak, diberikan stimulus melalui permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan sosio emosional anak. Pola perkembangan sosio emosional anak usia dini di antaranya: takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan kegembiraan.

Nilai-nilai yang ditanamkan agar sosio-emosionalnya tumbuh dan berkembang dengan baik, di antaranya: a) mengembangkan empati dan kepedulian, b) menanamkan sikap optimis yang merupakan hasil kebiasaan berfikir positif, c) memberikan kebebasan terhadap anak untuk memecahkan masalah, dan d) menumbuhkan motivasi.

#### d. Perkembangan Bahasa

Kemampuan berbahasa anak berkembang pesat pada masa prasekolah. Anak belajar bahasa secara intuitif tanpa banyak instruksi. Hasilnya adalah terus bertambahnya kosakata, jumlah kata yang diketahui anak, dan penggunaan kalimat yang panjang, serta tata bahasa yang terus berkembang (Morrison, 2008).

Tahapan perkembangan bahasa anak prasekolah sebagai berikut: a) Memahami fonologi dan morfologi; anak lebih sensitif terhadap bunyi bahasa lisan. Dalam morfologi, anak bisa diajarkan kata baru tanpa pengetahuan sebelumnya. b) Perubahan dalam sintaksis dan semantik; anak dapat menyusun kata bersamaan dengan perkembangan kosakatanya. c) Kemajuan dalam pragmatik; anak dapat mengubah gaya bicara sesuai situasi. d) Kemampuan membaca (Santrock 2011).

#### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik BOP PAUD

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Sesuai dengan fokus PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, yang menjadi prioritas adalah anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Alasan pentingnya BOP bagi PAUD ialah sebagai berikut: a) Alasan pendidikan; PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. b) Alasan ekonomi; PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. c) Alasan sosial; PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. d) Alasan hak/hukum; PAUD merupakan hak setiap anak

untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang (UNESCO dalam Rahayu Nur'aini, 2015).

Dalam petunjuk teknisnya, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD.
- d. Adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan anak usia dini.
- e. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- g. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Sasaran program DAK Non-fisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas). Penggunaan DAK Non-fisik BOP PAUD mencakup tiga komponen yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Penggunaan tiga komponen tersebut telah ditentukan dalam juknis dengan besaran presentasi yaitu minimal 50 persen untuk kegiatan pembelajaran dan bermain; maksimal

35 persen kegiatan pendukung; dan maksimal 15 persen untuk kegiatan lainnya.

Dana BOP PAUD digulirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu PAUD, karena mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak lembaga dalam menciptakan anak didik yang berkualitas (Rahayu, 2015). Sekolah/lembaga dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah/ lembaga tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya.

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah/lembaga dalam menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah/lembaga yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah/lembaga akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang berusia di bawah umur 6 tahun. Menurut Muhson (dalam Rahayu 2015), peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali.

Evaluasi dana BOP PAUD mengacu pada ketentuan pendanaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan (biaya personalia dan biaya nonpersonalia), biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Data yang digunakan untuk menganalisis kajian efektivitas dana BOP PAUD bersumber dari jumlah anak usia dini yang terlayani dan jumlah dana BOP PAUD yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat. Pengalokasian besaran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun (Petunjuk teknis BOP-PAUD 2019).

#### 4. Efektivitas Program

Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi (Gibson et.al dalam Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, 2013). Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka dinilai semakin lebih efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Efektivitas juga dimaknai sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran (Etzioni, dkk dalam Hamzah, 2013). Dalam pandangan ini, jika suatu program telah mencapai target sesuai tujuan yang diharapkan, dapat dikatakan sudah efektif. Efektivitas juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Komaruddin, 2010). Pada dasarnya, dalam memaknai efektivitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam suatu program kegiatan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Emerson).

#### 5. Penelitian Terkait

- a. Waluyo Basuki, dkk, Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018. Hasil penelitian Program DAK Non-fisik BOP PAUD membantu lembaga PAUD dalam pemenuhan biaya operasional non-personalia. Penggunaan dana sebesar 60% digunakan untuk biaya operasional dan 40% digunakan untuk biaya non-operasional. BOP PAUD meringankan beban orang tua. Penerimaan BOP tidak tepat waktu.
- b. Emilda Sulasmi, *Evaluation of the Operational Assistance Management Funding Program (BOP) at The Bengkulu City PAUD Institution*. Hasil penelitian menyatakan bahwa BOP tepat sasaran dalam membantu meringankan beban orang tua, BOP meningkatkan mutu PAUD, dan penyaluran dana sesuai juknis.
- c. Erfy Melani Lalupanda: Evaluasi Implementasi Program BOP PAUD. Hasil penelitian di antaranya adalah terdapat kesenjangan pada implementasi program BOP PAUD pada proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggung jawaban.
- d. Felayati dan Yaswinda; Penerapan Model Evaluasi CIPPO dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD: Hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Menteri No.146 dan No. 137 tahun 2014 menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah terlaksana namun belum optimal, utamanya pada bagian sarana prasarana pendidikan.
- e. Florentina Reni Swastika, Indarja, Amiek Soemarmi; Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar (Studi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini). Penelitian ini menyatakan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan, dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan

dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis BOP PAUD.

- f. Fitriani, Jauhar Arifin, Rahmi Hayati; Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan di Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Pamarangan Kiwa. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penggunaan dana BOP sudah efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel, kepatutan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua anak-anak dan orang tua murid.
- g. Ika Nurul Qamari, Leli Joko Suryono; Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program BOP membantu dalam peningkatan kualitas layanan PAUD.

#### METODE PENELITIAN

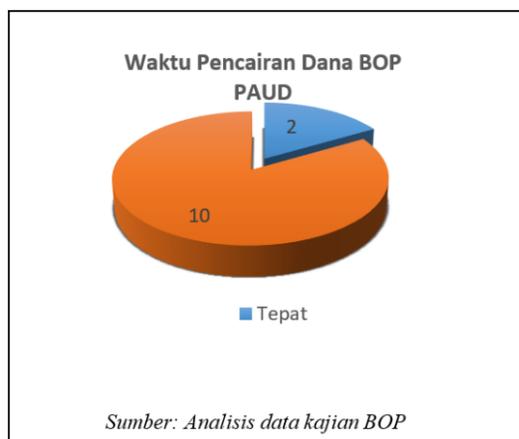
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh jenis layanan PAUD yang telah memperoleh dana BOP minimal 2 tahun (2018 dan 2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 1106 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden dalam penelitian adalah kepala satuan lembaga PAUD atau pengelola BOP. Data dijaring melalui teknik penyebaran angket yang disebarluaskan secara online melalui *google form* dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Data kuantitatif terkait dengan ketepatan dan mekanisme penerimaan BOP PAUD, penggunaan atau pemanfaatan dana BOP PAUD, dampak BOP, dan kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan lembaga PAUD. Sementara untuk data kualitatif, pendalaman data dilakukan dengan diskusi kelompok terpumpun (DKT) di 12 daerah dengan metode *stratified random sampling* dengan kriteria jumlah penerimaan BOP (kecil, sedang, dan besar). Narasumber yang terlibat berasal dari Dinas Pendidikan, pengelola PAUD, dan pengawas PAUD, dan topik diskusi terkait dengan ketepatan penerimaan dana, pemanfaatan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kuantitatif sebagai metode utama dan metode kualitatif menjelaskan dan mendukung lebih dalam hasil dari analisis terhadap data kuantitatif (Creswell dalam Sugiyono, 2011:409). Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketepatan Waktu Penerimaan Dana BOP PAUD

Ketepatan waktu pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 di 12 wilayah sampel secara umum tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akurasi data siswa tidak sesuai, yaitu antara data saat pengajuan dengan data pada masa pencairan dana, proses administrasi dan birokrasi di daerah yang memerlukan banyak pengesahan, pergantian pejabat di daerah, dan peraturan daerah terkait dengan dana hibah. Terkait dengan permasalahan tersebut diperlukan sinkronisasi antara operator data dapodik dan pihak-pihak terkait di daerah.



**Gambar 1.** Persepsi Ketepatan Waktu Pencairan Dana BOP PAUD

Keterlambatan pencairan dana sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan PAUD. Untuk menutupi keterlambatan dana BOP PAUD,

para pengelola PAUD banyak mencari pinjaman agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan, karena dana BOP merupakan dana andalan dalam penyelenggaraan PAUD. Akibat lainnya dari keterlambatan pencairan dana BOP PAUD adalah dampak pada surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOP yang hanya diberikan 2 minggu setelah dana BOP cair dan diterima, sehingga hal ini cukup menyulitkan.

Untuk besaran dana BOP, secara umum dana yang diterima oleh lembaga telah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di satuan PAUD yaitu sebesar Rp. 600.000,- per peserta didik. Jika ada perbedaan jumlah peserta didik dengan jumlah yang diterima, hal tersebut dialami oleh sebagian kecil lembaga yang disebabkan karena data terbaru jumlah peserta didik belum diperbaharui dalam sistem dapodik sehingga pada saat *cut off data* sebagai dasar pencairan dana masih menggunakan data lama. Kendala lain adalah operator dapodik PAUD umumnya masih banyak yang merupakan tenaga bantuan dari Dinas Pendidikan. Selisih dana antara jumlah siswa dengan yang diterima ini umumnya tidak banyak, hanya dua sampai tiga siswa saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran karena masih dapat ditutupi dengan subsidi silang dari sumber dana lainnya, terutama dari iuran bulanan dari orang tua siswa.

Perhitungan pencairan dana BOP didasarkan pada jumlah peserta didik yang tercatat dalam data pokok pendidikan PAUD per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya. Hal ini kurang tepat karena rawan menimbulkan ketidaktepatan jumlah siswa dengan penerimaan dana yang diakibatkan terdapatnya selisih jumlah siswa pada suatu satuan PAUD. Dengan demikian akan lebih akurat jika dasar pemberian dana BOP adalah data jumlah siswa pada awal tahun ajaran yang sedang berlangsung.

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Basuki, dkk (2019) yang menyatakan bahwa penerimaan BOP tidak tepat waktu. Jika dilihat kesesuaian dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2019, keterlambatan pencairan menjadi tidak sesuai dengan prinsip penggunaan dana BOP yaitu efisien dan efektif. Ketidaksesuaian dengan kedua prinsip ini karena keterlambatan dana ini menyebabkan tidak tercapainya sasaran

yang telah ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan dalam RKS. Selain itu manfaat yang dicapai tidak optimal sesuai dengan rencana, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan selama BOP belum cair. Hal tersebut menjadikan BOP tidak efektif dalam membantu operasionalisasi penyelenggaraan PAUD.

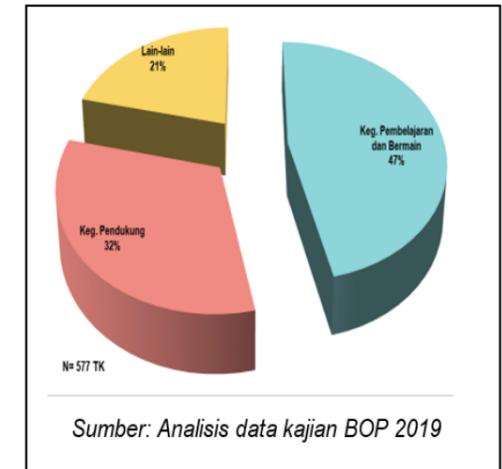
### B. Pemanfaatan Dana BOP PAUD

Pemanfaatan dana BOP PAUD secara umum untuk semua satuan PAUD belum sesuai dengan petunjuk teknis, baik untuk TK, KB, SPS, maupun TPA. Pada petunjuk teknis BOP PAUD tahun 2019 disebutkan dana BOP untuk kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50%, kegiatan pendukung maksimal 35%, dan kegiatan lainnya maksimal 15%. Lebih lanjut disampaikan pemanfaatan dana BOP pada masing-masing satuan PAUD sebagai berikut.

#### 1. Pemanfaatan Dana BOP di Taman Kanak-kanak

Pemanfaatan dana BOP untuk komponen kegiatan pembelajaran dan bermain di TK rata-rata hanya sebesar 47 %, lebih kecil jika dibandingkan dengan juknis yang minimal 50%. Dari 47% untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, sebesar 29% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, dan Alat Permainan Edukatif (APE) 21%. Untuk kegiatan pendukung, proporsi dana yang digunakan sebesar 32% sedangkan pada juknis yaitu sebesar maksimal 35%. Sedangkan untuk kegiatan lainnya realisasi pemanfaatan sebesar 21%, sedangkan di juknis maksimal hanya 15%.

Ketidaksesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan riil yang ada di TK dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya untuk komponen honor guru yang belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak TK swasta menambah transpor guru menggunakan komponen lain-lain yang dapat dialokasikan untuk menambah honor guru. Sementara untuk kegiatan pembelajaran banyak TK swasta kecil menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sehingga biayanya dapat ditekan.

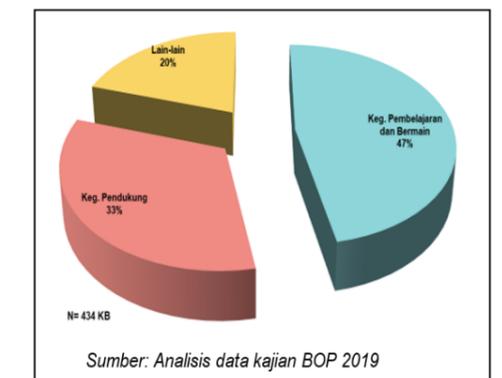


**Gambar 2.** Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di TK

Kondisi ini perlu kiranya mendapat perhatian baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar memberikan tambahan honor guru, mengingat honor guru TK khususnya guru-guru TK swasta kecil, masih sangat rendah.

#### 2. Pemanfaatan Dana BOP di Kelompok Bermain

Pemanfaatan dana BOP untuk Kelompok Bermain juga hampir sama dengan di TK. Pemanfaatan pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 47%, lebih kecil dari petunjuk teknis yang seharusnya minimal 50%. Pemanfaatan dana untuk kegiatan pendukung sebesar 33%, sedangkan di petunjuk teknis yaitu maksimal 35%. Untuk kegiatan lainnya, dana yang dimanfaatkan lebih besar dari petunjuk teknis yakni 20%, sementara pada petunjuk teknis maksimal sebesar hanya 15%.

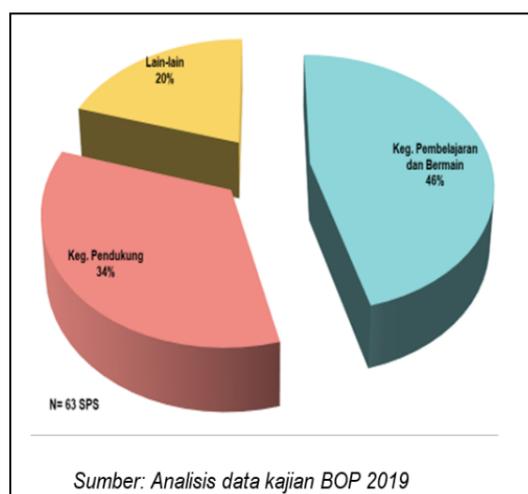


**Gambar 3.** Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di KB

Ketidaksesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di KB dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya untuk komponen honor guru sama dengan di TK yang belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak satuan KB untuk menambah transpor guru menggunakan komponen lain-lain yang dapat dialokasikan untuk menambah honor guru. Untuk kegiatan pembelajaran dapat dikurangi banyak dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan yang biayanya lebih murah.

### 3. Pemanfaatan Dana BOP di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)

Pemanfaatan dana di Kelompok SPS untuk komponen pembelajaran dan bermain juga lebih kecil jika dibandingkan dengan di petunjuk teknis yakni sebesar 46%, sementara pada juknis minimal 50%. Untuk kegiatan pendukung, pemanfaatannya sebesar 34%, sedangkan di juknis maksimal 35%. Sementara untuk kegiatan lainnya lebih besar dari juknis yakni sebesar 20%, sementara di petunjuk teknis minimal 15%.



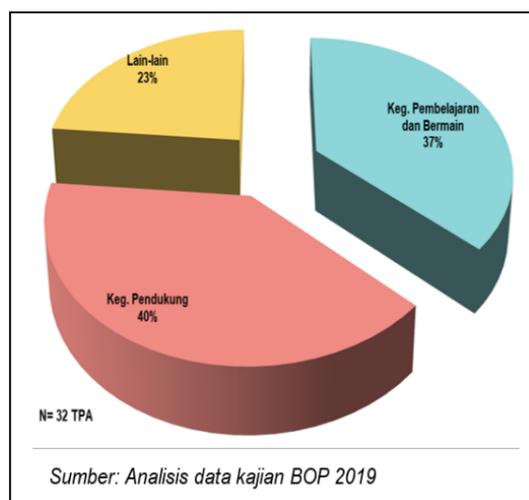
**Gambar 4.** Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di SPS

Ketidaksesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di SPS dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya pada komponen honor guru sama dengan di TK dan KB yang selama ini belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak satuan SPS untuk menambah transpor guru menggunakan komponen lain-lain. Untuk

kegiatan pembelajaran SPS tidak setiap hari ada kegiatan belajar sehingga biaya kegiatan pembelajaran dapat dikurangi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan yang biayanya lebih murah.

### 4. Pemanfaatan Dana BOP di TPA

Pemanfaatan dana BOP untuk TPA pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 37% lebih kecil dari juknis yang sebesar minimal 50%. Dari jumlah itu sebanyak 48% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, APE 33% dan penyediaan alat 19%. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 40%, lebih besar dari juknis maksimal 35%. Sementara untuk kegiatan lain-lain sebesar 23% sementara di juknis maksimal 15%.



**Gambar 5.** Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di TPA

Banyaknya penggunaan dana BOP di satuan PAUD belum sesuai dengan juknis dikarenakan pada juknis penggunaan sangat mengikat dan bentuknya seragam, sedangkan kebutuhan satuan PAUD pada masing-masing lembaga berbeda, misalnya untuk pembelian APE PAUD yang sudah mempunyai APE tidak akan dibelikan APE lagi karena jumlahnya sudah banyak sehingga dialihkan ke hal lain yang lebih bermanfaat. Demikian pula untuk obat-obatan jika masih tersedia juga tidak dibelikan lagi dan dialihkan pada hal lainnya, seperti untuk tambahan honor guru yang dirasa masih sangat kurang.

Pemanfaatan dana BOP dari seluruh satuan PAUD belum sesuai dengan petunjuk teknis, khususnya untuk komponen pembelajaran dan bermain dan komponen lain-lain. Untuk komponen pembelajaran dan bermain lebih kecil dari juknis, sementara untuk komponen lain-lain lebih besar dari juknis. Belum sesuai antara pemanfaatan dana dengan juknis disebabkan oleh kebutuhan satuan PAUD yang beragam berdasarkan aktivitas kegiatannya. Kesamaannya adalah pada honor guru yang memerlukan dana paling besar sementara belum terdapat pada juknis.

Hasil kajian ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Basuki, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sebesar 60% dana BOP hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan sisanya sebesar 40% digunakan untuk biaya non operasional. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kebutuhan operasional dibiayai dengan rata-rata besaran 33% dari keseluruhan BOP yang diterima.

### C. Dampak BOP dalam Penyelenggaraan PAUD

#### 1. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Dana BOP secara tidak langsung cukup efektif dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran. Indikasinya adalah melalui dana BOP satuan PAUD yang semula kekurangan sarana pembelajaran dapat terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan pembelajaran berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi guru dan anak dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, satuan PAUD yang semula tidak mempunyai APE sebagai sarana bermain dapat terpenuhi. Alat permainan edukatif merupakan sarana yang sangat penting dalam membantu tumbuh kembang anak, karena perkembangan motorik anak akan banyak dipengaruhi oleh pemberian stimulus diantaranya adalah melalui bermain.

Pemenuhan APE menjadi unsur utama dalam pembelajaran di PAUD, sehingga tenaga pendidik dan penyelenggara/pengelola satuan PAUD dapat mengantisipasi dengan melengkapi sarana belajar melalui berbagai inovasi atau kreasi guru yang dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar lingkungan sebagai sarana belajar, sehingga tidak hanya membeli dari bahan

pabrikasi. Dengan demikian kelebihan dana bahan habis pakai dapat dimanfaatkan satuan PAUD untuk penggunaan kegiatan pembelajaran dan bermain lainnya.

Terkait dengan pemenuhan sarana, melalui diskusi, para guru PAUD juga menyampaikan agar dana BOP dapat digunakan untuk membeli laptop sebagai pendukung kegiatan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang menunjukkan suatu obyek yang tidak pernah dilihat anak di lingkungan sekitarnya. Bantuan media komputer/laptop ini dapat membantu menunjukkan pada anak-anak hal yang tidak ada di lingkungan sekitar.

#### 2. Peningkatan Akses Siswa Miskin

Kontribusi BOP terhadap perkembangan jumlah siswa PAUD untuk semua satuan PAUD cukup baik. Rata-rata terdapat peningkatan walaupun persentasinya masih kecil. Hal ini dikuatkan oleh Dinas Pendidikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), bahwa dengan adanya BOP banyak satuan PAUD baru yang didirikan oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang semula terbatas layanan PAUD-nya, saat ini siswanya semakin bertambah. Peningkatan untuk siswa TK sebesar 4%, KB 6%, SPS 3% dan TPA sebesar 8%. Peningkatan jumlah siswa PAUD untuk TPA tergolong paling tinggi diantara satuan PAUD lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan usia muda yang keduanya bekerja dan tidak mempunyai asisten rumah tangga sehingga menitipkan anaknya di TPA.

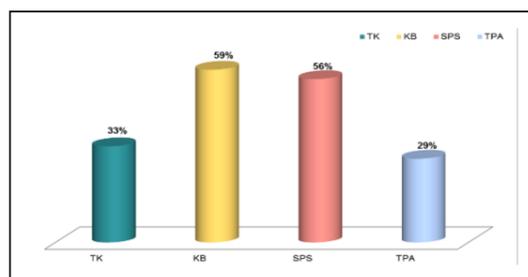
Peningkatan jumlah siswa ini diakui oleh penyelenggara lembaga tidak serta merta membawa peningkatan terhadap akses siswa miskin, bahkan di Kota Batu diakui bahwa sangat kesulitan mencari siswa miskin. Di sebagian besar daerah, akses siswa miskin pada satuan PAUD jumlahnya juga sedikit hanya ada 2-3 siswa per satuan PAUD. Layanan PAUD terhadap siswa kurang mampu di satuan PAUD umumnya memiliki kebijakan subsidi silang dan pemberian keringanan biaya seperti pemberian potongan iuran bulanan, bantuan seragam dari alumni dan cicilan pembayaran uang seragam selama 1 tahun. Dari hasil diskusi kelompok terpumpun, siswa yang diberikan bantuan sepenuhnya dari dana BOP umumnya adalah anak yatim.

### 3. Meringankan Beban Orang Tua Siswa

Dana BOP membantu meringankan beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid. Dari hasil diskusi kelompok disampaikan bahwa BOP PAUD sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang semula disediakan oleh orang tua seperti kegiatan visual dan praktik setelah mendapat BOP dapat dipenuhi dengan menggunakan dana BOP. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan BOP PAUD yang tertuang dalam petunjuk teknis yaitu membantu meringankan beban biaya yang ditanggung oleh orang tua. Dampak BOP PAUD dalam membantu meringankan beban orang tua juga sejalan dengan hasil penelitian Waluyo Basuki, dkk (2019) dan penelitian Emilda Sulasmi (2020), bahwa BOP PAUD membantu meringankan beban orang tua.

#### D. Kontribusi BOP PAUD terhadap Penyelenggaraan PAUD

Berdasarkan hasil survey di satuan PAUD, bantuan dana BOP cukup efektif dalam membantu menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD untuk TK rata-rata sebesar 33% dari seluruh penyelenggaraan, KB 59%, SPS 56% dan TPA 29%.



Gambar 6. Kontribusi BOP dalam Penyelenggaraan PAUD

Sumber: Analisis data Kajian BOP PAUD 2019

Kontribusi BOP untuk penyelenggaraan operasional di TPA baru 29 persen dari seluruh biaya operasional di TPA. Ini karena biaya di TPA tergolong tinggi jika dibandingkan dengan satuan PAUD lainnya, sehingga TPA harus memenuhi kekurangan biaya operasional penyelenggaraan TPA sebesar 71 persen. Kekurangan biaya

operasional satuan PAUD umumnya dipenuhi dengan iuran SPP dari orangtua dengan jumlah bervariasi. TK swasta yang dikelola oleh masyarakat/yayasan memungut uang SPP dengan besaran bervariasi, mulai Rp 50.000, - hingga di atas Rp 250.000, -. Besarnya pungutan/iuran bulanan ini tergantung pada besar-kecilnya yayasan yang menaungi. Di beberapa wilayah Kab/ Kota ada batasan maksimal besarnya iuran bulanan yang diperbolehkan ditarik dari orangtua. Di Kota Batu misalnya, besar iuran yang diperbolehkan ditarik dari orangtua tidak melebihi Rp 150.000,-.

Kekurangan biaya operasional untuk KB dan SPS dipenuhi dengan memungut uang SPP/ iuran bulanan pada orangtua anak. Besaran uang SPP tergantung kondisi lembaga, mulai dari Rp 10.000,- sampai Rp 50.000,- per anak per bulan. Perbedaan iuran bulanan yang dibebankan kepada orangtua antara lembaga TK dengan KB dan SPS jelas menunjukkan kondisi status sosial ekonomi peserta didik yang dilayani di masing-masing satuan jenis layanan PAUD. Sebagian besar peserta didik yang terdapat pada lembaga SPS berlatar belakang ekonomi rendah, sehingga penyelenggara lembaga tidak bisa membebaskan iuran yang terlalu banyak kepada orangtua siswa. Adanya BOP PAUD sangat membantu meringankan beban orangtua dalam menyekolahkan anaknya.

#### SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Dana BOP PAUD cukup efektif dalam membantu penyelenggaraan operasional PAUD, meningkatkan kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa. Dana BOP juga membantu meningkatkan jumlah siswa di semua satuan PAUD walaupun jumlahnya relatif kecil pada masing-masing PAUD, yaitu TK 4% , KB 6%, SPS 3%, dan TPA sebesar 8%. Dana BOP juga berkontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD, bahkan banyak lembaga yang mengandalkan dana BOP sebagai dana utama karena iuran dari orang tua sangat kecil. Kontribusi dana BOP dalam penyelenggaraan PAUD pada masing-masing satuan adalah sebesar 59% untuk KB, SPS sebesar 56%, TK 33% dan TPA sebesar 29%.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan perbaikan dalam

penyelenggaraan program ke depan yaitu.

1. Pencairan dana BOP di 12 wilayah penelitian sebagian besar tidak tepat waktu, umumnya disebabkan perbedaan data ketika pendataan dan penyaluran. Hal ini terkait faktor-faktor berikut: kompetensi operator disatuan PAUD, birokrasi di daerah, pergantian pejabat di daerah, dan perubahan mekanisme peyaluran dana BOP dari satu tahap penyaluran pada tahun 2018 menjadi 2 tahap tahun 2019, sehingga banyak satuan PAUD dan pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya.
2. Pemanfaatan dana BOP PAUD di semua jenis satuan PAUD belum sesuai dengan juknis. Rata-rata proporsi pemanfaatan dana untuk komponen kegiatan pembelajaran lebih rendah dari juknis, sedangkan untuk komponen kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya melebihi juknis. Faktor penyebab adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan satuan PAUD dan rincian komponen pada juknis.
3. Dampak BOP terhadap penyelenggaraan PAUD cukup baik, namun layanan akses terhadap siswa miskin dengan membebaskan biaya pendidikan masih kurang. Siswa PAUD dari keluarga miskin umumnya hanya diberikan potongan biaya.
4. Kontribusi dana BOP di satuan PAUD sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan jumlahnya, khususnya untuk kegiatan pendukung dan honor guru, karena honor guru PAUD saat ini masih sangat kecil, dan belum ada pada komponen juknis.

##### Rekomendasi

1. Direktorat Pembinaan PAUD perlu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan PAUD dalam rangka sinkronisasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada para operator di satuan PAUD dengan melibatkan unsur dinas pendidikan agar tidak terjadi perbedaan data ketika *cut off* dengan data ketika pencairan dana. Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana perlu dilakukan perubahan mekanisme transfer dana, yang semula melalui transfer daerah dapat dilakukan melalui transfer

langsung ke satuan PAUD. Pemerintah daerah perlu menyederhanakan pengesahan dokumen terkait dengan pencairan dana BOP dengan mengurangi jumlah pejabat dalam pengesahan dokumen.

2. Direktorat Pembinaan PAUD perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang mudah dipahami dan fleksibel dalam penggunaan terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD, karena kebutuhan dana pada satuan PAUD cukup beragam.
3. Satuan PAUD perlu meningkatkan akses siswa miskin, yaitu dengan membebaskan biaya pendidikan minimal 2 peserta didik dalam satu rombongan belajar agar semakin banyak siswa miskin yang dapat terlayani PAUD.
4. Kontribusi BOP PAUD dalam membantu penyelenggaraan PAUD saat ini sebesar 33%, sehingga perlu ditingkatkan agar layanan PAUD semakin baik khususnya terkait dengan tambahan honor guru yang belum ada pada komponen juknis. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah, dan kerjasama dengan kementerian desa dalam penyelenggaraan PAUD melalui sinkronisasi alokasi dana pemerintah, pemerintah daerah dan dana desa.

## PUSTAKA ACUAN

- Aisyah, Siti. 2011. *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anonim. 2016. *Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016*. <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/02/juknis-bop-paud-2016.html> diunduh 4 September 2016.
- Arna Ristiyanti Tarida, S.Si. 2019. *Analisis Efektivitas Program BOP PAUD Pada Satuan Pendidikan Tahun 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, vol. - (-): 1-23
- Daftar penerima Bansos atau BOP PAUD tahun 2016. <http://www.volimaniak.com/2016/03/daftar-penerima-bansos-atau-bop-paud.html>. Diunduh 4 September 2016.
- Direktorat Pembinaan PAUD. 2019. *Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan PAUD. 2016. *Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Emilda Sulasmi. 2020. Evaluation of the Operational Assistance Management (BOP) Management Funding Program At The Bengkulu City PAUD Institution. *Indonesian Journal of Education and Mathematical Science*, Vol 1 No 1.
- Erfy Melani Lalupanda. 2019. Evaluasi Implementasi Program BOP PAUD. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, Volume 3.
- Felayati dan Yaswinda. 2020. Penerapan Model Evaluasi CIPPO dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4 (1).
- Fitriani, Jauhar Arifin, Rahmi Hayati. 2019. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Di Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Pamarangan Kiwa. *JAPB*, Vol. 2, No. 2
- Florentina Reni Swastika, Indarja, Amiek Soemarmi. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Di Kabupaten Karanganyar (Studi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini). *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.
- Hamzah, Amriani. 2013. *Perilaku Organisasi*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Ika Nurul Qamari, Leli Joko Suryono. 2017. Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul. *Jurnal BERDIKARI*, Vol.5 No.2 Agustus.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *APK/APM PAUD, SD, SMP,dan SM termasuk Madrasah dan Sederajat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masnipal. 2013. *Siap Menjadi Guru dan Pengelola Profesional*. Jakarta: PT. Efek Media Komputindo.
- Morrison, G. S. 2008. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. diterjemahkan oleh Suci Ramadhona. 2012. Jakarta: PT Indeks.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rahayu, Nur'aini, 2015. *Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana, IAIN Surakarta.
- Rahayu, Subagyo 2019. *Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada TK Negeri di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Tesis STIE Widya Wiwaha.
- Santrock, John W. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Schunk, Dale H. 2012. *Teori-teori Pembelajaran: Perspektif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siagian, Sondang. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sujiono, Bambang. 2012. *Metode Pengembangan Fisik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, A. 2011. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyadi (2010). *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani.
- Tedjawati, 2012. Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 5 (2), hlm. 227-238.
- Tedjawati, 2013. *Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19 (3), hlm. 346-363.
- Trianto. 2011. *Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNICEF. 2009. *Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap (PAUD Holistik Untuk Semua di Indonesia: Mendukung Masyarakat dalam Menjembatani Kesenjangan)*.
- Waluyo Basuki, Zamrotul Khasanah, Farida Widayawati, Aniek Sugianti. 2019. Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018. *Jurnal PAUD & DIKMAS*, Edisi Juni.
- Yamin, Martinis. dan Sanan, Jamilah, S. 2012. *Panduan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: GP Press.

